

**MENGUTAMAKAN MUTU PELAYANAN JASA
BERDASARKAN KOMITMEN YANG TINGGI
TERHADAP ASPEK KESELAMATAN DAN BERTINDAK
PROFESIONAL, INDEPENDEN SERTA TERPERCAYA DI
ATAS KEPENTINGAN SEMUA PIHAK**

**GIVING PRIORITY TO THE QUALITY OF SERVICES BASED
ON HIGH COMMITMENT TO THE SAFETY ASPECT AND
ACT PROFESSIONAL, INDEPENDENT AND TRUSTED OVER
THE INTEREST OF ALL PARTIES**



Daftar Isi

Contents

02	Profil Perusahaan <i>Company Profile</i>	40	Penelitian & Pengembangan <i>Research & Development</i>
04	Visi dan Misi Perusahaan <i>Company Vision and Mission</i>	43	Pengembangan SDM <i>Human Resources Development</i>
05	Kebijakan Mutu Perusahaan <i>Company Quality Policy</i>	49	Teknologi Informasi <i>Information Technology</i>
06	Sambutan Komisaris <i>Commissioners Message</i>	50	Tanggung Jawab Sosial <i>Social Responsibility</i>
10	Sambutan Direktur Utama <i>President Director Message</i>	51	Tata Kelola Perusahaan <i>Corporate Governance</i>
17	Aktifitas Manajemen <i>Management Activities</i>	68	Kinerja Keuangan <i>Financial Performance</i>
24	Klasifikasi Kapal <i>Ship Classification</i>	74	Komisaris, Direksi dan Staf <i>Commissioners, Director and Staff</i>
30	Persetujuan Gambar <i>Drawing Approval</i>	75	Komite Konsultansi Klasifikasi Indonesia (K3I) <i>The Consultative Committee of Indonesian Classification</i>
31	Aktifitas Survey Klasifikasi <i>Classification Survey Activities</i>	76	Kerjasama <i>Cooperation</i>
32	Aktivitas Jasa Industri <i>Industrial Services Activities</i>	77	Jaringan Operasional <i>Operational Network</i>
33	Survey Statutoria <i>Statutory Survey</i>	78	Daftar Kontak <i>List Of Contact</i>
34	Otorisasi Statutoria <i>Statutory Authorization</i>	80	Laporan Auditor Independen <i>Independent Auditors Report</i>
35	Konsultasi & Supervisi <i>Consultancy & Supervision</i>		



Profil Perusahaan

Company Profiles

Biro Klasifikasi Indonesia, juga dikenal sebagai BKI adalah Badan Usaha Milik Negara yang didirikan dengan tujuan mulia untuk mendukung kemandirian industri perkapalan dan pelayaran nasional melalui pelayanan jasa klasifikasi dan jasa-jasa lainnya yang terkait. BKI dalam pelayanan jasanya melakukan riset dan mempublikasikan serta menerapkan standar teknik (Rules & Regulation) dengan melakukan kegiatan desain, konstruksi dan survey maritim terkait dengan fasilitas terapung, termasuk kapal. Standar ini disusun dan dikeluarkan oleh BKI sebagai publikasi teknik. Rules & Regulation yang dikembangkan tidak hanya struktur konstruksi lambung, namun juga meliputi peralatan keselamatan, instalasi permesinan dan kelistrikan.

Lingkup kerja dari BKI adalah melaksanakan survey dan sertifikasi untuk menjamin bahwa Rules & Regulation yang telah dikembangkan, diterapkan pada saat pembangunan kapal baru dan kapal yang sudah jadi. Untuk mempertahankan kondisi kapal tersebut, maka dalam prosesnya kapal diharuskan melakukan perawatan dan perbaikan yang terjadwal, dimana pelaksanaan ini akan dimonitor terus oleh BKI dengan melakukan survey periodik dalam mempertahankan klasifikasinya.

Penilaian kondisi kapal dilakukan berdasarkan survey yang profesional dan independen oleh surveyor klasifikasi yang memiliki kompeten dalam melakukan penilaian kondisi kapal. Hasil dari pemeriksaan dan penilaian ini berupa laporan dan sertifikat yang dijadikan acuan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain Pemilik Kapal, Pihak Asuransi, Pemilik Cargo, Pencharter, Galangan Kapal, Pemerintah / Syahbandar / PSC dll.

Indonesian Classification Bureau, also is known as BKI is a State Owned Company established with a purpose to support industrial independence of national shipping industries and sea transportation through classification service and other services related. BKI in its service activities also doing research publicizes and applies technique standard (Rules & Regulation) by doing design activity, construction and maritime survey related to afloat facility, including ship. This standard compiled and released by BKI as technical publication. Rules & Regulation developed not only hull structure, but also covers safety equipments, installation of machinery and electricity.

Scopes of work of BKI is execute survey and certify to ensure that Rules & Regulation which has been developed, applied at the time of construction of new building ship and existing ship. To maintain condition of the ship, hence in process of ship is obliged to does maintenance and repair schedule, where this execution will be monitored always by BKI by doing periodic survey in maintaining its classification.

Judgement of ship condition is done based on professional and independent survey by class surveyor having competence in doing survey of ship condition. Result from this survey and assessment in the form of report and certificate taken as reference by interested parties, for example Ship owner, Insurance Company, Cargo Owner, charterer, Dockyard, The Government / Harbour master / PSC etc.



Kegiatan usaha pada awal berdirinya BKI adalah kegiatan dalam bidang klasifikasi kapal (sebagai bisnis utama) dimana usaha ini dilaksanakan secara nirlaba, namun sejalan dengan perkembangan usaha, maka saat ini selain kegiatan di atas, juga melakukan diversifikasi usaha dengan mengembangkan kegiatan bidang jasa non klasifikasi, yaitu kegiatan usaha jasa konsultasi & supervisi. Sehingga saat ini kegiatan usaha BKI ada 2 (dua) kegiatan usaha, yaitu Kegiatan Usaha Jasa Klasifikasi & Statutoria dan Kegiatan Usaha Jasa Konsultasi & Supervisi.

Kegiatan Usaha Jasa Klasifikasi & Statutoria mencakup:

- Pemeriksaan konstruksi kapal, pengawasan dan pengujian serta penerbitan sertifikat kelas dan registrasi kapal.
- Pemeriksaan dan pengujian alat-alat apung dan fasilitas konstruksi lepas pantai.
- Pengujian dan sertifikasi material dan komponen.
- Pengujian dan penerbitan sertifikat kualifikasi juru las, inspektor las dan ahli las lainnya.
- Melaksanakan pemeriksaan dan sertifikasi di bidang statutoria berdasarkan otorisasi dari pemerintah Republik Indonesia maupun dari pemerintah negara lain.
- Bertindak sebagai agen dan atau mewakili klasifikasi asing / konsultan asing.
- Melaksanakan sertifikasi sesuai standar Internasional.

Sedangkan Kegiatan Usaha Jasa Konsultasi & Supervisi mencakup:

- Jasa konsultasi & supervisi di bidang maritim dan industri serta teknik lainnya.
- Studi kelayakan di bidang teknologi maritim dan industri lainnya.
- Jasa inspeksi dan sertifikasi di bidang minyak, gas dan ketenagakerjaan.
- Rekayasa teknik dan supervisi di bidang minyak dan gas.
- Pengujian DT dan NDT.
- Konsultasi sesuai standar nasional dan internasional.
- Pelatihan keahlian di bidang teknik.
- Tank cleaning & sludge processing.
- Pencegahan korosi.

Setelah beroperasi selama 46 tahun, BKI telah mencapai keberhasilan dan kondisi sebagai berikut:

- Berkantor pusat di Jakarta dan memiliki 21 kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk di 1 (satu) cabang di Singapore.
- Telah memiliki kerja sama dengan hampir semua badan klasifikasi asing anggota IACS.
- Menerbitkan Rules & Regulation di bidang klasifikasi kapal dan setiap tahun menerbitkan Register Kapal dan Register ISM Code & ISPS Code
- Telah mendapatkan pelimpahan tugas / wewenang dari Pemerintah Republik Indonesia cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan untuk melaksanakan survey dan sertifikasi statutoria.
- Telah mendapat penunjukan inspeksi dan sertifikasi dari Pemerintah cq Direktorat Jenderal Migas dan Departemen Tenaga Kerja.
- Telah menerapkan sistem manajemen mutu berdasarkan ISO 9001: 2008 dan telah mendapatkan sertifikat mutu ISO 9001: 2008 dari badan sertifikasi Internasional.
- Telah menerapkan dan mendapatkan sertifikat SNI 19-17020 (akreditasi perusahaan jasa inspeksi teknik) dan SNI 19-17025 (akreditasi laboratorium).

Business activity upon BKI incorporation is an activity in ship Classification sector (as a core business) where this business is a non profit oriented, but in line with BKI business development as a company, besides the abovementioned activities, BKI also makes a business diversification in developing non classification services, namely consultancy & supervision services. So that, BKI has currently 2 business segments, namely Classification & Statutory Business Activity and Consultancy & Supervision Business Activity.

Classification and Statutory services (core businesses), shall cover:

- *Surveying of ship construction, supervising and testing as well as issuing Class Certificate and Registering Ships;*
- *Inspecting and testing floating objects and off-shore construction facility;*
- *Testing and certifying Materials and Components;*
- *Testing and issuing qualification certificates of welders, welding inspector and any other welders;*
- *Surveying and certifying in Statutory matters based on the Authorization of the Government of the Republic of Indonesia and governments of any other states;*
- *Acting as an agent and/or representing Foreign Classification/Foreign Consultant; and*
- *Certifying in accordance with International standard.*

While, Consultancy & Supervision services shall cover:

- *Consultancy and Supervision services in Marine and industrial as well any other technical sectors;*
- *Feasibility Study in Maritime technology and any other Industrial sectors;*
- *Inspection & Certification services in Oil and Gas and Labour Sectors;*
- *Technical Engineering and Supervision in Oil and Gas sector;*
- *DT & NDT testing;*
- *Consultancy in accordance with National and International Standards;*
- *Technical public training;*
- *Tank Cleaning & sludge processing*
- *Corrosion Prevention*

After operating for 46 years, BKI has attained the following:

- *Having its Head Office in Jakarta and 21 branch offices throughout Indonesia, including Singapore;*
- *Already cooperating with almost all foreign classification bodies being members of IACS;*
- *Issuing Rules & Regulation in Ship Classification and annually issuing Ship Register, ISM Code & ISPS Code Register;*
- *Already receiving delegation of authority from the Government of Indonesia cq. Directorate General of Sea Transportation for statutory survey & certification;*
- *Already receiving inspection and certification assignment from the Government cq. Directorate General of Oil and Natural Gas and Ministry of Manpower;*
- *Already applying quality management system based on ISO 9001:2008 and receiving Quality Certificate of ISO 9001:2008 from International Certification Body;*
- *Has implemented and certified ISO 19-17020 (accreditation of engineering inspection services company) and SNI 19-17025 (laboratory accreditation).*

Visi & Misi Perusahaan

Company Vision & Mission

Visi Perusahaan | Company Vision

Menjadikan BKI sebagai perusahaan jasa teknik yang terpercaya dan terbaik dari segi kualitas produk, kualitas sumber daya manusia dan kinerja perusahaan.

Making BKI as a reliable and the best engineering company related quality, human resources quality and company's performance.

Misi Perusahaan | Company Mission

- Mengutamakan terjaminnya keselamatan jiwa dan benda di laut serta perlindungan lingkungan melalui pengembangan dan pemeriksaan standar kapal serta fasilitas terkait lainnya.
 - Pengelolaan perusahaan secara efektif dan efisien dengan menerapkan Tata Kelola Perusahaan dengan Baik.
 - Membentuk citra perusahaan bahwa jasa BKI dibutuhkan dan menjadi standar keselamatan dan kualitas.
 - Memberikan kesempatan kepada para tenaga ahli kelautan nasional untuk berpartisipasi melalui pengembangan pengetahuan serta penerapannya.
 - Membantu peningkatan pendapatan negara baik dalam bentuk Rupiah maupun valuta asing.
-
- *Giving priority the securing safety of life and any objects at sea as well as protecting the environment through development and inspection of ship standards and any other relevant facilities;*
 - *Managing the company effectively and efficiently by applying a Good Corporate Governance;*
 - *Forming corporate image that BKI services are required and serve as safety and quality standard;*
 - *Giving opportunity to the national maritime experts to participate in knowledge development and application thereof; and*
 - *Assisting in increasing state's revenues both in the form of Rupiah and foreign exchange.*



Kebijakan Mutu Perusahaan Company Quality Policy

Sebagai perusahaan yang menerapkan sistem manajemen mutu berdasarkan ISO 9001:2008, BKI memiliki komitmen untuk memberikan kepuasan kepada pemakai jasa (customer satisfaction) dan terus melakukan penyempurnaan (continuous improvement). Kebijakan Mutu Perusahaan adalah **"mengutamakan pelayanan jasa bagi para pengguna jasa berdasarkan kepedulian yang tinggi terhadap masalah Keselamatan dan Mutu"**.

Dalam mewujudkan komitmen tersebut, BKI memiliki Nilai - nilai Perusahaan yang diterapkan pada seluruh jajaran organisasi, meliputi:

- Moto perusahaan **"TERPERCAYA"**, yang berarti jasa yang diberikan adalah berkualitas, dapat diandalkan, efisien, tepat waktu dan memiliki reputasi.
- Nilai - nilai perusahaan yaitu Integritas, Profesionalisme, Kepuasan Pengguna Jasa, Kepemimpinan dan Penghargaan pada Karya / Prestasi Karyawan.
- Budaya Perusahaan **"TERTIB"** (Taqwa kepada Tuhan YME; Etos kerja yang tinggi; Reputasi yang senantiasa ditingkatkan; Tertib dalam menerapkan kebijakan manajemen dan sikap pribadi; Ilmu pengetahuan dan Teknologi yang dikuasai; Baik dalam pelayanan dan hasil kerja).

Manajemen BKI menjamin:

- Persyaratan mutu berorientasi kepada standar mutu Internasional sesuai dengan ISO 9001:2008 dan pemenuhan pencapaian sasaran mutu perusahaan serta senantiasa melakukan penyempurnaan yang menerus terhadap mutu.
- Penerapan Sistem Mutu dan nilai-nilai perusahaan tersebut dalam seluruh kegiatan jasa.
- Tanggap terhadap kebutuhan pemakai jasa / masyarakat umum dan mengutamakan kepuasan pelanggan dan aspek keselamatan.
- Semua personil selalu diberi pemahaman tentang sistem mutu melalui pelatihan yang berkesinambungan serta penerapan sistem mutu di dalam semua jajaran organisasi.

Pemenuhan terhadap kebijakan, prosedur dan petunjuk kerja adalah hal yang mutlak dan mengikat bagi semua karyawan. Mutu adalah tanggung jawab semua karyawan yang bekerja di jajaran BKI.

*As a company applying quality management system based on ISO 9001:2008, BKI is committed to satisfy the customers and make a continuous improvement. Company's Quality Policy is **"giving priority to serve the customers with a high attention to Safety and Quality aspects"***

In realizing the commitment, BKI has Company's values applied to all organizational staff, covering:

- Company's motto is **"RELIABLE"**, means services given are quality, reliable, efficient, timely and reputable.
- Company's values are Integrity, Professionalism, Customer Satisfaction, Leadership and Reward to Employee's Performance.
- Company's culture is **"TERTIB"** (Devotion to the God; High work ethic; Improved reputation; being orderly in applying management's policy and personal attitude; Mastered science and technology; Good in service and work result).

BKI management shall committed that:

- Being oriented to international quality standard in accordance with ISO 9001:2008 requirements and fulfilling the attainment of company's quality objective as well as always continuously improving the quality.
- Applying quality system and the company's values in all service activities.
- Being responsive to the customers/public need and giving priority to the customer satisfaction and safety aspect.
- All personnel are always given understanding on quality system through a continuous training as well as quality system application to all organizational staff.

Fulfillment of quality policy, procedures and instruction shall be imperative and bind all employees. Quality is responsible of all employees joining BKI.



Sambutan Dewan Komisaris

Message from Board of Commissioners

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

Para Pemangku Kepentingan PT BKI yang terhormat,

Rasa syukur yang tak terhingga ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karuniaNya perusahaan telah berhasil memperlihatkan kinerja yang sangat menggemblirakan dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai keberhasilan perusahaan adalah persembahan kerja keras dari jajaran manajemen dan staf yang tentunya dapat diraih dengan kepercayaan dari seluruh pemangku kepentingan terutama kalangan asuransi, para pemilik dan operator kapal, instansi pemerintah serta berbagai asosiasi terkait.

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

Dear BKI Stakeholders,

Thanks to God Almighty for His mercy and His grace that company has managed to show a very encouraging performance in the last few years. A company's success is the result of hard work from all of management and staff that would be achieved from the trust of all stakeholders, in particular from insurance, ship's owner and operator, administration and other relevant associations



Secara keseluruhan, target kinerja produksi dan kinerja keuangan yang ditetapkan oleh Pemegang Saham untuk tahun 2010 hampir semua dapat terlampaui dan meningkat dibanding kinerja yang sama pada tahun 2009. Hasil audit laporan keuangan oleh Kantor Akuntan Publik KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono menyatakan wajar dalam semua hal yang material dan tingkat kesehatan perusahaan "AAA" sesuai indikator penilaian kesehatan BUMN juga tetap dapat dipertahankan. Sejalan dengan hal tersebut, jumlah kontribusi pajak dan dividen kepada Negara serta pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan kepada lingkungan sekitar juga meningkat.

Oleh karena itu, tak berlebihan kiranya dalam kesempatan pertama, Dewan Komisaris menyampaikan rasa apresiasi dan terima kasih kepada jajaran Direksi periode 2004-2010 yang telah mengantarkan perusahaan mencapai kinerja terbaiknya dan menyelesaikan masa tugasnya dengan sangat baik. Dewan Komisaris berkeyakinan jajaran Direksi yang baru dengan dukungan seluruh Staf akan mampu mempersembahkan kinerja perusahaan yang lebih baik lagi sesuai dengan visi dan misi perusahaan.

Sebagai penyedia layanan jasa klasifikasi dan jasa teknik terkait, perusahaan tetap berupaya secara profesional dan handal untuk memberikan pelayanan secara terpercaya sehingga mampu meraih target pertumbuhan kapal yang diklaskan baik secara unit maupun tonase. Dalam bidang Konsultansi dan Supervisi, perusahaan juga tetap memperkuat eksistensinya dengan meraih pasar dari kebutuhan jasa industri swasta dan mengoptimalkan kewenangan yang telah diberikan Pemerintah di lingkungan transportasi, minyak dan gas serta ketenagakerjaan.

Perkembangan dan peningkatan keberhasilan perusahaan di berbagai bidang diperoleh dari konsistensi kebijakan manajemen untuk pencapaian perluasan cakupan dan kualitas pelayanan prima mulai dari awal tahun 2010. Melalui customer meeting secara rutin di berbagai cabang, Manajemen dapat tanggap dan menindaklanjuti masukan dari pengguna jasa dan terjalin hubungan yang baik dengan seluruh regulator, asosiasi di bidang pelayaran, galangan dan asuransi. Dewan Komisaris mencatat suatu lompatan kiprah BKL yang cukup berarti di kancah Asia, dimana pada awal tahun 2010 BKL telah berhasil berperan aktif dalam pendirian forum Asian Classification Societies Executive (ACS). Meeting bersama-sama dengan Nippon Kaiji Kyokai (NK) Jepang, Korean Register of Shipping (KR) Korea Selatan, China Classification Society (CCS) China, India Register of Shipping (IRS) India, dan Viet Nam Register (VR) Vietnam sebagai negara pendiri ACS. Forum ini telah digunakan oleh BKL untuk belajar dan meningkatkan kompetensi dan kapasitasnya.

Overall, all production and financial performance targets which was set by the Shareholders for 2010 has been almost achieved and generally improved compared to the performance in 2009. The financial audit results by KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono is reasonable in all the object and the company can maintain level "AAA" against the assessment indicators for state owned enterprises. In line with this, the amount of the contribution of tax and dividends to the State as well as the implementation of corporate social responsibility to the public is also increased.

Therefore, in this moment, the Board of Commissioners conveys an appreciation and thanks to the 2004-2010 Board of Directors which has been delivering the company in reaching its best performance and completed their term very well. The Board of Commissioners sure that the new Board of Directors with the support of the staff will be able to increase company performance in accordance with the vision and mission of the company.

As the classification and engineering services company, the company is consistently striving to be a professional and reliable in providing services to reach the growth target of classed ship in units or tonnage. In Consultancy and supervision, the company also continued to strengthen its existence by capture the market needs from industry and optimizing delegation from Government which has been obtained in transport, oil and gas as well as labor field.

The development and improvement of the company's success in various fields came from the consistency of management policy to the coverage expansion and excellent quality service from the beginning of the year 2010. With regular customer meeting in branches, the management can respond and follow up the feedback from user and maintain good relationship with the administrator, shipping associations, shipyards and insurance. The Board of Commissioners noted a remarkable leap BKL's development in Asia, where in the beginning of 2010, BKL had managed to play an active role in the establishment of Asian Classification Societies (ACS) Executive Meeting with Nippon Kaiji Kyokai (NK) Japan, Korean Register of Shipping (KR) South Korea, China Classification Society (CCS) China, Indian Register of Shipping (IRS) India, and Viet Nam Register (VR) Vietnam as the founder of ACS. This Forum has been used by BKL to learn and enhance its competence and capacity. The Board of Commissioners continues to encourage Direc-

Dewan Komisaris terus mendorong Direksi untuk melakukan kegiatan riset dan pengembangan dalam upaya untuk penyempurnaan dan pengembangan Rules and Regulation BKI, memperkuat database perusahaan serta pemenuhan mutu layanan yang berorientasi pada standar mutu internasional. Demikian juga, upaya pemanfaatan IT untuk inovasi pelayanan dan peningkatan efektivitas dan efisiensi operasional harus terus dilanjutkan sehingga mampu memperkuat posisi segmen Klas maupun Konsultansi dan Supervisi.

Akhir kata, perkenankanlah Dewan Komisaris menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas seluruh pelaksanaan tugas yang baik dari jajaran Direksi beserta seluruh karyawan di tahun 2010. Demikian juga kepada stakeholders atas kepercayaannya kepada perusahaan, Pemegang Saham yang senantiasa memberikan saran dan arah pengelolaan perusahaan serta kepada Komite Audit yang telah bekerja sama dalam upaya pelaksanaan tugas Dewan Komisaris. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membimbing kita dalam melaksanakan tekad untuk melanjutkan dan meningkatkan kesuksesan-kesuksesan PT Biro Klasifikasi Indonesia di masa mendatang.

a.n. Dewan Komisaris
Komisaris Utama

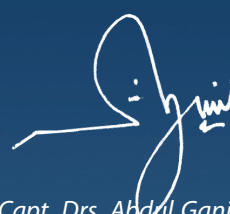


Capt. Drs. Abdul Gani, MM, MBA

tors for research and development activities in updating and development of BKI Rules and Regulation, strengthen the company database as well as the fulfilment of the service quality with international quality standards. Likewise, the innovation of service using the IT and increasing operational effectiveness and efficiency should be continued to strengthen the position of the Class as well as Consultancy and Supervision segment

End of a Word, Board of Commissioner say thanks and high appreciation for all completes duty and tasks to the Board of Directors and all employees in 2010. Also to the stakeholders confidence to the company, shareholders who always give advice and direction to the management as well as to the Audit Committee who have worked together in the execution of the duties of the Board of Commissioners. May God guide us in carrying out the determination to continue and increase the success of PT Biro Klasifikasi Indonesia in the future.

*on Behalf on Board of Commissioners of
President Commissioners*



Capt. Drs. Abdul Gani, MM, MBA

Profil Dewan Komisaris

Board of Commissioners Profile



Susunan Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. KEP.155/MBU/2009 tanggal 28 Juli 2009, adalah sebagai berikut:

- Komisaris Utama : Capt. Drs. Abdul Gani, MM, MBA
- Komisaris : Drs. Riyadi Widiasmoro, MSI
- Komisaris : Liliek Mayasari, SE



Capt. Drs. Abdul Gani, MM, MBA

Komisaris Utama; Usia 61 tahun; Pendidikan: Akademi Ilmu Pelayaran (1974), Mualim I Pelayaran Besar/ANT. I (1980), Marine Inspector A (1985), Kesyahbandaran Kelas I (1986), Port State Control (1996), International Safety Management (1997), STIA LAN RI/Strata 1 (1997), AIMS (ADM)/Strata 2 (2000). Pengalaman: Mualim s/d Nakhoda kapal niaga (1974 - 1982); Departemen Perhubungan (1983 - 2009), antara lain di Adpel Kelas I Sorong (2002 - 2004), Adpel Utama Makassar (2004 - 2007), Direktur Perkapalan dan Kepelautan (2007 - 2009); Project Manager Penyusunan Standar Kapal Non Konvensi (NCVS) Indonesia (2009); Liasion Officer pada Project NCVS Indonesia (2009 - sekarang).

Capt. Drs. Abdul Gani, MM, MBA

President Commissioner; 61 years old, Education: Pilotage academy (1974), Ocean Going Shipping 1st Navigator /ANT I (1980), Marine Inspector A (1985); Kesyahbandaran first class (1986), Port State Control (1996), International Safety Management (1997), STIA LAN RI/S1 (1997), AIMS (ADM)/S2 (2000). Experience: propagator up to merchant ship navigator (1974 - 1982); Transportation Department (1983 - 2009), among other Adpel Class I Sorong (2002 - 2004), Adpel main Makassar (2004 - 2007), Director of shipping and marine (2007 - 2009); Project Manager Standard preparation of non convention ships (NCVS) Indonesia (2009); Liasion Officer at Project NCVS Indonesia (2009 - now).



Drs. Riyadi Widiasmoro, MSI

Komisaris; Usia 60 tahun; Pendidikan: STIA LAN RI (1978), Universitas Indonesia/Magister Sains (1995). Pengalaman: Departemen Keuangan (1972), Dosen STIA LAN RI (1995 - sekarang), Direktur Operasi PT. Kliring Berjangka Indonesia (2000 - 2002), Direktur Perencanaan & Pengembangan PT. Bhanda Ghara Reksha (2002 - 2009).

Drs. Riyadi Widiasmoro, MSI

Commissioner; 60 years old, Education: STIA LAN RI (1978), Indonesian University / Magister Sains (1995). Experience: Ministry of finance (1972), Lecturer of STIA LAN RI (1995 - now), Operations Director PT. Kliring Berjangka Indonesia (2000 - 2002), Director of Planning and Development PT. Bhanda Ghara Reksha (2002 - 2009).



Liliek Mayasari, SE

Komisaris; Usia 41 tahun; Pendidikan: Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada (1994). Pengalaman: Ditjen Pembinaan BUMN, Departemen Keuangan (1996-1998), Kementerian BUMN (1998-sekarang).

Liliek Mayasari, SE

Commissioner; 41 years old, Education: Master of Economy Gajah Mada University (1994). Experience: Coaching for State-owner Corporations Enterprises, Ministry of finance, (1996 - 1998), State Minister for State-Owner Corporation (1998 - now).

Sambutan Direktur Utama

Message from President Director

Berangkat dari keberhasilan, pengalaman, dan suka-duka tahun sebelumnya BKL memasuki tahun 2010 dengan penuh optimisme bahwa di tahun ini BKL dapat terus tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik. Hari ini haruslah lebih baik dari kemarin dan hari esok haruslah lebih baik dari hari ini. Itulah kata-kata bijak yang menjadi pemacu kami dan seluruh karyawan untuk terus berusaha memberikan yang terbaik, bekerja cerdas dan cermat untuk membawa BKL menjadi badan klasifikasi yang memiliki nilai tambah.

Sudah sepantasnyalah kita bersyukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dalam tahun 2010 ini, ditengah dinamika dan persaingan usaha yang semakin ketat BKL tetap mampu menunjukkan kinerja yang positif. Sepan-

Start from success, experience, and past ups and down, BKL entered 2010 with full of optimism that BKL could continue to grow and evolved for the better. Today must be better than yesterday and tomorrow shall be better than today. That's wise words that became our and all employees pacemakers to continue provide the best, smart and carefull work for BKL to become Classification Body with added value

We are thankful to the Lord Almighty, because in 2010, in the middle of the dynamics of the business and the competition getting tougher, BKL remains able to show a positive performance. Throughout a year , BKL Register noted the



jang tahun ini Register BKI mencatat adanya tambahan kapal yang diklasikan sehingga jumlah kapal dengan klas berlaku meningkat dari 6.276 unit pada tahun 2009 menjadi 6.400 unit, dengan total tonase mencapai 1 9.594.091 GT.

Hasil ini tentunya tidak lepas dari kepercayaan para pemangku kepentingan, terutama kalangan asuransi, para pemilik dan operator kapal, serta instansi pemerintah kepada BKI yang disambut dengan pelayanan profesional dan dedikasi seluruh jajaran BKI baik di Pusat maupun di Cabang-cabang. Kepercayaan itu tentu harus dijaga sebagai modal dasar terpenting dalam membangun reputasi sebagai sebuah badan klasifikasi. Manajemen dan seluruh jajaran BKI selalu berupaya menjaga kepercayaan itu dengan secara konsisten menjaga dan meningkatkan kualitas hasil kerja dan pelayanan, meningkatkan kompetensi dan kapabilitas SDM, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional melalui penerapan sistem berbasis Teknologi Informasi.

Ada beberapa catatan penting yang menandai kiprah dan langkah BKI selama tahun 2010 yang kiranya layak untuk mendapat perhatian. Di awal tahun, dalam kancah internasional BKI berhasil memantapkan eksistensi dan peranannya dalam forum Asian Classification Societies Executive (ACS) Meeting. BKI menjadi tuan rumah penyelenggaraan Extraordinary ACS Meeting yang merupakan tonggak sejarah karena dalam pertemuan tanggal 1 Februari 2010 di Bali itu ACS secara resmi dideklarasikan. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) bersama-sama dengan Nippon Kaiji Kyokai (NK) Jepang, Korean Register of Shipping (KR) Korea Selatan, China Classification Society (CCS) China, India Register of Shipping (IRS) India, dan Vietnam Register (VR) tercatat secara resmi sebagai negara pendiri ACS. Ke depan, ACS akan terus dikembangkan sehingga kelak dapat menjadi wadah badan-badan klasifikasi Asia untuk bersatu, belajar, dan meningkatkan kompetensi dan kapasitasnya.

Dalam kerangka kerjasama ACS BKI mendapatkan beberapa kali kesempatan technical training dari NK Jepang yang diselenggarakan di BKI. Begitu juga dengan KR yang tidak ketinggalan pula ikut berpartisipasi mendukung BKI dengan kembali menyelenggarakan seminar teknik dengan mengundang para pemangku kepentingan bidang maritim di Indonesia. Keberhasilan ini tentunya tidak terlepas dari dukungan asosiasi terkait seperti INSA, GAPASDAP, dan IPERINDO yang secara konsisten memberikan aspirasi positif dan suasana kondusif untuk mendorong kemajuan BKI.

Selain dari para pemangku kepentingan bidang maritim, BKI juga mendapatkan dukungan dari BP Migas. Dukungan itu disuarakan dalam berbagai kesempatan terutama dalam acara-acara forum perkapalan Migas. Upaya ini tidak terlepas dari keinginan BP Migas agar pada waktunya nanti BKI siap berperan aktif jika penerapan azas cabotage bagi kapal-kapal yang beroperasi di daerah operasi Migas diberlakukan secara penuh pada tahun 2011 nanti.

existence of additional classed ship so the number of classed ships increased from 6276 units in 2009 to be 6400 units, with a total tonnage 9.594.091 GT.

The result is came from the confidence of stakeholders, insurance, the ship owner and operator, as well as administration were greeted with BKI professionals and the dedication of all employee and staff in Headquarter and branches office. Trust should be kept as a most important base in building a reputation as a classification. BKI Management and all staff always seeks to maintain that trust by consistently maintaining and improving the quality of the work and services, improve the competence and capability of Human Resources, as well as improve the operational efficiency and effectiveness through the implementation of information technology-based systems

There are some important notes to get noticed that marked the BKI progress and steps during 2010. At the beginning of the year , BKI role in Asian Classification Societies Executive forum (ACS) Meeting and established international existence. BKI became a host organization of the Extraordinary ACS Meeting officially declared in a meeting on February 1, 2010 in Bali which was a milestone of ACS. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) together with Nippon Kaiji Kyokai (NK) Japan, Korean Register of Shipping (KR) South Korea, China Classification Society (CCS) China, Indian Register of Shipping (IRS) India, and Viet Nam Register (VR) Vietnam was recorded officially as the founder of ACS. Forward, ACS will continue to be developed and in the future can be a association of Asian classification to come together, learn, and improve the competence and capacity

Within the ACS cooperation framework, BKI get several chances for technical training from NK Japan which held in BKI. KR also participated in support to BKI by hosting a technical seminar with attended by maritime stakeholders in Indonesia. The success of this course supported by related association like INSA, GAPASDAP, and IPERINDO which consistently give positive aspirations and conducive atmosphere to encouraging BKI progress.

Beside from the maritime stakeholders, BKI also had the support from BP Migas. Support was voiced in various occasions, especially in the Migas shipping forum. This effort is came from the desire of the BP Migas to see BKI ready to play an active role if the application of ships operating cabotage in Migas area entered into forced in 2011.

Dalam bidang pengembangan organisasi dan SDM, BKI terus melakukan penyempurnaan sistem operasi berbasis Teknologi Informasi yang mengintegrasikan Classification Operation System (CopS), Financial Operation System (FinOpS), dan Consultancy & Supervision Operation System (CSOpS) ke dalam sistem on line yang terpadu untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas mekanisme input, proses, dan output sekaligus meningkatkan aspek monitoring serta ketepatan dan kecepatan pelaporan. Program pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM dilakukan antara lain melalui penyelenggaraan in-house training, refreshing dan up grading course terpadu bagi para Surveyor dan Inspector bidang Statutoria, serta mengirimkan kader-kader BKI untuk tugas belajar mengambil program pasca sarjana di ITS, tugas belajar ke Maritime University di Malmö, Swedia, dan Kyoto University Jepang, untuk mengambil program doctoral.

Kondisi sosial dan perekonomian nasional selama 2010 yang relatif stabil dan kondusif menjadikan BKI mampu mempertahankan kinerja usahanya. Realisasi pendapatan kotor meningkat dari Rp 236,6 milyar pada tahun 2009 menjadi Rp 282 milyar. Jumlah itu berasal dari kontribusi bidang usaha klasifikasi sebesar Rp 180,5 milyar atau naik 20,3 persen dan bidang usaha Konsultasi dan Supervisi sebesar Rp 101,5 milyar atau naik 17,2 persen. Sementara untuk realisasi laba setelah pajak mencapai Rp 37,1 milyar atau di atas tahun sebelumnya yang berjumlah Rp 25,6 milyar.

Berdasarkan standard penilaian Kementerian BUMN dan hasil audit Kantor Akuntan Publik, BKI kembali dapat mempertahankan tingkat kinerja manajemen "Sehat AAA". Keberhasilan ini tidak terlepas dari angka Net Return on Equity (Net ROE) yang mencapai 37,81% dan Return on Asset (ROA) yang mencapai 29,00%. Bila dibandingkan suku bunga bank yang berlaku pada akhir 2010 sebesar 8 – 10 persen per tahun, angka-angka ini menunjukkan kinerja manajemen dalam memaksimalkan keuntungan untuk pemegang saham atau terhadap total asset secara umum cukup baik.

Satu catatan penting bagi BKI di akhir tahun 2010 adalah tanggal 8 Desember 2010 telah dilakukan pelantikan Direksi baru oleh Deputy Menteri Negara BUMN Bidang Usaha Jasa serta perubahan nomenklatur jabatan Direksi. Susunan Direksi baru BKI tersebut adalah: Purnama S.M. sebagai Direktur Utama menggantikan Muchtar Ali, Edy Cahyono sebagai Direktur Keuangan dan Personalia menggantikan Donny S. Purba, Ajatiman sebagai Direktur Teknik dan Pengembangan (nomenklatur jabatan sebelumnya Direktur Teknik) menggantikan Haryanto, dan Setudju Dangken sebagai Direktur Operasi dan Pemasaran (nomenklatur jabatan sebelumnya Direktur Usaha) menggantikan R. Wibisono.

Melihat apa yang berhasil kita raih, sudah sepantasnya kita bersyukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, kasih-sayang, petunjuk, lindungan, dan ridho-Nya sehingga BKI dapat merealisasikan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 2010 dengan hasil yang baik.

In the organization development and Human Resources, BKI continue to improve to the information technology-based operating system that combine Classification Operation System (CopS), Financial Operation System (FinOpS), and Consultancy & Supervision Operation System (CSOpS) into an on line integrated system to increase the efficiency and effectiveness of the input, processes, and output mechanism while enhancing monitoring aspects as well as the reporting accuracy and speed. Training programs and increasing competence of Human Resources is done among others through the implementation of integrated in-house training, refreshing and up grading course for the Statutory Surveyor and Inspector, as well as sending BKI staff for postgraduate program to ITS, World Maritime University in Malmö, Sweden, and Kyoto University Japan, for doctoral program

Social conditions and the national economy during 2010 are relatively stable and conducive to make BKI's performance was able to maintain. Realization of gross income increased from 236,6 billion IDR in 2009 to 282 billion IDR. That amount comes from the classification business with 180,5 billion IDR or increased 20.3 percent and consultancy and supervision business with 101.5 billion IDR or increased 4.37 percent. While for the realisation of profit after tax reached 37,1 billion IDR or more than the previous year, which amounted to 25.6 billion IDR

Based on the standard assessment in the State Owned Enterprises and public accounting audit results, BKI was maintain the performance management level "Sehat AAA". This success is came from the Return on Equity (Net ROE) which reached 37,81% and Return on Asset (ROA) which reached 29.00%. Compare to bank interest rates at the end of 2010 for 8-10 per cent per year, these numbers show the management performance in maximizing profits for shareholders or asset is generally quite good.

One important note for BKI in late 2010 is the inauguration of the new Board of Directors has been made by the Deputy Minister of State Owned Enterprises date December 8, 2010 as well as changes to the Board of Directors nomenclature. New BKI directors are: Purnama S.M. as President Director substitute Muchtar Ali, Edy Cahyono as Finance and Personnel Director substitute Donny S. Purba, Ajatiman as Technical and Development Director (the previous nomenclature is Technical Director) substitute Haryanto, and Setudju Dangken as Operations and Marketing Director (the previous nomenclature is Business Director) substitute Wibisono.

See what we reached, we should thanks to the God for all grace, compassion and refuge where BKI can realize the 2010 work plan and company budget with good results.

Mewakili Direksi dan segenap jajaran BKI kami ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Menteri Negara BUMN c.q. Deputy Bidang Usaha Jasa beserta jajarannya serta kepada Menteri Perhubungan c.q. Dirjen Perhubungan Laut beserta jajarannya atas segala bantuan, dukungan, dan arahan yang diberikan.

Penghargaan dan terima kasih kami sampaikan pula kepada Dewan Komisaris yang telah memberikan masukan, arahan, dan koreksi serta peranannya sebagai mitra kerja yang konstruktif sehingga Perusahaan dapat merealisasikan program kerjanya dan memberikan kontribusi positif kepada bangsa dan negara.

Kepada seluruh karyawan dan karyawan BKI baik di Kantor Pusat maupun Kantor Cabang, Direksi menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas segala sumbangsih, dedikasi, dan produktivitas yang telah diberikan dalam ikut mensukseskan realisasi program kerja Perusahaan di tahun 2010.

Kami juga ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada para pemangku kepentingan atas segala kepercayaan, dukungan, bantuan, dan partisipasinya dalam ikut memberdayakan dan memajukan BKI.

Sebagai penutup, kami selaku penerus dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Direksi BKI periode 2005-2011 yang telah memberikan dedikasi terbaiknya sehingga BKI maju dan berkembang serta dari tahun ke tahun dapat terus mencatat kinerja yang positif. Mudah-mudahan kami dapat melanjutkan hal-hal baik yang diwariskan para pendahulu dan dapat pula mengukir kinerja dan prestasi yang lebih baik.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi niat baik dan usaha kita.

On behalf of Board of Directors and all staff , we want to give appreciation and thanks to State Owned Enterprises Ministry c.q. Deputy Minister of State Business Services along with staff and to the Transportation Ministry c.q. Sea Communication Transportation along with staff for all the help, support, and referrals provided.

Awards and our thanks also to pass on the Board of Commissioners who have given input, direction, and corrections as well as its role as a constructive partner so that companies can realize work programs and contribute positively to the nation and the state.

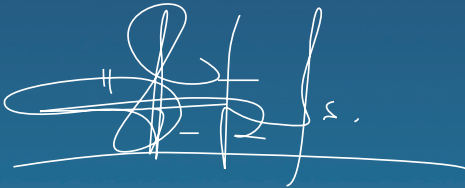
To all BKI employees either at Headquarters or branch offices, directors conveying thanks and appreciation for all contributions, dedication, and productivity that has been granted in part to make the realization of the company's work program in 2010.

We also wanted to say thanks and appreciation to stakeholders for any trust, support, help, and participation in join empower and advance the BKI.

In closing, we are as successor with all humility to say thanks and appreciation to the BKI Board of Directors period 2005-2011 which has given dedication of his best to BKI for development and continue the positive performance from year to year. Hopefully we can continue the good things that inherited its predecessor and carve out better performance and accomplishments.

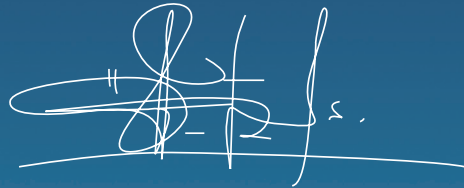
May God always bless our efforts and good intentions

Direktur Utama



Purnama S.M.

President Director



Purnama S.M.

Profil Dewan Direksi

Board of Directors Profile



Purnama Sembiring Meliala



Purnama Sembiring Meliala, usia 55 tahun menjabat sebagai Direktur Utama PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) sejak tanggal 08 Desember 2010. Beliau meniti karirnya sebagai Master Marine di PT. Samudera Indonesia Tbk dan kemudian sebagai karyawan di Departemen Perhubungan pada 2007-2009, sebagai Kepala Sub Direktorat Pemanduan & Penundaan Kapal dan pada 2009-2010 menjabat sebagai Administrator Pelabuhan Teluk Bayur, Padang. Beliau meraih gelar Sarjana dibidang Nautika di Lembaga Pendidikan Tinggi Maritim Jakarta dan pada 1997 beliau mendapat Gelar Master Manajemen di bidang Pemasaran pada Institut Pengembangan Kewirausahaan Indonesia

Purnama Sembiring Meliala, age of 55 years old, served as President Director of PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) from the date of December 8, 2010. He started his carrerr as a Master Mariner at PT. Samudera Indonesia Tbk and later as an employee in the Ministry of Transportation from the year of 2007 up to 2009 as a The Head of Sub Directorate of Scouting & Pilot Ships and from the year of 2009 up to 2010 served as a The Head of Port Administration of Teluk Bayur, Padang. He earned Bachelor degree in nautical science at the Maritime Institute of Jakarta and obtained a Master Degree in Marketing Management at Enterpreneurship Development Institute of Indonesia (1997).

Edy Cahyono



Edy Cahyono, usia 42 tahun menjabat sebagai Direktur Keuangan & Personalia PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) sejak tanggal 08 Desember 2010. Beliau memulai karirnya sebagai Junior Geologi di PT. Kaltim Prima Coal (1994-1995) dan kemudian sebagai pegawai di Direktorat Jenderal BUMN Departemen Keuangan. Pada tahun 2008-2010, posisi beliau sebagai Kepala Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi Usaha Perbankan dan Jasa Keuangan, Kementerian BUMN. Beliau meraih gelar Sarjana Teknik Geologi dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta dan Magister Manajemen Ilmiah dari Universitas Indonesia.

Edy Cahyono, age of 42 years old, served as The Director of Finance & Personnel of PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) from the date of December 8, 2010. He started his career as a Junior Geologist at PT. Kaltim Prima Coal (1994-1995) and then as an employee at the Directorate General of State-owned Enterprises, Ministry of Finance in 2008-2010, his position as The Head of Business Restructuring and Privatization of Banking and Financial Services, the Ministry of State-owned Enterprises. He earned a Bachelor of Engineering Geology from Gajah Mada University, Yogyakarta and a Master degree in Management Science from the University of Indonesia

Ajatiman



Ajatiman, usia 57 tahun menjabat sebagai Direktur Teknik & Pengembangan PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) sejak tanggal 08 Desember 2010. Beliau memulai karirnya di BKI sejak tahun 1980 dan pernah menduduki jabatan diberbagai posisi termasuk Kepala Cabang Cirebon (1984-1987), Kepala Seksi Klasifikasi dan Sertifikasi, Divisi Survey (1991-1993), Kepala Seksi Pelaporan dan Sertifikasi, Divisi Survey (1993-1997), Kepala Divisi Survey (1997-2000), Kepala Satuan Perencanaan (2000-2003), Kepala Unit Konsultansi dan Supervisi (2007-2010). Beliau meraih gelar Sarjana Teknik Perkapalan dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya

Ajatiman, age of 57 years old, served as The Director of Technical & Development of PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) from the date of December 8, 2010. He started his career at BKI since 1980 and has served in various positions including Cirebon Branch Manager (1984-1987), Head of Classification and Certification Section, Survey Division (1991-1993), Head of Reporting and Certification Section, Survey Division (1993-1997), Head of Survey Division (1997-2000), Head of Planning Department (2000-2003), Head of Consultancy and Supervision Unit (2007-2010). He obtained a Bachelor of Naval Architecture Department from Sepuluh Nopember Institute of Technology, Surabaya

Setudju Dangkening



Setudju Dangkening, usia 56 tahun menjabat sebagai Direktur Teknik & Pengembangan PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) sejak tanggal 08 Desember 2010. Beliau memulai karirnya di BKI sejak tahun 1986 dan pernah menduduki jabatan diberbagai posisi termasuk Kepala Cabang Bitung (1996-2002), Wakil Kepala Cabang Utama Balikpapan (2002-2003), Kepala Cabang Madya Singapore (2003-2008), Kepala Cabang Utama Batam (2008-2010). Beliau meraih gelar Sarjana Mesin Universitas Hasanuddin, Makassar dan Gelar Sarjana Ekonomi di Manado, Sulawesi Utara.

Setudju Dangkening, age of 56 years, served as The Director of Operations & Marketing of PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) from the date of December 8, 2010. He has started his career at BKI since 1986 and served in various positions including Bitung Branch Manager (1996-2002), Deputy Head of Balikpapan Main Branch office (2002-2003), Head of Singapore Branch Office (2003-2008), Head of Batam Main Branch Office (2008-2010). He obtained a Bachelor Degree of Mechanical Engineering, University of Hasanuddin, Makassar and Bachelor Degree of Economics Faculty, at Manado, North Sulawesi.

Aktifitas Manajemen Management Activity

Pendeklarasian ACS

Biro Klasifikasi Indonesia menjadi tuan rumah dan penyelenggara Pertemuan Luar Biasa forum Asian Classification Societies Executives Meeting (ACS). Dalam acara yang diadakan tanggal 1 – 2 February 2010 di Bali itu badan-badan klasifikasi anggota forum ACS sepakat untuk mendeklarasikan berdirinya organisasi badan klasifikasi Asia yang diberi nama Asian Classification Society (ACS). Pendirian ACS ini ditandai dengan penandatanganan Piagam ACS yang dilakukan oleh pimpinan tertinggi Nippon Kaiji Kyokai (NK), China Classification Society (CCS), Korean Register (KR), Indian Register of Shipping (IRS), Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) dan Vietnam Register (VR).



ACS mempunyai misi untuk mempromosikan aspek keselamatan kapal di laut dan perlindungan lingkungan maritim serta meningkatkan peranan anggotanya di kawasan Asia sekaligus meningkatkan pengaruh Asia di percaturan industri maritim dunia melalui kerjasama dan akumulasi keunggulan pengetahuan dan keahlian teknik masing-masing anggotanya.

Pendeklarasian Asian Classification Society (ACS) dan partisipasi BKI dalam forum ini memiliki nilai yang sangat strategis karena merupakan salah satu wujud pengakuan dan penerimaan masyarakat klasifikasi internasional terhadap BKI. Berkaitan dengan hal tersebut Manajemen BKI secara aktif mensosialisasikan hal ini untuk menjelaskan kepada publik khususnya para pemangku kepentingan tentang pendirian ACS ini dan nilai tambah yang diberikannya.

Declare ACS

BKI as a host and organizer of the Extraordinary Meeting of the Asian forum Classification Societies Executives Meeting (ACS). In the event, held on February 1-2, 2010 in Bali where classification bodies ACS forum members agreed to declare the establishment of the Asian classification entity that was named Asian Classification Society (ACS). Establishment of the ACS was marked by the signing the Charter of the ACS conducted by Chairman of Nippon Kaiji Kyokai (NK), China Classification Society (CCS), Korean Register (KR), Indian Register of Shipping (IRS), Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) and Vietnam Register (VR).



ACS has a mission to promote the safety aspects of ships at sea and maritime environment protection and increase the role of members in Asia and the influence of Asia in the constellation of world maritime industry through cooperation and knowledge accumulated advantages and technical expertise of each members.

The declaration of ACS and BKI participation in this forum has a strategic value because it is one of the forum of recognition and acceptance of international classification society to BKI. Related to that BKI Management is actively disseminating it to explain to the public, especially the stakeholders regarding the establishment of this ACS and added-value provides.

Implementasi GCG

Dalam rangka implementasi prinsip-prinsip Good Corporate Governance, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Transparansi, Keadilan, dan Independensi manajemen BKI secara berkala mengadakan rapat baik internal Direksi, dengan staf terkait, management review, maupun dengan Dewan Komisaris untuk membahas berbagai hal dan kebijakan yang terkait dengan operasional maupun pengembangan Perseroan.



GCG Implementation

In order to implement the principles of Good Corporate Governance, Accountability, Responsibility, Transparency, Fairness, and Independence, BKI management regularly meets among The internal Board of Directors, with relevant staff, management reviews, as well as the Board of Commissioners to discuss various issues and policies associated related to the operation or development of the Company.



Peningkatan Pelayanan

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan pelayanan kepada para pemakai jasa dan meraih pangsa pasar yang lebih luas di bidang Konsultansi & Supervisi, Direksi BKI dalam bulan Maret 2010 meresmikan peningkatan status Perwakilan Pekanbaru menjadi Cabang Pekanbaru.



Service Improvement

As a part of efforts to improve services to customers and achieve massive market share in Consultancy & Supervision field, The BKI Directors in March 2010 inaugurated the improved-status of Pekanbaru Representative Office to be Pekanbaru Branch Office.



Sinergi Antar BUMN

Setelah sebelumnya menandatangani Nota Kesepahaman dengan Pelindo I, III, dan IV, dalam bulan April 2010 BKI Direktur Utama BKI bersama dengan Direktur Utama 10 BUMN lainnya menandatangani Nota Kesepahaman pengembangan sinergi antar BUMN dengan Pelindo II disaksikan oleh Menteri Negara BUMN.



Synergy Among The State-Owned Enterprises

Having previously signed a Memorandum of Understanding with the Pelindo I, III, and IV, in April 2010, The BKI Directors, together with the 10 other SOEs Directors, signed a Memorandum of Understanding with the development of synergies among SOEs witnessed by Minister of State-Owned Enterprises.



Pertemuan dan Kerjasama dengan Class Partner

Hubungan baik dan kerjasama dengan Class Partner anggota International Association of Classification Societies (IACS) terus dijaga dan dikembangkan. Karena itu dalam beberapa kesempatan Manajemen BKI mengadakan pertemuan dengan para pejabat Class Partner baik yang berasal dari kantor pusatnya maupun perwakilannya di Indonesia. Selama kurun 2010 ini tercatat Manajemen BKI beberapa kali mengadakan pertemuan dengan pimpinan badan-badan klasifikasi ABS, NK, CCS, KR, IRS, dan VR dalam rangka membahas kerjasama yang dapat dikembangkan baik untuk penanganan pekerjaan, proyek, maupun pendidikan dan pengembangan SDM.



Meetings and Cooperation with Class Partners

Good relations and cooperation with Class Partners, members of the International Association of Classification Societies (IACS) keep on being maintained and developed. Therefore, on several occasions, The BKI Management held a meeting with the Partner Class officials whether from its headquarter or its representative offices in Indonesia. During the period of 2010 was noted several times The BKI Management held a meeting with leaders of the ABS, NK, CCS, KR, IRS, and VR in order to discuss cooperation among them in developing in handling the works, projects, educations and human resources development.



Workshop AFS

BKI menaruh perhatian besar terhadap isu dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh moda transportasi laut seperti pencemaran udara dan lingkungan laut. Karena itu BKI secara aktif berperan mendukung penyelenggaraan acara Workshop Internasional Anti Fouling System (AFS) dalam bulan Mei di Jakarta yang diprakarsai oleh Ditjen Perhubungan Laut dan IMO.



AFS Workshop

BKI pay great attention to the issue of environmental impacts caused by sea transportation modes such as air pollution and the marine environment. Therefore BKI actively participate in supporting the implementation of the International Workshop on Anti-fouling System (AFS), in May taken places in Jakarta, which was initiated by the Directorate General of Sea Transportation and IMO.



Rapat Evaluasi Kinerja

Manajemen BKI secara berkala mengadakan rapat evaluasi realisasi kinerja usaha dan keuangan Perusahaan dalam mencapai target yang dibebankan dalam RKAP. Rapat Evaluasi Kinerja biasa diadakan pada akhir Semester I tahun anggaran sementara rapat-rapat staf diadakan sesuai kebutuhan. Melalui kegiatan rapat evaluasi secara berkala ini Manajemen berupaya mendapatkan masukan dari para kepala unit produksi dan unit kerja terkait yang untuk mengambil langkah-langkah kebijakan maupun penyesuaian strategi yang diperlukan dalam menghadapi dinamika dan persaingan usaha.



Performance Evaluation Meeting

The BKI Management meets regularly evaluate the realization of business and financial performance of the Company in achieving the targets of Annual Budget. Performance Evaluation Meetings usually held at the end of the first semester of the fiscal year while the staff meetings held as needed. Through regular evaluation meetings, management is trying to get input from the production and working units to take necessary policy measurement and strategic adjustments in the face of dynamic and competitive business.



Pelimpahan Wewenang Statutoria

Dalam tahun 2010 ini BKI juga mencatat kemajuan di bidang pelimpahan wewenang statutoria dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman antara BKI dengan Pemerintah Mongolia yang dilakukan di Singapura. Dengan penandatanganan ini berarti menambah jumlah pengakuan dari flag state administration internasional. Mongolia memberikan penugasan pemeriksaan dan penerbitan sertifikat untuk kapal-kapal berbenderanya.

Statutory Authorization

In the year of 2010, BKI also noted progress in the statutory authority delegation by signing a Memorandum of Understanding between the Government of Mongolia and BKI where conducted in Singapore. By signing this MOU means increasing the number of recognition from the international administration state flag. Mongolia gives authorization to examine and issue the certificates for its flag vessel.



Raker dan TOMSI

Dalam rangka mengevaluasi realisasi RKAP 2010 sekaligus menetapkan strategi dan kebijakan untuk penyusunan RKAP 2011, Manajemen BKI menyelenggarakan acara Rapat Kerja dan Technical and Operational Meeting Surveyor-Inspector (TOMSI) BKI di Batam. Selain membahas berbagai aspek yang terkait dengan kinerja usaha dan keuangan acara ini juga membahas berbagai permasalahan teknis yang penting bagi kelancaran operasional dan pelayanan bidang Klas maupun Konsultansi dan Supervisi.

Raker and TOMSI

In order to evaluate the realization of the Annual Budget 2010 and set strategies and policies for the preparation of the Annual Budget 2011, The BKI Management held a BKI Management Meeting and the Technical and Operational Meeting for Surveyors & Inspectors (TOMSI) in Batam. This event is aimed to discuss various aspects related to business and financial performance as well as various technical issues for smoothing operations and services in Class and Consultancy & Supervision field.



Kunjungan Promindo

Peranan dan kontribusi yang diberikan BKI selama ini mendapat perhatian positif dari dunia perasuransian nasional. Segera setelah dideklarasikan Proteksi Maritim Indonesia (Promindo) sebagai cikal bakal pembentukan P&I Club Indonesia melakukan kunjungan kepada Direksi BKI. Tujuan kunjungan tersebut adalah selain untuk pengenalan juga meminta dukungan BKI agar mendukung program-program Promindo khususnya pendirian P&I Club Indonesia.



Promindo Visit

The role and contributions of BKI received a positive attention from the national insurances. Proteksi Maritim Indonesia (Promindo) as the embryo formation of P & I Club Indonesia made visits to the Directors of BKI immediately after the declaration. The purpose of the visit is for introductions and required BKI to support Promindo programs in particular the establishment of P & I Club Indonesia.



Round Table Discussion

Eksistensi dan kredibilitas BKI dalam bidang keselamatan terus mendapat pengakuan dari berbagai pihak. Dalam berbagai kesempatan seperti acara Roundtable Discussion "Peningkatan Peranan Lembaga Klasifikasi Indonesia" yang diadakan oleh Badan Litbang Perhubungan Direksi BKI menerima masukan yang positif bagi kemajuan BKI dari para pemangku kepentingan.



Round Table Discussion

The BKI existence and credibility in the safety field, BKI continues to receive recognition from various parties. On various occasions such as events Roundtable Discussion "Increased Role of Indonesian Classification Society" held by the Transportation Ministry, Research Section, BKI Board of Directors receive positive feedback from the stakeholders for the improvement.



Pelantikan Direksi Baru

Salah satu momen penting bagi BKI di akhir tahun 2010 adalah pelantikan Direksi baru. Direksi periode 2005-2010 yang terdiri dari Direktur Utama Muchtar Ali, Direktur Keuangan & Personalia Donny S. Purba, Direktur Teknik Haryanto dan Direktur Usaha R. Wibisono memasuki masa purba bakti dan digantikan oleh Direksi baru yang terdiri dari Direktur Utama Purnama S.M., Direktur Keuangan & Personalia Edy Cahyono, Direktur Teknik dan Pengembangan Ajatiman, dan Direktur Operasi dan Pemasaran Setudju Dangkening.



Inauguration of New Directors

One of the important moments for the BKI in late 2010 was the inauguration of the new Directors. 2005-2011 Board of Directors which Muchtar Ali as The President Director, Donny S. Purba as The Finance & Personnel Director, Haryanto as The Technical Director and R. Wibisono as The Commercial Director replaced by new Board of Directors which Purnama S.M. as The President Director, Edy Cahyono as The Finance & Personnel Director, Ajatiman as The Technical & Development Director and Setudju Dangkening as The Operation and Marketing Director.



Kunjungan Peserta Kursus Marine Underwriter

Manajemen BKI terus membina hubungan baik dengan para mitra kerja dan pemakai jasa, diantaranya adalah dengan menerima kunjungan dan berdialog dengan para peserta Kursus Marine Underwriter Specialist yang diselenggarakan oleh Widya Dharma Arta yang mengunjungi BKI dalam bulan Desember 2010. Dalam kesempatan itu para peserta kursus secara langsung berdialog dengan Direksi BKI dan mendapatkan berbagai masukan dan pengetahuan yang berkaitan dengan tugas, peranan, dan tanggung jawab badan klasifikasi dan hubungannya dengan perasuransian.



Visit of Marine Underwriters Course participants

BKI Management continues to cultivate good relationships among business partners and customers, such as by receiving visits and dialogue with the Marine Underwriter Specialist Course participants organized by Widya Dharma Arta who visited in December 2010. On that occasion, course participants get dialogue with the BKI Directors directly and get a variety of input and knowledge related to the duties, roles, and responsibilities of classification body and relationship with insurance.





ACTIVITIES

Klasifikasi Kapal | *Ship Classification*

Persetujuan Gambar | *Drawing Approval*

Aktifitas Survey Klasifikasi | *Classification Survey Activities*

Aktivitas Jasa Industri | *Industrial Services Activities*

Survey Statutoria | *Statutory Survey*

Otorisasi Statutoria | *Statutory Authorization*

Konsultasi & Supervisi | *Consultancy & Supervision*

Klasifikasi Kapal Ship Classification

Dampak diterbitkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia No 5 tahun 2005 tentang pemberdayaan industri pelayaran nasional dan Permenhub KM. 20 tahun 2006 tentang kewajiban kapal bendera Indonesia memiliki klasifikasi dari BKI menyebabkan terjadinya peningkatan penerimaan register kapal kelas BKI, meskipun masih didominasi penerimaan kelas bangunan sudah jadi dibandingkan dengan penerimaan kelas bangunan baru.

Jumlah kapal yang diregister pada akhir Desember 2010 berjumlah 13.257 unit atau 107% lebih besar dibandingkan tahun 2009 dengan total Gross Tonnage mencapai 15.587.786 GT. Jumlah penambahan kapal yang diregister pada tahun 2010 adalah 821 unit atau 1.935.563 GT.

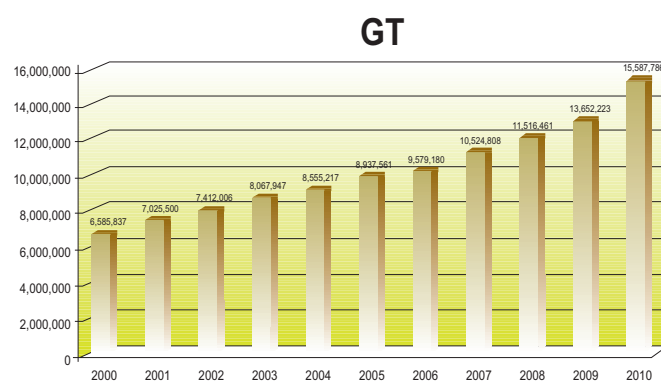
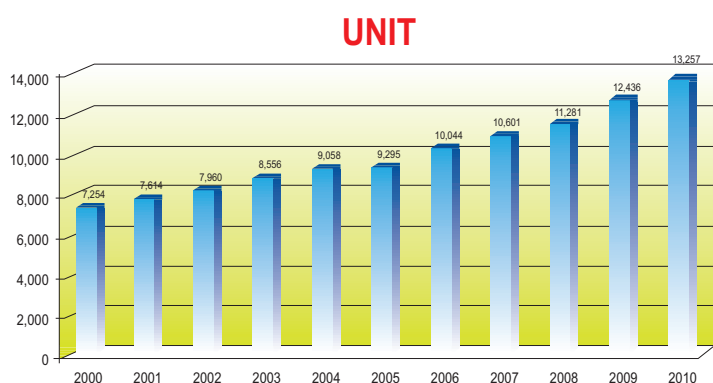
Kapal yang dicabut kelasnya sampai dengan tahun 2010 adalah 6.857 unit atau 5.993.695 GT. Pencabutan kelas ini dengan alasan tidak memenuhi persyaratan Rules & Regulation dengan mulai diterapkannya Automatic Class Suspension, pindah ke badan klasifikasi lain, tenggelam, discrapp atau permintaan dari pemilik kapal. Sehingga kapal kelas BKI dengan status klas berlaku (valid class), meningkat dari tahun 2009 yang sebesar 5.751 dengan tonase total 8.234.893 GT menjadi 6.400 unit dengan tonase total 9.594.091 GT

Impact of issuing of Directive of the President of Republic of Indonesia No 5 of 2005 regarding empowering of national shipping industry and Permenhub no. KM. 20 of 2006 regarding obligation of Indonesia flag ship has classification from BKI, increasingly the number of ships regeistered to BKI Class, even the admission of class are still dominated by existing ship than new building.

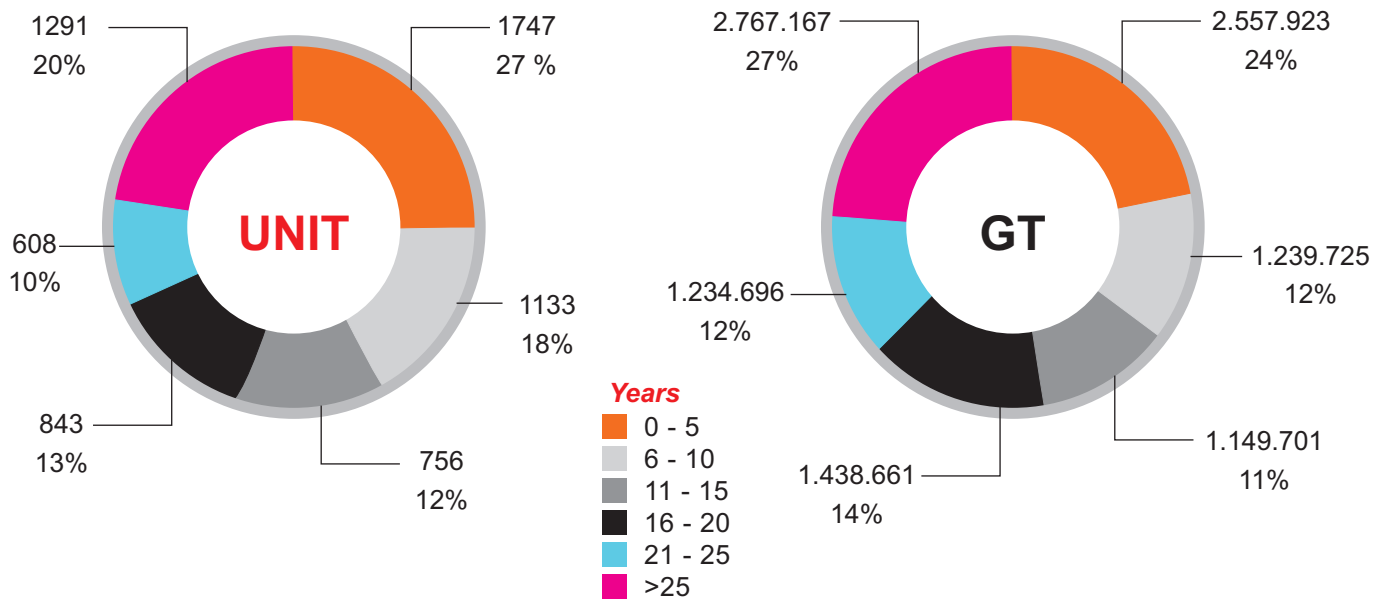
Total ships registered at the end of December 2010 are 13,257 units or 107% higher than that in 2009 at a total Gross Tonnage of 15,587,786 GT. Total addition of ships registered in 2009 are 821 units or 1,935,563 GT.

Ships of which the class is withdrawn until 2010 are 6,857 units or 5,993,695 GT. The reason of this class withdrawn are failure to fulfill Rules & Regulations as starting of implemen-tation of Automatic Class Suspension, change to another classification body, sinking, scrapping or request from ships' owners. So that, BKI class ships with the valid class status decrease from 5,751 units at a total tonnage of 8,234,893 GT in 2009 to 6,400 units in this year at a total tonnage of 9,594,091 GT.

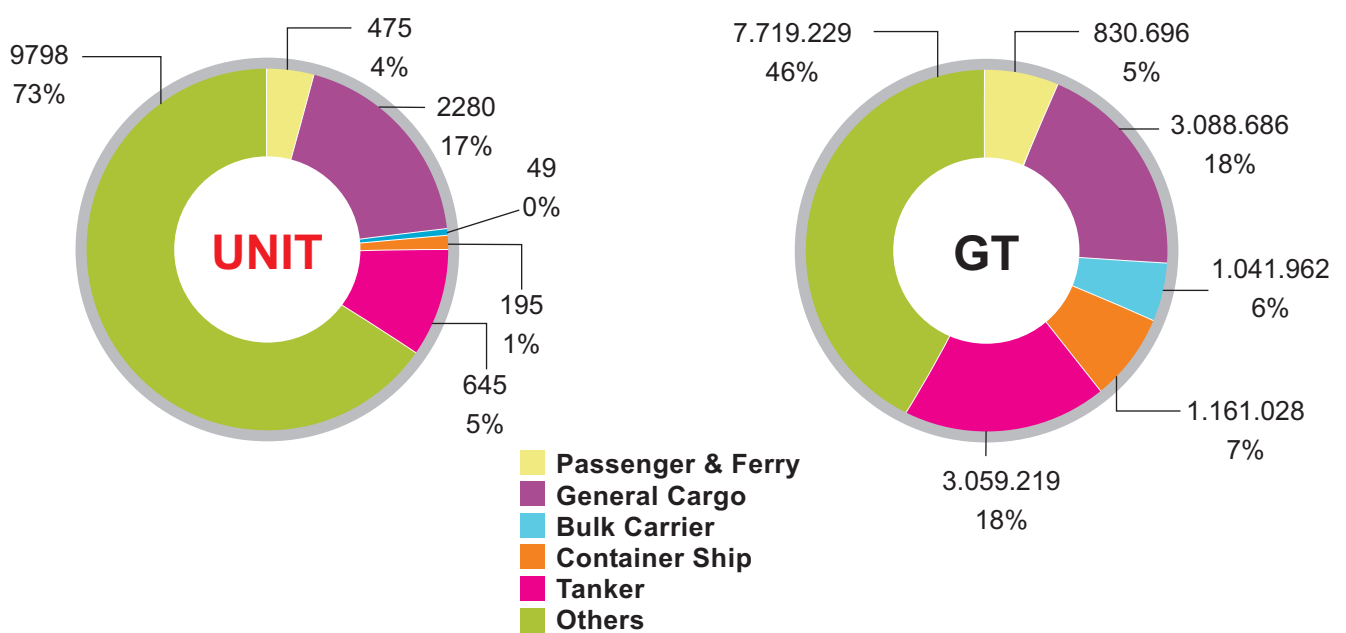
Kapal Register tahun 2000-2010 Ships Registered from 2000 to 2010



Kapal Kelas Valid sesuai umur Valid Class Ships by ship age



Rincian Tipe Kapal yang diregister Breakdown of type of ships



Daftar Penerimaan Kelas Bangunan Baru Tahun 2010:

List of Admission of New Building 2010:

Ship Name Ship Type	Dimension (M) GT (Ton)	Builder Owner
Alnilam Navigatin Ship	51.4 X 10.2 X 4.35 838	PT. Dumas Tanjung Perak Shipyard Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
Alphard Navigatin Ship	51.4 X 10.2 X 4.35 838	PT. Dumas Tanjung Perak Shipyard Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
Berkat Porodisa Ferry	40 X 10.5 X 2.8 355	PT. Daya Radar Utama Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
Bukit Masbait Ferry	40.3 X 11.6 X 3.1 504	PT. Daya Radar Utama Dinas Perhubungan Provinsi Maluku
Cakalang - II Ferry	55.5 X 13 X 3.45 693	PT. Ben Santosa Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
Gorango Ferry	45.5 X 12 X 3.2 457	PT. Adiluhung Sarana Segara Indonesia Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
Ile Boleng Ferry	55.5 X 13 X 3.45 693	PT. Ben Santosa Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
Kasuari Pasifik - IV Ferry	47.84 X 12 X 3.2 457	PT. Dumas Tanjung Perak Shipyard Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
Masirei Ferry	45.57 X 12 X 3.2 560	PT. Daya Radar Utama Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
Senangin Ferry	45.5 X 12 X 3.2 560	PT. Bayu Bahari Santosa Proyek Perhubungan Darat
Berkat - 1 Tug Boat	27 X 8.2 X 4 209	PT. Karya Teknik Utama PT. Berkat Sarana Lines
Bima - 315 Tug Boat	29 X 9.6 X 4.38 294	PT. Daya Radar Utama PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero)
Blm Jaya - II Tug Boat	27 X 8.2 X 4 207	PT. Karya Teknik Utama PT. Bahtera Lautan Mandiri
Buana Advance Tug Boat	23.5 X 7.32 X 3.2 158	PT. Nongsa Jaya Buana PT. Buana Transperindo Wahana Internasional
Buana Bravo Tug Boat	23.5 X 7.32 X 3.2 158	PT. Nongsa Jaya Buana PT. Buana Transperindo Wahana Internasional
Buana Hercules Tug Boat	23.5 X 7.32 X 3.2 158	PT. Nongsa Jaya Buana PT. Buana Transperindo Wahana Internasional
Buana Glory Tug Boat	19 X 5.8 X 2.96 95	PT. Nongsa Jaya Buana PT. Nongsa Jaya Buana
Buana Superior Tug Boat	23.5 X 7.32 X 3.2 158	PT. Nongsa Jaya Buana PT. Buana Transperindo Wahana Internasional

Ship Name Ship Type	Dimension (M) GT (Ton)	Builder Owner
Buana Victory Tug Boat	19 X 5.8 X 2.96 95	PT. Nongsa Jaya Buana PT. Nongsa Jaya Buana
Buma Permata Tug Boat	28.05 X 8.6 X 4.3 251	PT. Karya Teknik Utama PT. Surya Bahau Mandiri
Buma Sejati Tug Boat	28.05 X 8.6 X 4.3 253	PT. Karya Teknik Utama PT. Surya Bahau Mandiri
Ersihan Regal Tug Boat	28.05 X 8.6 X 4.3 251	PT. Karya Teknik Utama PT. Ersihan Satya Pratama
Jhoni - III Tug Boat	27 X 8.2 X 4 220	PT. Karya Teknik Utama PT. Jhonlin Marine Trans
Jhoni - VII Tug Boat	29 X 8 X 3.7 214	PT. Galangan Mercusuar PT. Jhonlin Marine Trans
Jhoni - VIII Tug Boat	27 X 8.2 X 4 209	PT. Karya Teknik Utama PT. Jhonlin Marine Trans
Jhoni - X Tug Boat	27 X 8.2 X 4 220	PT. Karya Teknik Utama PT. Jhonlin Marine Trans
Jhoni - XIII Tug Boat	27 X 8.2 X 4 209	PT. Karya Teknik Utama PT. Jhonlin Marine Trans
Jhoni - XIV Tug Boat	27 X 8.2 X 4 209	PT. Karya Teknik Utama PT. Jhonlin Marine Trans
Jhoni - XV Tug Boat	27 X 8.2 X 4 227	PT. Karya Teknik Utama PT. Jhonlin Marine Trans
Jhoni - XVI Tug Boat	29 X 8 X 3.7 214	PT. Galangan Mercusuar PT. Jhonlin Marine Trans
Jhoni - XVII Tug Boat	29 X 8 X 3.7 222	PT. Galangan Mercusuar PT. Jhonlin Marine Trans
Johan Jaya - 117 Tug Boat	29 X 8 X 3.7 216	PT. Galangan Mercusuar PT. Pelayaran Kapuas Jaya Samudera
Johan Jaya - 118 Tug Boat	29 X 8 X 3.7 216	PT. Galangan Mercusuar PT. Pelayaran Kapuas Jaya Samudera
Kasih Power - 05 Tug Boat	27 X 8.2 X 4 226	PT. Karya Teknik Utama PT. Pann (Persero)
Kasih Power 2000 - 1 Tug Boat	27 X 8.2 X 4 227	PT. Karya Teknik Utama PT. Kasih Lintas Nusantara
Kietrans - 1 Tug Boat	29 X 8 X 3.7 214	PT. Galangan Mercusuar PT. Pelayaran Nasional Kietrans Star Marine
Kts - Xii Tug Boat	22.7 X 6.5 X 3 100	Puskopelra PT. Pelayaran Karyatama Sriwijaya
Leopard Tug Boat	23.5 X 7.32 X 3.2 146	PT. Wayata Kencana Dockyard Limited PT. Central Shipping

Ship Name Ship Type	Dimension (M) GT (Ton)	Builder Owner
Marina - 21 Tug Boat	29 X 8 X 3.7 214	PT. Galangan Mercusuar PT. Pelayaran Nasional Bahtera Bestari Shipping
Marina - 22 Tug Boat	29 X 8 X 3.7 222	PT. Galangan Mercusuar PT. Pelayaran Nasional Bahtera Bestari Shipping
Marina - 23 Tug Boat	29 X 8 X 3.7 222	PT. Galangan Mercusuar PT. Pelayaran Nasional Bahtera Bestari Shipping
Martha Glory Tug Boat	26 X 8 X 3.65 188	PT. Waruna Nusasentana PT. Pelayaran Multi Jaya Samudera
Max Christo - 07 Tug Boat	27 X 8.2 X 4 207	PT. Karya Teknik Utama PT. Pelayaran Buana Lestari Kalpindo
Mitra Kencana - III Tug Boat	25 X 7 X 3.6 153	PT. Sumber Samudra Makmur PT. Sumber Surya Kencana Inhu
Mitra Kencana - VIII Tug Boat	25 X 7 X 3.6 159	PT. Sumber Samudra Makmur PT. Sumber Surya Kencana Inhu
Mts - II Tug Boat	23.5 X 7.31 X 3.2 144	PT. Bandar Victory Shipyard PT. Mitra Tujuh Samudra
Oranges B Tug Boat	28 X 7.8 X 3.5 198	PT. Alima Usaha Samudera PT. Pelayaran Nasional Bintang Bugar Bugar
Oranges C Tug Boat	28 X 7.8 X 3.5 202	PT. Alima Usaha Samudera PT. Pelayaran Nasional Bintang Bugar Bugar
Prima - 8 Tug Boat	27 X 8.2 X 4 207	PT. Karya Teknik Utama PT. Maritim Prima Mandiri
Prima - 6 Tug Boat	27 X 8.2 X 4 221	PT. Karya Teknik Utama PT. Maritim Prima Mandiri
Prima - 7 Tug Boat	27 X 8.2 X 4 221	PT. Karya Teknik Utama PT. Maritim Prima Mandiri
Putra Rupert - I Tug Boat	29 X 8 X 3.7 222	PT. Galangan Mercusuar PT. Pelayaran Lestari Papua Bahari
Putra Rupert - II Tug Boat	29 X 8 X 3.7 222	PT. Galangan Mercusuar PT. Pelayaran Lestari Papua Bahari
Quito Akm - 6 Tug Boat	23.5 X 7.32 X 3.2 148	PT. Karya Teknik Utama PT. Altus Karya Mandiri
Samudra Bintang - 88 Tug Boat	21 X 6.5 X 2.75 105	PT. Alima Usaha Samudera Su Meng Liang
Sanle - 25 Tug Boat	29 X 9 X 4.25 256	PT. Alima Usaha Samudera PT. Whs Global Mandiri
Sentarum Tug Boat	27 X 8.2 X 4 224	PT. Karya Teknik Utama PT. Sentarum Lines
Tanjung - VII Tug Boat	15 X 4.5 X 2.5 37	PT. Daya Radar Utama PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero)

Ship Name Ship Type	Dimension (M) GT (Ton)	Builder Owner
Tanjung Buyut I - 206 Tug Boat	23.5 X 7 X 3.15 135	PT. Daya Radar Utama PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero)
Terus Daya - 27 Tug Boat	28 X 8.6 X 4.3 254	PT. Bandar Abadi Shipyard PT. Pelayaran Sinar Gratia Nusantara
Virgo Power - 08 Tug Boat	29 X 8 X 3.7 211	PT. Galangan Mercusuar PT. Virgo Samudera Jaya
Sumut - II Ferry	32 X 8 X 2.5 246	PT. Bayu Bahari Santosa Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
TMN - 30 P Crane Barge	60 X 22 X 5.5 2356	PT. Asl Shipyard Indonesia PT. Capitol Nusantara Indonesia
TMN - 30 S Crane Barge	60 X 22 X 5.5 2356	PT. Asl Shipyard Indonesia PT. Capitol Nusantara Indonesia
Bahari Jaya Utama Self Propelled Work Barge	22 X 10 X 3 219	PT. Caputra Mitra Sejati PT. Segara Laju Perkasa
Prince Capricorn - IV Oil Barge	78 X 22 X 5.3 2323	PT. Jasindo Jaya Pacific PT. Jasindo Jaya Pacific
USJ - I Oil Barge	78 X 22 X 5.3 2294	PT. Usda Seroja Jaya PT. Usda Seroja Jaya
USJ - II Oil Barge	78 X 22 X 5.3 2323	PT. Usda Seroja Jaya PT. Usda Seroja Jaya
USJ - III Oil Barge	78 X 22 X 5.3 2323	PT. Usda Seroja Jaya PT. Usda Seroja Jaya
Kanaya Prima - 99 Self Propelled Oil Barge	33 X 8.5 X 3.5 259	Galangan Paliat PT. Kanaya
Putera Pasundan Self Propelled Oil Barge	38.7 X 8 X 2.6 255	PT. Bahtera Adhiguna PT. Pasundan Jaya

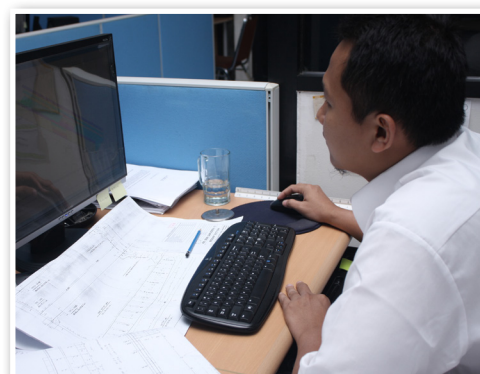
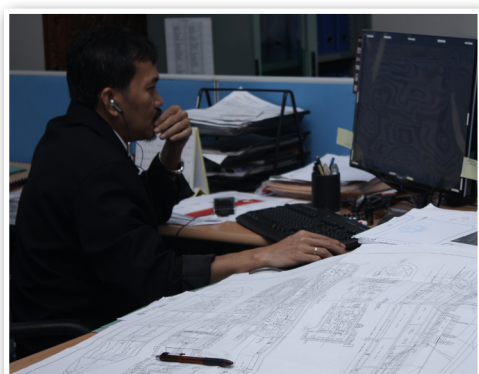
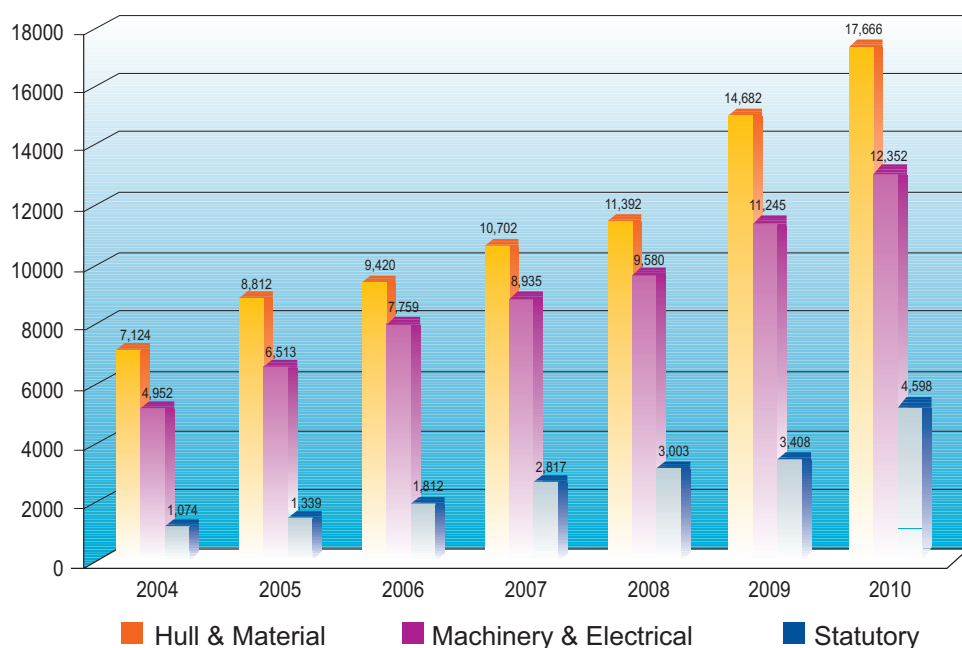


Persetujuan Gambar Drawing Approval

Pada tahun 2010, BKI menerima permintaan untuk drawing / plan approval yang terdiri dari 1.628 kontrak dan 34.616 gambar / perhitungan. Diantaranya adalah 17.666 gambar konstruksi lambung, 12.352 gambar permesinan / listrik serta 4.598 gambar / perhitungan statutoria.

In 2010, BKI received request for drawing approval consisting of 1,628 contracts and 34,616 drawings/calculations, among others 17,666 hull construction drawings, 12,352 machinery / electrical drawings as well as 4,598 statutory drawings/calculations.

Division	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Hull & Material	7.124	8.812	9.420	10.702	11.392	14.682	17.666
Machinery & Electrical	4.952	6.513	7.759	8.935	9.580	11.245	12.352
Statutory	1.074	1.339	1.812	2.817	3.003	3.408	4.598
Total	13.150	16.664	18.991	22.454	23.975	29.335	34.616



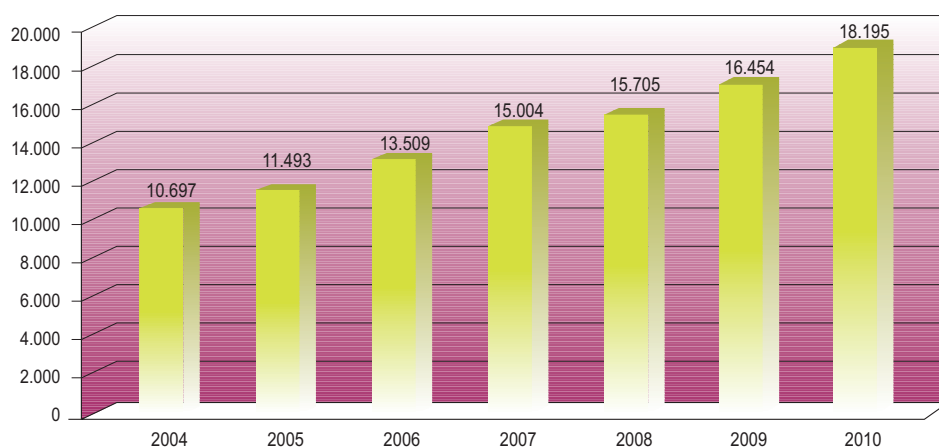
Aktifitas Survey Klasifikasi Classification Survey Activities

Dalam pelaksanaan survey di lapangan, BKI menerima 16.454 permintaan survey yang terdiri dari 954 survey dalam rangka penerimaan kelas dan 15.500 survey dalam rangka mempertahankan kelas. Perincian jenis survey yang dilakukan adalah sbb:

In implementing its field surveys, BKI receives 16,454 application for survey consisting of 954 surveys for admission to class and 15,500 surveys in for class maintaining. The break-down of kind of survey carried out, as follows:

Kind Survey	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Renewal Survey	573	649	738	921	882	878	913
Annual Survey	2.807	3.035	3.110	3.619	3.576	3.660	3.855
Intermediate Survey	494	569	538	618	579	748	766
Docking Survey	1.815	2.029	2.207	2.514	2.300	2.439	2.525
Shaft Propeller Survey	614	984	1.162	1.114	1.155	1.158	1.216
Boiler Survey	129	122	164	208	181	167	180
Automation Survey	17	17	21	25	20	17	20
Continuous Survey	258	166	335	489	354	284	231
Class Extension Survey	175	150	97	238	227	202	6.807
Condition Survey	3.328	3.316	4.342	4.227	5.484	5.824	320
New Building Admission Class Survey	86	11	126	178	258	219	430
Existing Ship Admission Class Survey	383	396	599	753	621	735	759
Re-class Survey	18	49	70	100	68	123	172
TOTAL	10.697	11.493	13.509	15.004	15.705	16.454	18.195

SURVEY



Aktifitas Jasa Industri Industrial Services Activities

Sebagai bagian dari survey klasifikasi kapal, BKI melaksanakan pengawasan pada sistem mutu dari perusahaan manufacture dan jasa yang berhubungan dengan pembangunan kapal. Pengawasan pada sistem mutu tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa produk maupun jasa yang disuplai oleh perusahaan yang terlibat dalam klasifikasi kapal memiliki konsistensi mutu sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan Rules.

Perusahaan yang telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan sebagai pembuat atau pelaksana jasa akan di periksa berdasarkan peraturan Biro Klasifikasi Indonesia dan peraturan standart mutu. Assessment dilakukan pada Sistem Manajemen Mutu, Standar Mutu, Kontrol Mutu, Rencana Mutu dan Prosedur Kerja yang dirancang oleh perusahaan pemohon. Bila dari hasil assessment dinyatakan bahwa perusahaan pemohon telah mampu untuk mempertahankan mutu secara konsisten sesuai dengan peraturan Biro Klasifikasi Indonesia maka akan diterbitkan Sertifikat Persetujuan.

Untuk mengawasi konsistensi standar mutu perusahaan yang telah mendapatkan Sertifikat Persetujuan, dilakukan pemeriksaan secara periodik pada sistem mutu dan dokumentasi catatan mutu perusahaan.

As a part of ship classification survey, BKI carried out supervision on quality system of manufacturers and service company related to ship building. Supervision on the quality system is undertaken to ensure that products and services supplied by company involved in the classification of the vessel have a consistency of quality in accordance with the specifications required by Rules.

Company that have applied to get approval as a service maker or executor will be examined under the rules of Indonesian Bureau of Classification and quality standard regulations. Assessment carried out in Quality Management System, Quality Standards, Quality Control, Quality Plans and Work Procedures designed by applicant company. When the result of the assessment stated that the applicant company has been able to maintain a consistent quality in accordance with Indonesian Bureau of Classification regulation, then Certificate of Approval will be issued.

To monitor the consistency of quality standards of company that has obtained Certificate of Approval, it will be conducted periodic checks on quality system documentation and quality record of the company.



Survey Statutoria

Statutory Survey

BKI sebagai Badan Klasifikasi telah memenuhi persyaratan teknis dan kriteria sesuai dengan IMO Resolusi A.739(18) dan A.789(19) sebagai Recognized Organization (RO) untuk ditunjuk melaksanakan survey kapal-kapal berbendera Indonesia atas nama Pemerintah Indonesia cq Ditjen Perhubungan Laut.

BKI telah memiliki jumlah safety auditor 157 yang berkualifikasi untuk melaksanakan audit ISM Code dan 79 auditor untuk melaksanakan audit ISPS Code.

BKI juga menerbitkan Register ISM Code & ISPS Code yang dipublikasikan melalui media cetak maupun akses melalui website BKI.

As a Classification Society, BKI has comply with technical requirements and criteria as a Recognized Organization (RO) according with IMO Resolution A.739(18) and A.789(19) for authorized to conduct Statutory Survey on behalf of the Government of Indonesia cq Directorate General of Sea Transportation for Indonesian flagged ships.

BKI has totaling 157 qualified auditors to conduct ISM Code audits and 79 qualified auditors to conduct ISPS Code audits.

BKI also publishes ISM Code & ISPS Code Register by printed media and accessible in the BKI's website.

	Audit Activity	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1.	ISM Code – Initial Audit	129	165	109	94	185	212
2.	ISM Code – Annual Audit	102	104	85	90	84	105
3.	ISM Code – Intermediate Audit	176	162	153	66	101	199
4.	ISM Code – Renewal Audit	35	63	193	182	183	61
5.	ISM Code – DOC issued	82	50	45	37	41	78
6.	ISM Code – SMC Issued	265	178	251	342	201	300
7.	ISPS Code – Initial Audit	38	30	34	32	107	96
8.	ISPS Code – Intermediate Audit	0	7	91	34	14	14
9.	ISPS Code – ISSC issued	78	27	41	39	90	88
10.	Load Line	-	-	-	-	6.191	6.596
11.	CAS	-	-	-	-	9	8
12.	Anti Fouling System	-	-	-	-	5	5
13.	Sewage Approval	-	-	-	-	2	2
14.	Fire Control	-	-	-	-	-	2
15.	IAPP (Marpol Annex VI)	-	-	-	-	4	1
16.	ISPP (Marpol Annex II)	-	-	-	-	4	4
17.	SMPEP (Marpol Annex II)	-	-	-	-	1	1
	TOTAL	905	786	1.002	916	7.231	7.772



Otorisasi Statutoria

Statutory Authorization

Hingga tahun 2010, otorisasi yang telah dipercayakan kepada BKI dibidang klasifikasi kapal dan statutoria adalah:

Until 2010, ship classification and statutory authorization trusted to BKI are:

- *Obligation of Indonesian flagged ships to have classification certificate from BKI.*
- *Survey Authorization to survey of loadline marks and issue loadline certificates (IPLT & PGMI) for Indonesian flagged ships.*
- *Survey Authorization and Certification for Container.*
- *Survey Authorization and Certification of Safety Construction, Marpol Annex I & II and Fitness of Chemical Carrier & Gas Carrier in Bulk for Indonesian flagged ships at a tonnage more than 500 GT.*
- *Audit Authorization and Certification of ISM Code for Indonesian flagged ships.*
- *As a Recognized Security Organization (RSO), conducting audit and certification of ISPS Code for Indonesian flagged ships.*
- *Survey Authorization and Certification of Annex VI Marpol 73/78 for Indonesian flagged ships.*
- *Survey Authorization and Certification of Condition Assessment Scheme (CAS) in accordance with Annex I Marpol 73/78 for Indonesian flagged ships.*
- *Statutory Authorization from MMA (Mongolia Maritime Administration)*

Sedangkan otorisasi yang telah dipercayakan kepada BKI dibidang minyak & gas, panas bumi, kelistrikan dan ketenaga-kerjaan adalah:

While, authorizations trusted to BKI in oil & gas and manpower sectors are:

- *Technical Inspection of Feasibility of Combined Facility Certificate from Directorate General of Oil and Gas.*
- *Technical Inspection of Crane from Directorate General of Oil and Gas.*
- *Technical Inspection of Pressure Vessel from Directorate General of Oil and Gas.*
- *Technical Inspection of Pipeline from Directorate General of Oil and Gas.*
- *Technical Inspection of Platform Construction from Directorate General of Oil and Gas.*
- *Technical Inspection of Electrical Equipment from Directorate General of Oil and Gas.*
- *Technical Inspection of Rotating Equipment from Directorate General of Oil and Gas.*
- *Technical Inspection of Storage Tank from Directorate General of Oil and Gas.*
- *Inspection and Testing of Crane from Ministry of Manpower and Transmigration.*
- *Inspection and Testing of Boiler and Pressure Vessel from Ministry of Manpower and Transmigration.*
- *Inspection and Testing of Electric Equipment from Ministry of Manpower and Transmigration.*
- *BKI Laboratory for NDT and DT of material, equipment relating to boiler and pressure vessel from Ministry of Manpower and Transmigration.*
- *Inspection and Testing of Crane, Pressure Vessel and Boiler onboard ship and at Harbour from Directorate General of Sea Transportation.*
- *Inspection of Helideck from Directorate General of Air Transportation.*
- *Sertifikat Verifikasi Tempat Uji Kompetensi Las dari Lembaga Sertifikasi Profesi Las.*
- *Lembaga Inspeksi Tipe A dari Komite Akreditasi Nasional.*
- *Laboratorium Penguji dari Komite Akreditasi Nasional.*
- *Penunjukan sebagai lembaga inspeksi teknik dalam rangka pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik dari Kementerian ESDM Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi.*
- *Penunjukan sebagai badan audit sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.*
- *Penunjukan pelaksanaan pengujian, inspeksi teknik dan sertifikasi di lingkungan proyek-proyek pertambangan mineral dan batu bara dari Kementerian ESDM - Ditjen Minerba-pabum.*
- *Penunjukan sebagai pelaksana pemeriksaan dan pengujian menara telekomunikasi di wilayah kota Pekanbaru dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru.*

Konsultansi & Supervisi

Consultancy & Supervision

Inspeksi & Sertifikasi

BKI juga memberikan jasa inspeksi dan sertifikasi terhadap industri di lingkungan minyak dan gas serta ketenagakerjaan. BKI dipercaya untuk melakukan inspeksi dan sertifikasi berbagai proyek / pekerjaan, meliputi inspeksi dan sertifikasi atas nama Ditjen Migas, meliputi SKPP Pressure Vessel, Crane, Rotating Equipment, Electrical Equipment, Pipeline, Storage Tank, SKPI.

Inspection & Certification

BKI also provides oil and gas, marine as well as manpower sector with inspection and certification services. BKI is trusted to inspect and certify in various projects, covering inspection and certification of SKPP Pressure Vessel, Crane, Rotating Equipment, Electrical Equipment, Pipeline, Storage Tank, and SKPI on behalf of Directorate General of Oil and Gas.

NO.	JENIS KEGIATAN PRODUKSI	VOLUME KEGIATAN
Sertifikasi BKI		
1	Cementing Test	4
2	Alat Angkat Angkut	42
3	Rigging/Lifting Gear	152
4	Penangkal Petir	5
5	Psv(Katup Pengaman)	24
6	Sio Crane	113
7	Inspeksi Menara Telkom	1
8	Inspeksi Peralatan Wtu	1
9	Inspeksi Tubing Casing (Pipa Bor)	1
10	Inspeksi Busket (Jaring/Metal(Logam)	4
11	Inspeksi Welding Machine (Pengelasan Machine)	3
12	Inspeksi Skid And Spreader Bar (Alat Bantu Angkat Barang)	7
13	Periodical Inspection Of Pressure Gauge/Mooring System	1
14	Supervisi Repair Tank (Tangki Timbun)	3
15	Sertifikasi Tangki Transport	10
		371



Sektor Mineral Batu Bara Panas Bumi (Minerbapabum)		
1	Rotating Equipment	2
2	Storage Tank	2
3	Pressure Safety Valve	4
4	WPS And Welder Test	1
5	SKPI	1
6	Pressure Vessel	4
7	Crane	31
8	Pipeline	2
9	Pengujian Peralatan Rigging/Lifting Device	2
		49
Sektor Migas		
1	SKPI	50
2	Pressure Vessel	17
3	Crane	97
4	Pipeline	1
5	Rotating Equipment	15
6	Electrical Equipment	18
7	Storage Tank	4
8	Pressure Safety Valve	5
9	Wps Dan Welder Test	1
10	SIMOM (Surat Ijin Memasuki Operasi Migas)	3
		211
Sektor Depnakertrans		
1	NDT	1
2	Pressure Vessel Dan Boiler	11
3	Alat Angkat Angkut	77
4	Pipeline	1
5	Rotating Equipment	2
6	Electrical Equipment	6
7	Storage Tank	1
8	Pressure Safety Valve	2
9	NDT	3
		104
Sektor Perhubungan		
1	Alat Angkat Angkut (SKB)	32



Pengujian & Laboratorium

Di bidang pengujian BKI telah melaksanakan Destructive Test (DT) dan Non Destructive Test (NDT) dengan kegiatan, meliputi Radiography, Ultrasonic Test, Magnetic Particle Inspection, Dye Penetrant, Uji Tarik dan Uji Takik.

Testing & Laboratory

In case of testing, BKI has implemented Destructive Test (DT) and Non Destructive Test (NDT) by Radiography, Ultrasonic Test, Magnetic Particle Inspection, Dye Penetrant Test, Pull Test and Notch Test.

	Pengujian & Laboratorium	Volume Kegiatan
1	Wire Rope Test	7
2	Gas Free Test	2
3	Vibration Sound Test	3
4	Crack Depth Test	1
5	Dye Penetrant Test	167
6	Magnetic Particle Test	139
7	Ultrasonic Test	907
8	Radiography Test	351
9	Tensile Test	20
10	Bend Test	3
11	Hardness Test	10
12	Macro Test	1
13	Impact Test	606
14	Chemical Composition Analysist	5
15	NDT (MPI)	338
16	NDT (DPT)	47
17	Load Test	159
18	Hydrotest	52
19	Merger Test	195
		3013

Rekayasa Teknik

Untuk kegiatan rekayasa teknik, BKI melakukan perhitungan teknik dan desain apraisal. Proyek yang ditangani adalah:

Engineering Design

In case of engineering design, BKI conduct technical calculation and design appraisal.

	Rekayasa Teknik	Volume Kegiatan
1	Design Appraisal And Supervision Mooring System	1
2	Ship Design	5



Inspeksi & Supervisi Maritim

Untuk kegiatan inspeksi dan supervisi marine, BKI telah menangani Survey Kondisi (pemeriksaan propeler, inventarisasi sistem perawatan kapal, evaluasi hasil pekerjaan perbaikan kapal), Perhitungan stabilitas & trim kapal, Megger Test, Bollard Pull Test, Vibration & Noise Level Test, Kalibrasi tangki, On/Off Hire Survey, Pembuatan gambar teknik, Penyusunan Hatch Cover Plan, Penyusunan Cargo Securing Manual dan Penyusunan Manual ISM Code.

Maritime Inspection & Supervision

In marine inspection and supervision activities, BKI has handled Condition Surveys (checking propellers, inventorying ship maintenance system, evaluating ship repair result), Ship stability & trim calculation, Megger Test, Bollard Pull Test, Vibration & Noise Level Test, Tank calibration, On/Off Hire Survey, Developing of Technical drawings, Hatch Cover Plan, Cargo Securing Manual and ISM Code Manual.

	Konsultansi,Supervisi & Marine	Volume Kegiatan
1	New Building Supervision	8
2	Ship Repair And Modification Supervision	11
3	Ship Condition Survey	361
4	Insurance Survey	2
5	On And Off Hire Survey	7
6	Tank Calibration Survey	104
7	Towing And Lashing Survey	19
8	Stability Calculation	265
9	Floating Object Inspection	2
10	Draught Survey	2
11	Feasibility Study In Marine Industry	5
12	Inspection And Consultancy Of Land Transportation	2
13	Modification Ship Drawing	64
14	Insulation Resistance Measurement/Megger Test	264
15	Noise Level Measurement	1
16	Vibration Measurement	2
17	Bollard Pull Test Pengujian Penambat Kpl/Pengikat Kpl	3
18	Towing Tank (Tempat Pengujian Kapal)	17
19	Kalibrasi Tangki Muat Kapal (Isi Muatan Tangkinya)	36
20	Ship Particulars (Pendataan Khusus Kapal)	1



Pelatihan publik

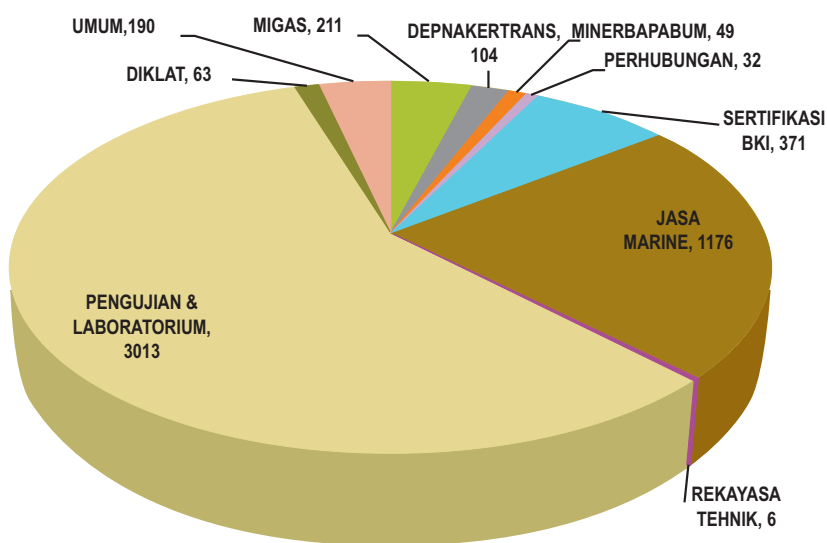
BKI dalam setiap tahunnya juga menyelenggarakan pelatihan teknik, baik dalam bentuk inhouse training maupun public training, di antaranya:

Public Training

BKI also routinely holds technical trainings both public training and in-house training. The trainings are:

	Pendidikan Dan Pelatihan	Volume Kegiatan
1	Welding Inspector	3
2	Marine Surveyor	8
3	Crane Operator	22
4	Internal Auditor Ism-Code	9
5	Radiography Operator	1
6	Ship Security Officer	6
7	Company Security Officer (Isps-Code)	14

Kegiatan Produksi Dihadapkan Dengan Instansi Penunjukan *Production Activities Based on Authorization Sectors*

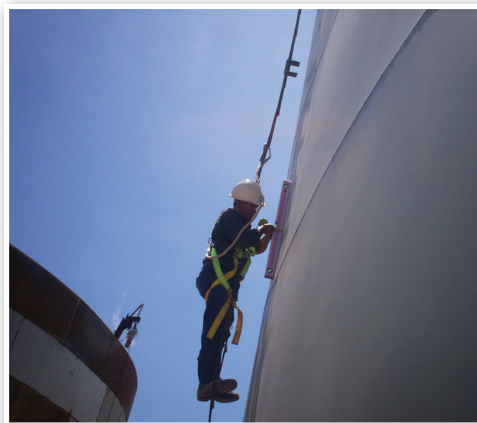


Penelitian & Pengembangan Research & Development



Sesuai dengan misi yang diemban, BKI juga melakukan riset dan pengembangan terutama untuk pengembangan Rules & Regulation sebagai standar teknis kapal serta mempublikasikannya.

In accordance with its mission statement, BKI also conduct research and development primarily for Rules & Regulation development as technical standard of ships and also published it.



Hingga posisi akhir Desember 2009, BKI telah menerbitkan sejumlah Rules & Regulation, yaitu:

In Until at the end of December 2009, BKI has issued some Rules, namely:

1. *Rules for Classification and Surveys (Volume I- 2009);*
2. *Rules for Hull (Volume II- edition 2009);*
3. *Rules for Machinery Installation (Volume III-Edition 2009);*
4. *Rules for Electrical Installations (Volume IV-Edition 2007);*
5. *Rules for Materials (Volume V-Edition 2009);*
6. *Rules for Welding (Volume VI-Edition 2004);*
7. *Rules for Automation (Volume VII-Edition 2007);*
8. *Rules for Refrigerating Installations (Volume VIII-Edition 2001);*
9. *Rules for Ships Carrying Liquefied Gases In Bulk (Volume IX-Edition 2005);*
10. *Rules for Ships Carrying Dangerous Chemicals In Bulk (Volume X-Edition 2002);*
11. *Rules for Inland Waterway vessels Chapter 1-Hull Construction (Edition 1996);*
12. *Rules for Inland Waterway vessels Chapter 2-Machinery Installations (Edition 1996);*
13. *Rules for Inland Waterway vessels Chapter 3-Electrical Installation (Edition 1996);*
14. *Rules for High Speed Vessels (Edition 1996);*
15. *Rules for Fibreglass Reinforced Plastic Vessels (Edition 1996);*
16. *Rules for Wooden Ship (Edition 1996);*
17. *Rules for Mobile Offshore Drilling Units and Special Purpose Units (Edition 1999);*
18. *Rules for Stowage and Lashing of Containers (Edition 1999);*
19. *Rules for Classification and Construction of High Speed Craft (Edition 2000);*
20. *Rules for Offshore Mooring Chains (Edition 2000);*
21. *Rules for Mooring and Loading Installations (Edition 2002);*
22. *Rules for The Classification and Construction of Offshore Installations (Volume 1: Rules For Classification and Survey- Edition 2002);*
23. *Rules for The Classification and Construction of Offshore Installations (Volume 2: Rules For Structures Machinery Installations-Edition 2002);*
24. *Rules for The Classification and Construction of Offshore Installations (Volume 3: Rules For Specific Type of Units and Equipment-Edition 2002);*
25. *Rules for The Classification and Construction of Offshore Installations (Volume 4: Rules For Machinery Installations-Edition 2002);*
26. *Rules for The Classification and Construction of Offshore Installations (Volume 5: Rules For Electrical Installations -Edition 2002);*
27. *Rules for Floating Docks (Edition 2002);*
28. *Rules for Fishing Vessels (Edition 2003);*
29. *Rules for Oil Recovery Vessel (Edition 2005);*
30. *Rules for Non Metalic Material (Edition 2006);*
31. *Common Structural Rules for Tanker;*
32. *Common Structural Rules for Bulk Carrier;*
33. *Rules for Approval of Manufacturers and Service Suppliers.*

List of BKI's Regulation:

1. *Regulation for The Testing of Engines Produced in Series (Edition of 1996);*
2. *Regulation for The Calculation of Diesel Engines Crankshaft (Edition of 1996);*
3. *Regulation for The Seating of Diesel Engines Installations (Edition of 1996);*
4. *Regulation for The Design, Construction and Testing of Pumps (Edition of 1996);*
5. *Regulation for Equipment on The Fire Fighting Ships (Edition of 1996);*
6. *Regulation for Construction, Equipment and Testing of Closed Fuel Overflow System (Edition of 1996);*
7. *Regulation for The Installation and Ventilation of Storage Batteries and The Construction of Battery Chargers (Edition of 1996);*
8. *Regulation for Electromagnetic Compatibility of Electrical Equipment (Edition of 1996);*
9. *Regulation for Lighting (Edition of 1996);*
10. *Regulation for Variable Frequency Ships Mains Operation (Variable Frequency Operation (Edition of 1996);*
11. *Regulation for The Use of Computer and Computer Systems (Edition of 1996);*
12. *Regulation for The Performance of Type Test, Part 1: Procedure (Edition of 2002);*
13. *Regulation for The Performance of Type Test, Part 2: Test Requirements For Electrical/Electronic Equipment, Computer and Peripheral (Edition of 2002);*
14. *Regulation for The Performance of Type Test, Part 3: Test Requirements For Sealing Systems of Bulkhead and Deck Penetrations (Edition of 2002);*
15. *Regulation for The Performance of Type Tests, Part 4: Test Requirements for Electrical Machinery (Edition of 2002);*
16. *Regulation for The Performance of Type Tests, Part 5: Test Requirements for Mechanical Components and Equipment (Edition of 2004);*
17. *Regulation for Mass Produced Engines (Edition of 1996);*
18. *Regulation for The Construction and Survey of Lifting Appliances (Edition of 1998);*
19. *Regulation for Construction, Repair and Testing of Freight Containers (Edition of 1999);*
20. *Regulation for Assessment and Repairs of Defects on Propellers (Edition of 2000);*
21. *Regulation for Constructions and Testing of Towing Gears (Edition of 2000);*
22. *Procedure & Guidelines for The ISM-Code (Edition 2002)*
23. *Regulation for The Life Saving Launching Appliances (Edition of 2001);*
24. *Guidelines for Ocean Towage (Edition of 2001);*
25. *Guidelines for The Explosion Protection of Electrical Equipment (Edition of 2001);*
26. *Guidelines for Sea Trials of Motor Vessels (Edition of 2002-English & Indonesian);*
27. *Regulation for The Inspection of Anchor Chain Cables (Edition of 2002);*
28. *Regulations for Redundant Propulsion and Steering Systems (Edition 2002);*
29. *Guidelines for Inclining Test of Ships (Edition 2003);*
30. *Regulation for The Classification and Construction of Fibre Reinforced Plastic Workboat (Edition 2003);*
31. *Regulation for Ventilation Systems on Beard Seagoing Ships (Edition 2004);*
32. *Regulation for The Corrosion Protection and Coating Systems (Edition 2004);*
33. *Regulation for The Bridge Design on Seagoing Ships One Man Console (Edition 2004);*
34. *Guidelines for The Carriage of Refrigerated Containers on Board Ships (Edition 2004);*
35. *Regulation for Analysis Technique, Strength and Stability (Edition of 2005);*
36. *Guidelines for The Preparation of Damage Stability Calculation and Damage Control Documentation On Board (Edition of 2005);*
37. *Procedure & Guideline for ISPS Code (Edition of 2004);*
38. *Guidelines for Thickness Measurements of ship's plate (Edition of 2005);*
39. *Guidelines for Condition Assessment Scheme (CAS)(Edition of 2006);*
40. *Guidelines for Classification & Construction of Wing-In Ground Craft (WIG-Craft) (Edition 2006);*
41. *Guidance for Implementation Marpol 73/78 Annex VI (Edition 2006).*

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Research & Development

BKI sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa klasifikasi menempatkan sumber daya manusia yang handal dan berkompeten pada posisi terdepan dalam upaya menghadapi dan memenangkan persaingan bisnis dengan para perusahaan kompetitor serta dalam upaya meningkatkan kepercayaan stakeholder atau kualitas pelayanan prima BKI. Prestasi kinerja usaha perusahaan yang telah dicapai dalam tahun 2010 tidak terlepas dari profesionalisme dan peningkatan kompetensi SDM yang dihasilkan dari pola pembinaan dan pengembangan SDM yang dilakukan secara terarah dan terpadu, sehingga prestasi kinerja usaha yang dicapai dalam tahun 2010 ditunjukkan dengan terjadinya peningkatan produktifitas, sehingga Man Power Productivity (MPP) meningkat sebesar 5,4% dibandingkan tahun sebelumnya menjadi Rp 465 juta per personil. SDM yang dimiliki BKI hingga posisi 31 Desember 2010 berjumlah 607 orang

Mengingat aset pokok yang dimiliki oleh BKI adalah sumber daya manusia, maka BKI menyadari sepenuhnya dan berkomitmen untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan kualitas serta kompetensi SDM yang dimiliki melalui program diklat terpadu, dan khusus training bagi surveyor program diklat telah dibuat secara terpadu sesuai dengan ketentuan IACS-QSCS. Untuk tahun 2010 perusahaan telah merealisasikan anggaran training mencapai 10,2% dari total biaya karyawan. Kompetensi yang dimiliki oleh personil teknik BKI sampai dengan Desember 2010 adalah:

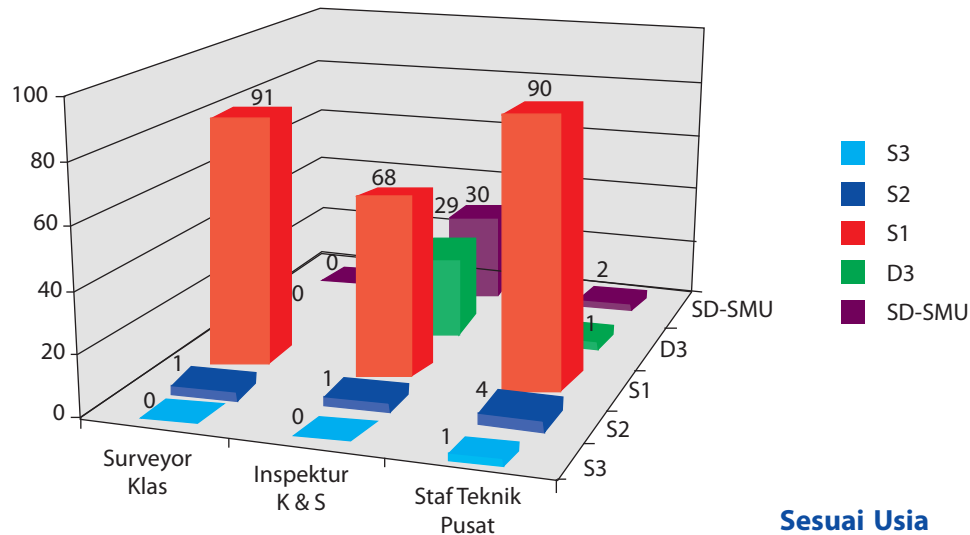
BKI as a company engaged in the classification service field placed reliable and competent human resources at the forefront of efforts to confront and win business competition with company's competitors and stakeholders in an effort to boost confidence or BKI excellent service quality. Company's business performance that has been achieved in 2010 can not be separated from professionalism and competence development of human resources resulting from the pattern of development and human resources development conducted directionally and integrated, so that business performance achieved in 2010 is shown by the increased productivity, so that Man Productivity Power (MPP) increased by 5.4% compared to previous year to Rp 465 million per personnel. BKI human resources up to the position of December 31, 2010 amounted to 607 persons.

Given the main asset owned by BKI is human resources, BKI is fully aware and committed to keep maintaining and improving the quality and competence of its human resources through integrated education and training program, specialized training for surveyors and training programs have been created in an integrated manner in accordance with the provisions of IACS- QSCS. For year 2010 the company has realized the training budget reached 10.2% of total employee costs. Competencies held by BKI technical personnel up to December 2010 are:

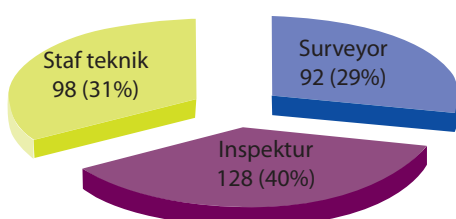
URAIAN	JUMLAH
Bidang Klasifikasi	
1. Principal Surveyor (Class)	18
2. Senior Surveyor (Class)	71
3. Surveyor (Class)	63
4. Assistant Surveyor	28
Bidang Konsultansi & Supervisi	
1. Radiography Expert Level I	3
2. Radiography Expert Level II	4
3. NDT Level I	23
4. NDT Level II	57
5. Welding Inspector	178
6. Welding Inspector – AWS	4
7. Welding Engineering	2
8. AK3 Umum	2
9. Crane Inspector (Depnaker)	79
10. Crane Inspector (Migas)	53
11. Pipeline Inspector	23

12. Casing & Tubing Inspector	24
13. Tank Storage Inspector	42
14. Radiation Protection Officer	4
15. Offshore Pipeline Inspector	5
16. Cathodic/Corrosion Inspector	24
17. Sea Survival	31
18. Pembinaan Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Katup Pengaman	11
19. HUET	13
20. Pressure Vessel Safety	48
Bidang Sertifikasi	
1. Safety Auditor	157
2. Quality Auditor	99
3. ISPS Code	79
Sistem Informasi	
	56
Akuntan	
	16

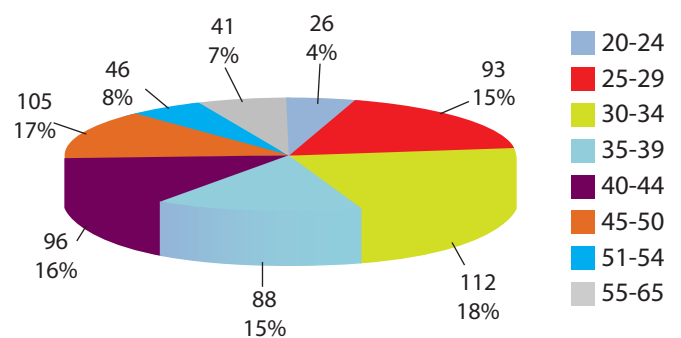
SDM Sesuai Pendidikan
Human Resources Based on Basic Education



Tenaga Teknik
Technical Expert



Sesuai Usia
Human Resources Based on Age



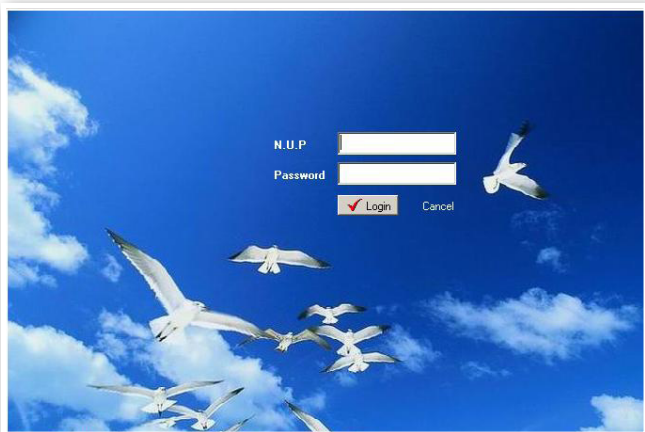
Anslys Software Training



Training Upgrading Surveror Bidang Statutoria—Ferriby Marine



Training Sistem Teknologi Informasi



Training Malcolm Baldrige Criteria



Training Mooring System FSO/FPSO



Training Upgrading Inspector



Training Surveyor Terpadu



Training CAS



Pemaparan Hasil Pendidikan di Luar Negeri



Ujian Inspector Ahli Pembangkit



Presentasi Teknik KR



Presentasi Teknik NK



Teknologi Informasi

Information Technology

Classification And Statutory Reporting System / CSRS

Dalam meningkatkan pelayanan jasanya, BKI telah menyempurnakan sistem pelaporan survey secara on-line dari aplikasi sebelumnya yaitu aplikasi 'Terpadu' menjadi aplikasi "Classification and Statutory Reporting System" (CSRS). Penyempurnaan yang telah dilakukan antara lain lebih fleksibel sesuai kebutuhan surveyor, lampiran dari laporan survey sudah diintegrasikan, aplikasi lebih user friendly (What You See Is What You Get), update form laporan survey lebih mudah dan seragam, update versi secara otomatis di masing-masing laptop surveyor dsb. Dengan aplikasi ini diharapkan terjadi percepatan pembuatan laporan survey termasuk pengiriman ke Kantor Pusat secara on-line. Dengan demikian, Kantor Pusat dapat segera memproses laporan survey tersebut tanpa harus menunggu hard copy dari surveyor lapangan.

Classification And Statutory Reporting System / CSRS

In improving of its services, BKL has modified a reporting system in on-line basis from previous application is called 'Terpadu' to become a new application is called "Classification and Statutory Reporting System" (CSRS). The improvements that have been taken, among others, more flexible to meet surveyors needs, the attachment of the survey report has been integrated, the application more user friendly (What You See Is What You Get), easy to update the survey report and uniformly, update version automatically to each surveyor's laptop etc. With this application, able to accelerate the process of preparing survey report including submit to Head Office in on-line basis. Thus, the Head Office could process the survey reports promptly without waiting for receiving hard copy from field surveyors.

[illegible]

Surveyor

- PERFORMANAN
- DETAIL
- LAPORAN
- UPLOAD
- SETTING

Pernikahan

☐ On Line ☐ Off Line

Cari Berdasarkan

☒ No Pernikahan ☐ Nama Kapal

NoPr	Nomor	Nama Kapal
00023441	4924	KARTINI
00023441	4153	KAYU LAPIS DELAPAN
00023441	5775	MUSITA BERSEKALAH
00234510	4411	KAYU LAPIS EMPAT
00217410	4112	KAYU LAPIS BELANGA
00045441	4470	KAYU LAPIS ENAM

(PASTIKAN)

No. Kontak

Kecab.

PT. PENGANG NOLJANTO Cabang

JAWA TIMUR

Kota

(Pilih nama)

Surveyor I

Syahudin, RI

[illegible]

The screenshot displays the BKK Reporting System v.0.1 web application. The interface includes a sidebar menu on the left with the following items: 'Surveyor' (highlighted), 'DETAIL', 'LAPORAN', and 'SETTING'. Below the menu, there are sections for 'LOGOUT' and 'Tools'. The main content area is divided into two panes. The left pane, titled 'Daftar PDF', contains a table with two columns: 'Form' and 'upload'. The right pane, titled 'Dokumen Tambahan', contains a table with three columns: 'Nama File', 'Linkasi', and 'keterangan'. Below the tables, there are buttons for 'Upload', 'Kirim Dokumen', and 'Hapus data file pilihan'.

The screenshot displays the IM3 Reporting System interface. The left sidebar contains a 'Surveyor' section with a tree view showing 'DETAIL', 'LAPORAN', 'SETTING', and 'TOOLS'. Below this is a 'LOGOUT' button and a 'TOOLS' section with buttons for 'Kirim Partesyon', 'Permohonan 000525M11', 'Request Id 5M1101000', 'Nama Kapal', 'PARTEN I', 'No. Kontak', 'Kacab.', 'BEMBARANG NOELIANTO', 'Cabang', 'INDRA SEMARANG', 'Kota', 'Perwakilan', 'Surveyor I', and 'Solutions, IR'. The main area is titled 'Tools' and contains a tree view with 'Cabang' (selected), 'Kode', 'Kacab', and 'Lokasi'. Below this is a 'Database' section with a dropdown menu showing 'Vicon Ubedata.mdb'. A 'Tools' section on the right includes a 'Set Default' button, a 'Update Form Via ZIP File' button, a 'Can file' button, a 'Update Form' button, and a 'Klik untuk melihat panduan CSRS' button. At the bottom right, there is a 'back' button.

Tanggung Jawab Sosial

Social Responsibility

Perusahaan pada tahun 2010 telah menyalurkan pinjaman dana sebesar Rp 1.290 juta untuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Dana tersebut berasal dari penyisihan laba, sebagaimana telah disebutkan dalam keputusan RUPS dan dari pengembalian pinjaman.

Tujuan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan adalah mengembangkan dan menciptakan iklim usaha yang sehat dan menjaga tata hubungan yang mendorong tumbuhnya kondisi saling menunjang antara BUMN, koperasi dan swasta khususnya pengusaha kecil dan koperasi serta mendorong koperasi dan usaha kecil sebagai lembaga ekonomi rakyat yang mampu melaksanakan, meningkatkan dan mengembangkan usahanya secara lebih efektif dan efisien serta dapat memberi nilai tambah dan manfaat yang lebih besar bagi para anggotanya maupun masyarakat di sekitar.

Adapun sasarannya adalah terciptanya kesempatan usaha dan lapangan kerja yang lebih luas bagi usaha kecil dan koperasi sampai ke masyarakat pedesaan, serta terselenggaranya sistem manajemen yang lebih rasional dan efisien yang diikuti dengan peningkatan kemampuan baik permodalan, personil, administrasi, keuangan maupun kemandirian wirausaha. Prioritas pembinaan tahun 2010 kepada usaha kecil baik perorangan maupun badan dan Koperasi (KUD) terutama KUD calon mandiri.

Jumlah realisasi dana yang terdistribusi pada tahun 2010 sebesar Rp 1.290 juta yang disalurkan kepada 3 wilayah binaan, yaitu:

Company in 2010 has channeled funds loans amounting to Rp 1,290 million for Partnership and Community Development Program. These funds come from retained earnings, as already mentioned in the decision of SM and loan repayment.

The purpose of Partnership and Community Development Program is to develop and create a healthy business climate and maintain good relationship that encourages growth conditions of mutual support among SOEs, cooperatives and private entrepreneurs, especially small enterprises and cooperatives and encourage cooperatives and small businesses as people's economic institution that capable to implement, improve and develop its business more effectively and efficiently and can provide added value and greater benefits for its members and community around.

The goal is the creation of more widely business and employment opportunities for small enterprises and cooperatives to rural communities, and implementation of more rational and efficient management system, followed by either increase of ability of capital, personnel, administrative, financial and entrepreneurial independence. Priority of guidance in 2010 to small business, either individual and entities as well as cooperative (KUD), especially independent candidates KUD.

The number of actual funds distributed in 2010 is as many as Rp 1,290 million which is distributed to 3 target areas, namely:

Wilayah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
DKI Jakarta	550	370
DI Yogyakarta	450	520
Jawa Timur	430	400
	1.430	1.290



Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik memberikan manfaat besar bagi kinerja Perusahaan secara keseluruhan. Tata Kelola Perusahaan yang baik juga menjadi sarana perusahaan mengembangkan aset, akuntabilitas kepada para stakeholder dan menjaga nilai jangka panjang stakeholder.

Panduan Dewan

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS merupakan Organ Perusahaan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris. RUPS berhak memperoleh seluruh informasi yang relevan tentang Perusahaan dan meminta pertanggungjawaban Dewan Komisaris dan Direksi yang berkaitan dengan pengelolaan Perusahaan. Pada tahun 2010, Perusahaan telah mengadakan RUPS pengesahan RKAP 2010 pada tanggal 12 Januari 2010 di Jakarta dan RUPS pertanggung jawaban Laporan Manajemen tahun 2009 pada tanggal 25 Juni 2010 di Bandung serta RUPS Pengesahan RKAP 2011 pada tanggal 30 Desember 2010 di Jakarta.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertugas mengawasi dan memberikan masukan kepada Direksi demi kepentingan Perusahaan, Pemegang Saham, serta pihak yang berkepentingan pada umumnya. Dewan Komisaris bertanggung jawab memastikan agar Direksi dalam kondisi apapun mempunyai kemampuan menjalankan tugasnya. Dewan Komisaris secara teratur memantau efektivitas pelaksanaan kebijakan dan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Direksi agar selalu sesuai dengan tujuan Perusahaan dan arahan Pemegang Saham. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris selalu mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dewan Komisaris sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dapat menggunakan saran profesional yang mandiri dan atau membentuk komite-komite bila diperlukan.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

1. Pada tahun 2010, Dewan Komisaris telah melakukan rapat sebanyak 14 (empat belas) kali, dimana di antaranya sebanyak 6 (enam) kali dilakukan bersama-sama dengan Direksi.

Implementation of Good Corporate Governance gives great benefit to the overall Company performance. Good Corporate Governance is also a means for the company to develop assets, accountability to stakeholders and to maintain long-term value of stakeholders.

Board Manual

Shareholders' Annual General Meeting (AGM)

AGM is a Company Organ which holds the highest authority in the company and holds all authorities that are not submitted to Board of Directors or Board of Commissioners. AGM reserves the right to obtain all relevant information concerning the Company and ask the accountability of Board of Commissioners and Board of Directors relating to Company management. In 2010, the Company has conducted AGM related to CBP 2010 endorsement. dated 12 January 2010 in Jakarta and AGM about Management Report 2009 accountability dated June 25, 2010 in Bandung and AGM related to CBP 2011 endorsement date December 30, 2010 in Jakarta .

Board of Commissioners

Board of Commissioners is responsible for overseeing and providing input to Board of Directors for company, Shareholders interest and related parties generally. Board of Commissioners is responsible to ensure that Board of Directors in any circumstances has the ability to carry out their duties. Board of Commissioners regularly monitors the effectiveness of policy and decision-making process undertaken by Board of Directors to comply with Company goals and Shareholders directions. In performing its duties, Board of Commissioners always adheres to the Statutes and applicable regulations. Board of Commissioners in accordance with defined procedures can use an independent and professional advice or forming committees if necessary.

Implementation of Duties and Responsibilities of Board of Commissioners

1. *In 2010, Board of Commissioners has held as many as 14 (fourteen) times, which include as many as 6 (six) times conducted jointly with Board of Directors.*

2. Memberikan tanggapan, pendapat dan saran kepada Pemegang Saham atas kinerja perusahaan, kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan hal-hal lain yang dimintakan oleh Pemegang Saham, antara lain penyampaian daftar (long list) bakal calon Direksi.
 3. Menugaskan Komite Audit untuk melakukan observasi atas eksistensi dan kondisi asset tetap eks Proyek Chevron Pekanbaru serta bersama-sama dengan SPI memastikan efektivitas pelaksanaan audit oleh KAP Rama & Wendra atas Laporan Keuangan Perusahaan tahun buku 2009. Atas hasil observasi Komite Audit, Dewan Komisaris telah memberikan saran kepada Direksi atas pengamanan, pemeliharaan dan pengoptimalan asset dimaksud.
 4. Ikut serta dalam ACS Meeting di Bali dan Customer Meeting yang diadakan oleh Manajemen di Bitung, Pekanbaru, Palembang, Jambi, Banjarmasin, Belawan, Balikpapan, Batam, yang bertujuan untuk mensosialisasikan layanan jasa PT. BKI dan mengidentifikasi permasalahan dari pemangku kepentingan PT. BKI. Dewan Komisaris/Komite Audit juga melakukan monitoring atas kinerja beberapa cabang yang perlu mendapat perhatian atas kinerja maupun program kerja strategisnya.
 5. Ikut serta dalam pembahasan kerjasama usaha dan penandatanganan MoU dengan PT. Pelindo IV (Persero) dan PT PANN (Persero) serta menghadiri Raker Kedeputan Logistik dan Pariwisata Kementerian BUMN dan forum Pertemuan Komite Kebijakan Publik Kementerian BUMN.
 6. Mereview dan menindaklanjuti masukan serta rekomendasi dari Komite Audit diantaranya mengenai pengadaan atau pemilihan KAP untuk audit tahun buku 2010. Sesuai dengan kewenangan yang telah dilimpahkan oleh Pemegang Saham dalam RUPS Pengesahan Laporan Tahunan Perusahaan tahun buku 2009, maka Dewan Komisaris telah menyetujui KAP Kanaka Puradireja, Suhartono untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan
 7. Memberikan dukungan terkait dengan posisi PT. BKI (Persero) dalam UU 17 tahun 2008 Pasal 129 tentang Pelayaran serta memfasilitasi penyelenggaraan presentasi NCVS oleh Ditjen Perhubungan Laut yang diadakan oleh PT. BKI (Persero).
 8. Memberikan persetujuan atas permohonan Direksi untuk memperpanjang fasilitas garansi bank, permohonan realokasi dana investasi, persetujuan perjalanan dinas Direksi ke Luar Negeri.
 9. Mengikuti presentase penilaian KPI dengan metode Malcom Balgride yang diadakan oleh Deputy Logistik dan Pariwisata di Jakarta.
2. *Provide feedback, comments and suggestions to shareholders on corporate performance, monitoring activities undertaken by Board of Commissioners and other matters requested by Shareholders, including the delivery long list of director candidates.*
 3. *Order Audit Committee to conduct observations on the existence and condition of fixed assets of ex-Chevron Project Pekanbaru and together with SPI to ensure the effectiveness of the 2009 Financial Statements audit by the accounting firm Wendra Rama & Company. Upon the observation of the Audit Committee, Board of Commissioners has provided advice to the Directors of the securing, maintenance and optimization of this assets.*
 4. *Participate for ACS Meeting in Bali and Customer Meeting held by the Management in Bitung, Pekanbaru, Palembang, Jambi, Banjarmasin, Belawan, Balikpapan and Batam which aims to promote BKI services and to identify problems of BKI stakeholders. Board of Commissioners Audit Committee also monitors the performance of several branches that require attention on the performance and strategic work program*
 5. *Participate in the discussion of business cooperation and the signing of the MoU with PT. Pelindo IV (Persero) and PT PANN (Persero) and attended a meeting with Deputy for Logistics and Tourism, State Owned Enterprises Ministry and Public Policy Committee Meeting forum, State Owned Enterprises Ministry*
 6. *Review and follow up on input and recommendations from the Audit Committee include the procurement or the selection of audit firm for 2010. In accordance with the authorization which has been delegated by the Shareholders in the AGM for Ratification of the Annual Report Fiscal 2009, the Board of Commissioners has approved the KAP Kanaka Puradireja, Suhartono to audit the Financial Statements*
 7. *Provide support related to the position of PT. BKI (Persero) in Act 17 of 2008 Article 129 on Shipping and facilitating the presentation NCVS by the Directorate General of Sea Transportation held by PT. BKI (Persero).*
 8. *Give approval to the Board of Directors to extend the bank guarantee facility, request the reallocation of investment funds, approval of official travel to Aboard*
 9. *Attending the presentation of KPI rating with Balgride Malcolm method held by the Deputy Logistics and Tourism in Jakarta*

10. Menghadiri dan memberikan arahan kepada seluruh jajaran BKI dalam acara RAKER & TOMSI 2010 di Batam.
11. Melakukan pembahasan revisi Manual GCG dan Piagam Komite Audit terkait dengan perubahan anggaran dasar perusahaan.
12. Memberikan tanggapan, pendapat dan saran kepada Pemegang Saham atas kinerja perusahaan, kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan hal-hal lain yang dimintakan oleh Pemegang Saham, antara lain penyampaian daftar (long list) bakal calon Direksi.

Remunerasi Dewan Komisaris

Remunerasi adalah imbalan yang diberikan kepada Dewan Komisaris atas peran yang diberikan untuk pengurusan dan pengawasan perusahaan adalah sesuai dengan Keputusan RUPS tanggal 23 Juni 2009 di Jakarta, adalah sebagai berikut:

No	Jabatan	Nama	Honorarium
1.	Komisaris Utama	Capt. Drs. Abdul Gani, MM.MBA	11.536
2.	Komisaris	Drs.Riyadi Widiasmoro, MSi	10.382
3.	Komisaris	Lilie Mayasari, SE	10.382
4.	Sek. Dekom	Susi Meyrista Tarigan, SE Ak, MSAk	4.326
Jumlah			36.626

Efektifitas Kerja Dewan Komisaris

Komisaris mengadakan rapat 1 (satu) bulan sekali dan sewaktu-waktu apabila dianggap perlu untuk membicarakan berbagai permasalahan dan bisnis Perusahaan serta melakukan evaluasi terhadap kinerja Perusahaan. Panggilan rapat Komisaris dilakukan secara tertulis oleh Komisaris Utama atau anggota Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama. Dalam panggilan rapat dicantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat.

Semua rapat Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, rapat Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Komisaris Utama.

Semua keputusan dalam rapat Komisaris diambil dengan musyawarah untuk mufakat. Dalam setiap rapat Komisaris dibuat risalah rapat yang dapat menggambarkan situasi yang berkembang, proses pengambilan keputusan, argumentasi yang dikemukakan, kesimpulan yang diambil serta pernyataan keberatan terhadap kesimpulan rapat apabila tidak terjadi kebulatan pendapat.

Dalam setiap rapat Dewan Komisaris dibuat risalah rapat yang dapat menggambarkan situasi yang berkembang,

10. Attend and give direction to the BKI staff in the meeting & TOMSI 2010 in Batam
11. Discussing the revised Manual of Good Corporate Governance and Audit Committee Charter amendment relating to the company
12. Provide feedback, opinions and suggestions to the Shareholders of the company's performance, supervision activities by the Board of Commissioners and other matters required by Shareholders, including submission of the list (long list) prospective Directors

Remuneration of Board of Commissioners

Remuneration is a benefit provided to Board of Commissioners for the role given for governance and control in accordance with the decision of SM dated June 23, 2009 in Jakarta, are as follows:

BOC Work Effectiveness

Board of Commissioners met every 1 (one) month and at any time if deemed necessary to discuss various issues and business enterprise and evaluation of company performance. Call meeting of Board of Commissioners is made in writing by President Commissioner or by a member of Board of Commissioners appointed by President Commissioner. In a meeting call were included the agenda, date, time and place.

All meetings of Commissioners chaired by Commissioner. In the case of Commissioner not in attendance, the meeting is headed by a Commissioner other Commissioners are appointed by the Commissioner.

In every meeting of Board of Commissioners, it will be created the minutes of meetings that can describe the situation evolving, decision-making process, the argument presented, conclusions drawn and statements of objection to the conclusion the meeting if there was no unanimity of opinion. Minutes of the meeting made will be signed by the leader of the meeting and signed by a member of Board of Commissioners who was appointed by and from among those present.

In every meeting of Board of Commissioners will be created the minutes of meeting that can describe the situation evolving,

proses pengambilan keputusan, argumentasi yang dikemukakan, kesimpulan yang diambil serta pernyataan keberatan terhadap kesimpulan rapat apabila tidak terjadi kebulatan pendapat.

Risalah rapat ditanda-tangani Pimpinan rapat Komisaris dan oleh salah seorang anggota Komisaris yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir. Setiap anggota Komisaris berhak menerima salinan risalah rapat Komisaris, meskipun yang bersangkutan tidak hadir dalam rapat tersebut.

Pada tahun 2010 dewan komisaris telah melakukan rapat internal sebanyak 14 (empat belas) kali, dengan prosentase kehadiran sebagai berikut:

- Capt. Abdul Gani (Komisaris Utama): 100%
- Drs. Riyadi Widiasmoro (Komisaris): 100%
- Liliek Mayasari, SE, Ak (Komisaris): 100%

Dalam rapat internal tersebut, Dewan Komisaris juga mengundang Direksi sebanyak 6 (enam) kali.

Direksi

Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, mengurus dan mengelola bisnis untuk kepentingan Perusahaan yang sebesar-besarnya. Dalam melaksanakan tugasnya Direksi tetap memperhatikan keseimbangan kepentingan seluruh pihak yang terkait dengan aktivitas Perusahaan. Direksi bertindak secara cermat, berhati-hati dan mempertimbangkan berbagai aspek penting yang relevan dalam pelaksanaan tugasnya. Direksi menggunakan wewenang dan sumber daya yang dimiliki Perusahaan semata-mata hanya untuk kepentingan Perusahaan.

Direksi mempunyai tugas utama :

1. Memimpin dan mengurus perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan.
2. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas perusahaan.
3. Menerapkan praktik-praktik tata kelola perusahaan yang sehat dalam perusahaan.
4. Bertugas sesuai Anggaran Dasar Perusahaan, keputusan RUPS serta peraturan lainnya.

Direksi bertanggung jawab kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

Susunan Direksi berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No.88/MBU.2004 tertanggal 8 September 2004 sebagai berikut :

ing, decision-making process, the argument presented, conclusions drawn and a statement of objections to the meeting conclusion if there is no opinion unanimity. Minutes of the meeting was signed by the leader of the meeting and by a member of Board of Commissioners appointed by, and from among those who were present.

Minutes of the meeting was signed by the Leaders Meeting of Commissioners and a member of the Commissioners who are appointed by and from among those present. Each member of the Commissioner is entitled to receive copies of minutes of meetings of Commissioners, although concerned did not attend the meeting.

In 2010, Board of Commissioners has held 14 (fourteen) times meetings with the percentage of attendance as follows:

- Capt. Abdul Gani (Komisaris Utama): 100%
- Drs. Riyadi Widiasmoro (Komisaris): 100%
- Liliek Mayasari, SE, Ak (Komisaris): 100%

In addition to internal meetings, Board of Commissioners also held coordination meetings with Board of Directors for 6 (six) times.

Directors

Directors in good faith and responsibly, taking care of and manage the business for Company interest as big as possible. In performing their duties, the board due regard to balance the interests of all parties related to Company activities. Board of Directors acted very carefully, be cautious and consider about various important aspects which are relevant in performing their duties. Directors use the authority and resources owned by the Company solely for Company interest.

Directors have the primary duties:

1. *Lead and manage the company in accordance with its aims and objectives.*
2. *Improve efficiency and effectiveness of the company.*
3. *Apply the practices of good corporate governance within the company.*
4. *Assigned based on Company's statutes, the decision of AGM and other rules.*

Directors are responsible to shareholders through Annual General Meeting of Shareholders.

Composition of the Board based on Decree of Ministry of SOE No.88/MBU.2004 dated 8 September 2004, as follows :

1. Direktur Utama : Ir. Muchtar Ali
2. Direktur Keu & Personalia : Drs. Donny S. Purba
3. Direktur Teknik : Ir. Haryanto
4. Direktur Usaha : Ir. R. Wibisono, MM

Sesuai Surat Keputusan Menteri BUMN No. KEP-259/MBU/2010 tanggal 06 Desember 2010 mengangkat Direksi yang baru Definitif terhitung Sejak bulan Desember 2010 dengan keanggotaan sebagai berikut:

1. Direktur Utama: Capt. Purnama, MM
2. Direktur Keu. & Personalia: Edy Cahyono, ST, MSM
3. Direktur Teknik & Pengembangan: Ir. Ajatiman
4. Direktur Operasi & Pemasaran : Ir. Setudju Dangkeng, SE

Remunerasi Direksi

Remunerasi adalah imbalan yang diberikan kepada Direksi atas peran yang diberikan untuk pengurusan dan pengelolaan Perusahaan adalah sesuai dengan Keputusan RUPS tanggal 25 Juni 2010 di Jakarta, sebagai berikut:

No	Jabatan	Nama	Jenis Remunerasi / bulan		Total Per bulan
			Honorarium	Tunjangan Perumahan	
1	Dir. Utama	Capt. Purnama,MM	28.840	8.652	37.492
2	Dir.Keu& Personalia	Edy Cahyono ST, MSM	25.956	7.787	33.743
3	Dir.Teknik & Pengembangan	Ir. Ajatiman	25.956	7.787	33.743
4	Dir. Operasi & Pemasaran	Ir. Setudju Dangkeng	25.956	7.787	33.743
Jumlah			106.708	32.013	138.721

Selain remunerasi di atas kepada Direksi juga diberikan fasilitas kendaraan dinas operasional masing-masing 1 (satu) unit sesuai dengan azas kepastian dan kemampuan perusahaan.

Efektifitas Kerja Direksi

Secara umum efektifitas dan kinerja Direksi ditentukan berdasarkan tugas kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perusahaan maupun amanat Pemegang Saham

Direksi mengadakan rapat 1 (satu) bulan sekali dan sewaktu-waktu apabila dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi. Panggilan rapat Direksi dilakukan secara tertulis oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Perusahaan. Dalam panggilan rapat tersebut dicantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. Panggilan rapat terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan apabila semua anggota Direksi hadir dalam rapat.

Pada tahun 2010, Direksi melakukan rapat internal sebanyak 12 (Dua belas) kali dan melakukan rapat koordinasi

1. President Director : Ir. Muchtar Ali
2. Finance & Personnal Director : Drs. Donny S.Purba
3. Technial Director : Ir. Haryanto
4. Business Director : Ir. R. Wibisono, MM

By the Decree of the Minister of SOEs No. KEP-259/MBU/2010 dated December 6, 2010 the new Board of Directors effective from December 2010 as follows:

1. President Director: Capt. Purnama, MM
2. Finance & Personnal Director: Edy Cahyono, ST, MSM
3. Technical & Development Director: Ir. Ajatiman
4. Operation & Marketing Director: Ir. Setudju Dangkeng, SE

Remuneration of Directors

Remuneration paid to Directors for the role given to arrangement and management of the Company are in accordance with the decision of AGM dated June 25, 2010 in Jakarta, as follows:

In addition to the above remuneration to the Directors was also given the operational vehicle facility each 1 (one) unit in accordance with the principles of company merit and ability.

Job Board Effectiveness

In general, the effectiveness and performance of Directors is determined based on the duties listed in the legislation in force and Articles of Association and Shareholders' mandate

Board of Directors met 1 (one) month and at any time if deemed necessary by one or more of Board of Directors members. Meeting call of Directors was made in writing by a member of Board of Directors entitled to represent the Company. In the meeting call, were included agenda, date, time and venue.

In 2010, Board of Directors conducted internal meetings as many as 12 (twelve) times and conducted coordination

dengan Dewan Komisaris sebanyak 6 (Enam) kali, dengan prosentase kehadiran sebagai berikut:

Direksi Lama:

- Ir. Muchtar Ali : 91,67 %
- Drs. Donny S. Purba : 91,67 %
- Ir. Haryanto : 91,67 %
- Ir. R. Wibisono, MM : 91,67 %

Direksi Baru:

- Capt. Purnama, MM : 8,33 %
- Edy Cahyono ST, MSM : 8,33%
- Ir. Ajatiman : 8,33 %
- Ir. Setudju Dangkening : 8,33 %

Hubungan Kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi

Dalam hal dianggap perlu, Komisaris dapat berinisiatif menyelenggarakan Rapat Konsultatif dengan Direksi untuk membicarakan masalah perusahaan yang relevan. Demikian pula bila dianggap perlu, Direksi dapat berinisiatif menyelenggarakan Rapat Koordinasi dengan Komisaris untuk membicarakan masalah perusahaan yang relevan. Dalam setiap pertemuan, informasi dan data yang penting untuk pemahaman Dewan Komisaris akan diberikan secara tertulis sebelum pertemuan untuk menjamin tersedianya waktu bagi Dewan Komisaris untuk memahami permasalahan yang akan dibahas. Bila perlu Direksi membuat ringkasan bahan tersebut sepanjang tidak mengurangi esensi informasi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

Dalam setiap Rapat Konsultatif tersebut dibuat risalah rapat yang dapat menggambarkan situasi yang berkembang, proses pengambilan keputusan argumentasi yang dikemukakan, kesimpulan yang diambil, serta pernyataan keberatan terhadap kesimpulan rapat apabila tidak terjadi kebulatan pendapat. Selama tahun 2010, Direksi dan Dewan Komisaris telah melakukan Rapat Konsultatif sebanyak 6 (enam) kali.

Komite Audit

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit sebagaimana tercantum dalam Piagam Komite Audit yang ditetapkan dengan SK Komisaris Utama No. KU.002/Dekom.101/X/KI-09 tanggal 22 Oktober 2009 menyebutkan, Komite Audit sebagai organ Komisaris bertugas memberikan masukan kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris.

meetings with Board of Commissioners as many as 6 (six) times, with the percentage of attendance as follows:

Old Directors::

- Ir. Muchtar Ali : 91,67 %
- Drs. Donny S. Purba : 91,67 %
- Ir. Haryanto : 91,67 %
- Ir. R. Wibisono, MM : 91,67 %

New Directors:

- Capt. Purnama, MM : 8,33 %
- Edy Cahyono ST, MSM : 8,33%
- Ir. Ajatiman : 8,33 %
- Ir. Setudju Dangkening : 8,33 %

Working relationship between Board of Commissioners and Directors

In case considered necessary, Board of Commissioners may initiate Coordination Meeting with Board of Directors to discuss relevant company's issues. Similarly, if deemed necessary, Directors may initiate Coordination Meeting with Board of Commissioners to discuss relevant company's issues. In each meeting, information and data important for the understanding of Board of Commissioners will be given in writing before the meeting to ensure time availability for the Board to understand issues discussed. If necessary, Board of Directors can make a summary of material provided as long as they do not reduce the essential information that can influence in decision making.

In each consultative meeting will be made the minutes of meeting which can describe the situation evolving, decision-making process, arguments presented, conclusions drawn, and statement of objections to meeting conclusion when there is no opinion unanimity. During year 2010, Board of Directors and Board of Commissioners have held coordination meetings as many as 6 (six) times.

Audit Committee

Duties and responsibilities of Audit Committee as contained in Charter of the Audit Committee established by SK Commissioner no. KU.002/Dekom.101/X/KI-09 dated October 22, 2009 mentioning, Audit Committee as an organ of Board of Commissioners is charged in providing recommendations to Board of Commissioners on the report or other matters submitted by Board of Directors to Board of Commissioners, in identifying the things require the attention of Board of Commissioners and perform other tasks related to the duties of Board of Commissioners.

Susunan Komite Audit:

Ketua : Drs. Riyadi Widiasworo, Msi
Anggota : - Tri Ashadi
- Suwarno

Komite Audit dalam tahun 2010 telah melaksanakan tugas sbb:

1. Mengadakan Rapat Internal Komite Audit antara lain untuk memberikan masukan bagi Dewan Komisaris
2. Mengikuti Rapat Dewan Komisaris dan Dewan Direksi
3. Mereview dan memberi komentar terhadap laporan triwulanan perusahaan
4. Mereview RKAP perusahaan yang akan diajukan kepada Pemegang saham
5. Mengadakan kunjungan ke cabang PT BKI, antara lain ke Cabang Belawan, Balikpapan dan Surabaya.
6. Mengadakan pertemuan dengan Kantor Akuntan Publik serta SPI berkaitan dengan Audit Keuangan PT BKI untuk tahun buku 2009 dan tahun buku 2010 yang telah dimulai kegiatan auditnya pada Nopember 2010.

Sistem Pengendalian Internal

Perusahaan telah memelihara sistem pengendalian internal keuangan yang menjamin keandalan sistem akuntansi. Sistem pengendalian internal keuangan diberlakukan untuk memberikan jaminan yang wajar dalam hubungannya dengan menjaga aset dari penyalahgunaan dan peralihan kepemilikan secara tidak sah, menjaga keabsahan catatan-catatan akuntansi dan keandalan informasi keuangan yang dapat dipercaya yang digunakan dalam Perusahaan maupun yang dipublikasikan.

Pelaksanaan tugas pengendalian internal merupakan tanggung jawab seluruh unit/satuan kerja. Perusahaan menetapkan Satuan Pengawasan Intern (SPI) sebagai unit yang bertanggung jawab atas efektivitas sistem pengendalian internal. Selain itu perusahaan juga membentuk Satuan Jaminan Mutu (Satjamtu) sebagai penanggung jawab diterapkan Sistem Manajemen Mutu berdasarkan persyaratan standar ISO 9001:2008 sebagai wujud komitmen manajemen dalam meningkatkan kepuasan pemakai jasa (Customer satisfaction) dan penyempurnaan yang berkesinambungan (Continuous Improvement).

Dalam mendukung aktivitas pengendalian internal, Perusahaan senantiasa menjamin independensi SPI dan Satjamtu dalam melaksanakan audit serta meningkatkan kompetensi para auditornya. SPI selama tahun 2010 telah melakukan audit operasional terhadap 9 (sembilan) unit kerja, sedangkan Satjamtu telah melakukan audit terhadap 17 (Tujuh belas) unit kerja, meliputi Kantor Pusat dan Unit Produksi.

Susunan Komite Audit:

Ketua : Drs. Riyadi Widiasworo, Msi
Anggota : - Tri Ashadi
- Suwarno

Audit Committee in 2010 has fulfilled tasks as follows:

1. *Internal meeting of Audit Committee, among others, to provide input for Board of Commissioners.*
2. *Followed meetings of Board of Commissioners and Board of Directors.*
3. *Reviewed and commented on company's quarterly report.*
4. *Reviewed company's annual budget to be submitted to the shareholders.*
5. *Visit to some branches, among others Belawan, Balikpapan and Surabaya.*
6. *Held a meeting with the Office of the Public Accountants and the SPI associated with PT BKI Financial Audit for fiscal year 2009 and fiscal year 2010, which has started its audit activities in November 2010.*

Internal Control System

The Company already has an internal control system that ensures the reliability of financial accounting system. The financial internal control system put in place to provide reasonable assurance in connection with maintaining assets from misuse and unauthorized transfer of ownership, maintaining the validity and reliability of accounting records of reliable financial information both used by the Company those were published.

The implementation of tasks of internal control is the responsibility of all working units. The Company provided an Internal Audit Unit (IAU) as the unit responsible for the effectiveness of internal control system. The company also established the Quality Assurance Unit as the one which is responsible for the implementation of Quality Management System based on ISO standard requirements 9001:2000 as a part of its commitment to improve management of customer satisfaction and continuous improvement.

In supporting internal control activities, the company has ensured the independence of ISU and Quality Assurance Unit in conducting audits and increased auditors' competence. SPI during year 2010 has conducted operational audits of 9 (nine) business units, while Quality Assurance Unit has conducted audits of 17 (seventeen) business units, including Head Office and Production Units.

Auditor Eksternal

Sesuai keputusan RUPS tanggal 25 Juni 2010 RUPS memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk KAP yang akan bertindak sebagai Auditor Independen untuk melaksanakan audit atas Laporan Tahunan dan Perhitungan Tahunan PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Tahun Buku 2010. Selanjutnya, berdasarkan proses pengadaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan prinsip GCG, Dewan Komisaris telah menunjuk KAP KANAKA PURADIREDDJA, SUHARTONO sebagai Auditor atas Laporan Keuangan PT. BKI tahun buku 2010.

Auditor eksternal tersebut terbebas dari pengaruh Dewan Komisaris, Direksi dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam Perusahaan, serta perusahaan wajib menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan auditor eksternal sehingga memungkinkan auditor eksternal memberikan pendapatnya tentang kewajaran, kepatuhan azas dan kesesuaian laporan keuangan Perusahaan dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Tugas Auditor Eksternal adalah melakukan audit atas laporan keuangan Perusahaan dan memberikan pendapat (opini) secara independen terhadap kewajaran dan kesesuaian laporan keuangan Perusahaan dengan Standar Akuntansi Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan menjamin proses penunjukan Auditor Eksternal dan pelaksanaan audit dilakukan secara independen tanpa pengaruh Direksi dan pihak-pihak diluar Perusahaan. Besarnya jasa audit yang dibayarkan Perusahaan untuk laporan keuangan tahun 2010 yaitu Rp 102.850.000,- termasuk PPN 10%. Kantor Akuntan Publik KANAKA PURADIREDDJA, SUHARTONO tidak memberikan jasa konsultasi lainnya kepada perusahaan.

Integritas dalam berusaha

Penerapan standar etika dalam seluruh kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip GCG melandasi seluruh aktivitas Perusahaan dalam menjalankan usahanya. Seluruh jajaran Perusahaan telah mensosialisasikan GCG Code ini untuk mempertahankan kejujuran, transparansi, independensi, akuntabilitas, integritas, dan keadilan dalam proses kerja dan transaksi di lingkungan masing-masing

Perusahaan telah menerapkan fungsi pengawasan dengan menggunakan audit berdasarkan prinsip-prinsip yang benar dan berlaku umum serta senantiasa mengupayakan agar tindakan-tindakan ilegal, tidak fair dan pelanggaran atas norma-norma dan peraturan yang berlaku dapat dikenai sanksi, baik administrasi, maupun perdata. Menjadi kewajiban setiap unit kerja untuk senantiasa menindaklanjuti setiap temuan hasil audit yang disampaikan oleh fungsi pengawasan. Perusahaan telah menetapkan kebijakan melarang anggota Komisaris,

External Auditor

In accordance with the AGM decision dated June 25, 2010, AGM gives authorization to Board of Commissioners to appoint the accounting firm that will act as an independent auditor to conduct an audit of annual reports and yearly calculation. BKI year 2010. Furthermore, based on audit result of the financial statements in fiscal year 2009 and as proposed by Board of Directors, Board of Commissioners approved reappointment of Kanaka Puradiredja, Suhartono Accountant Office as auditor of BKI financial statement year 2010.

The external auditor is free from the influence of Board of Commissioners and Directors and interested parties within the Company, and company must record all necessary supporting data needed by external auditors so that enable the external auditor to provide his opinion about the fairness, reliability, and consistency of Company's financial statement with Indonesian Financial Accounting Standard. The task of external auditor is to conduct an audit of company's financial statements and give an opinion independently about fairness and consistency of Company's financial statement with Financial Accounting Standards and applicable regulations. The Company guarantees the process of appointing external auditors and audit implementation was conducted independently without any influence of Board of Directors and parties outside the company. The amount of auditing services paid by the company for financial reporting year 2010 is Rp 102.850.000, - including VAT 10%. Kanaka Puradiredja, Suhartono Accounting Firm did not provide other consulting services to the company.

Integrity in business

Ethical standards in all business activities based on GCG principles underlie all activities of the company to run its business. All levels of the company have socialized this Code GCG to maintain honesty, transparency, impartiality, accountability, integrity and fairness in work processes and transactions in their respective environment.

The Company has implemented a monitoring function by using audits based on correct principles and generally accepted and always strive to be illegal, unfair and a violation of the norms and regulations can be subject to sanctions, both administrative and civil liability. It has been the responsibility for each business unit to constantly follow up on any audit findings submitted by the supervisory function. The Company has established a policy to prohibit Board of Commissioners, Directors

Direksi dan seluruh karyawan Perusahaan dan pihak yang terkait melakukan transaksi yang bertentangan dengan hukum dan prinsip-prinsip GCG. Apabila transaksi tersebut terbukti terjadi, maka setiap pihak yang terlibat langsung akan dikenai sanksi administratif dan tuntutan sesuai hukum yang berlaku. Pengertian yang bertentangan dengan hukum dan prinsip-prinsip GCG digunakan untuk menggambarkan setiap transaksi bisnis yang dikategorikan melawan hukum atau bertentangan dengan integritas Perusahaan. Transaksi tersebut, antara lain pemberian atau penerimaan suap dan hadiah yang diberikan dalam upaya mempengaruhi keputusan yang berkaitan dengan bisnis Perusahaan.

Hubungan dengan Pemegang Saham

Perusahaan telah melakukan hubungan dengan Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan berusaha keras agar memberikan kontribusi yang optimal dan berkesinambungan bagi Pemegang Saham. Perusahaan selalu berusaha agar terjadi pertumbuhan yang berkesinambungan.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Pelestarian Lingkungan

Perusahaan selalu mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja serta pelestarian lingkungan. Perusahaan menyadari bahwa pengelolaan kesehatan dan keselamatan kerja yang prima dan tanggung jawab terhadap lingkungan sangat penting bagi keberhasilan perusahaan jangka panjang.

Perusahaan telah mengambil tindakan yang tepat untuk menghindari terjadinya kecelakaan dan gangguan kesehatan di tempat kerja. Perusahaan telah mengusahakan agar pegawai memperoleh tempat kerja yang aman dan sehat. Untuk maksud tersebut Perusahaan telah memastikan bahwa asset-asset dan lokasi usaha serta fasilitas lainnya, memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan persyaratan kesehatan dan keselamatan kerja serta pelestarian lingkungan.

Perusahaan juga memiliki kewajiban untuk senantiasa melengkapi dan menyediakan alat, sarana dan perlengkapan keselamatan dan kesehatan kerja agar seluruh surveyor dan inspektor dapat bekerja aman dan selamat. Dalam prakteknya, Perusahaan memiliki HSE (Health, Safety & Environment) Manual sebagai acuan dalam pelaksanaan dan pengendalian aspek Kesehatan, Keselamatan dan Perlindungan Lingkungan Kerja.

Pengadaan dan Hubungan dengan Rekanan

Perusahaan telah menerapkan proses pengadaan sesuai prinsip GCG, antara lain menjunjung prinsip-prinsip keter-

and all employees and related parties engaged in transactions that violate the law and principles. When these transactions are proven to occur, then each party which is directly involved will be given administrative sanction and demand in accordance with applicable law. Understanding that violate the law and principles of GCG is used to describe any business transaction categorized unlawful or contrary to the integrity of the company. Such transactions are, among others, giving or receiving bribes and gifts in an effort to influence decisions related to corporate business.

Relation with Shareholders

Company has made relation with the Shareholders in accordance with laws and regulations. Company always tries hard to give an optimal and sustainable contribution to the Shareholders. Company always tries to make sustainable growth.

Safety and Occupational Health and Environmental Conservation

Company always gives priority to safety, health and environmental conservation. The Company recognizes that the management of good occupational health and environmental responsibility is very important for long-term corporate success.

The Company has taken appropriate action to avoid accidents and health problems in the workplace. Company always makes sure that employees work in a safe and healthy workplace. For this purpose the Company has ensured that the asset, work location and other facilities, meet the applicable statutory regulations with respect to health and safety requirements and environmental conservation.

The Company also has an obligation to always complete and provide tools, facilities and safety and health equipment in order that all surveyors and inspectors can work securely and safely. In practice, the Company has HSE (Health, Safety & Environment) Manual as a reference in the implementation and control of Health, Safety and Environmental Protection Work aspects.

The process of Procurement and Relationship with Partners

The Company has implemented a procurement process in accordance with GCG, among others, upholding the

bukaan, kompetitif, fair dan dapat dipertanggung jawabkan (accountable). Proses pengadaan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk pengadaan barang dan jasa, Perusahaan memiliki peraturan yang jelas dan tertulis untuk menjamin bahwa pelaksanaan pengadaan barang dan jasa berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut diatas. Proses yang demikian akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan Perusahaan dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua rekanan untuk berkompetisi dalam proses pengadaan sesuai dengan kemampuan dan pengalaman mereka.

Dalam pemilihan rekanan untuk proses pengadaan tidak diperbolehkan menunjuk rekanan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan Komisaris, Direksi, pejabat ataupun personil di BKI. Selain itu dalam pemilihan barang atau rekanan, diupayakan semaksimal mungkin untuk mempergunakan produk Dalam Negeri dengan tetap mempertimbangan aspek kualitas, aspek finansial ekonomis serta selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Kemitraan dengan Masyarakat Sekitar

Perusahaan tanggap dan memperhatikan masalah-masalah masyarakat, khususnya yang tinggal dalam wilayah operasi Perusahaan. Perusahaan telah menegakkan komitmen bahwa dimanapun Perusahaan beroperasi hubungan baik dengan masyarakat sekitar merupakan landasan pokok bagi keberhasilan jangka panjang Perusahaan. Menyadari bahwa masing-masing masyarakat sekitar mempunyai karakteristik yang berbeda, sudah seharusnya Perusahaan berusaha memahami dan berinteraksi dengan masyarakat sekitar dan membantu masyarakat dengan cara yang wajar dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan serta ketentuan yang berlaku. Perusahaan sangat menghargai setiap aktivitas kemitraan yang memberikan kontribusi kepada masyarakat dan meningkatkan nilai sosial Perusahaan.

Penerapan Teknologi

Perusahaan selalu berupaya, mengadopsi teknologi dan standar yang diakui dalam mengembangkan dan mempublikasikan Rules & Regulation BKI sebagai acuan bagi BKI melakukan pelayanan jasa survey dan sertifikasi. Penerapan Teknologi Informasi juga telah dikembangkan dalam rangka peningkatan pelayanan jasa dan percepatan proses produksi serta pelaporan keuangan dan sistem pelaporan lainnya.

principles of openness, competitive, fair and accountable. The procurement process does not conflict with applicable legislation.

For goods and service procurement, the Company has clear, written rules to ensure that the implementation of the goods and service procurement in line with principles mentioned above. Such processes will provide maximum benefit for company interest and provide equal opportunity to all partners to compete in procurement process in accordance with their capabilities and their experience.

In choosing a partner for the procurement process, it was not allowed to appoint a partner that could cause conflict of interest with Board of Commissioners, Directors, officers or personnel in BKI. Also in the selection of goods or partner, sought as maximally as possible to use the product in the country by staying consider aspects of quality, economical and financial aspects so that do not conflict with legislation.

Partnership with Public Around

Company is responsive and paying attention to community issues, especially those who live in operation area. The Company has established a commitment that whenever the Company operates a good relationship with surrounding communities is a basic foundation for long term success of the Company. Realizing that each community has different characteristic, the company should try to understand and interact with surrounding communities and help people with a reasonable way by taking into account the ability of the Company and applicable regulations. Company appreciates any partnership activities that contribute to the community and enhance Company's social value.

Technology Application

The Company always strives to adopt technology and standards that are recognized in developing and publish BKI Rules & Regulations as a reference for BKI to conduct survey and certification services. The application of information technology has also been developed in order to improve service and production process acceleration and financial reporting and other reporting system.

Manajemen Risiko

Perusahaan menyadari sepenuhnya bahwa operasi Perusahaan tidak terbebas dari berbagai risiko, baik risiko yang berada di bawah kendali Perusahaan maupun risiko yang berada diluar kendali Perusahaan. Perusahaan telah mengendalikan dan meminimalkan risiko-risiko yang bersifat internal dengan menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential management) dan prinsip-prinsip manajemen risiko. Sedangkan risiko-risiko yang bersifat eksternal, Perusahaan berusaha mengidentifikasi secara seksama dan mengevaluasi peluang terjadinya dan dampaknya terhadap Perusahaan. Perusahaan melakukan identifikasi terhadap kemungkinan munculnya risiko-risiko baik eksternal maupun internal tersebut. Atas dasar identifikasi itu, Perusahaan melakukan upaya-upaya yang diperlukan untuk meminimalkan terjadinya risiko tersebut, dengan merancang kontrak sedemikian rupa sehingga secara legal Perusahaan terlindungi dari risiko yang tidak perlu atau dengan melakukan teknik analisis keuangan tertentu sedemikian rupa sehingga resiko yang mungkin timbul tidak mengurangi nilai perusahaan secara drastis. Namun demikian, perusahaan juga menyadari adanya risiko yang berada di luar kendali yang tidak dapat diminimalkan dampaknya oleh upaya-upaya internal.

Hubungan Dengan Pejabat Negara

Adalah kebijakan Perusahaan untuk mengembangkan dan memelihara hubungan baik dan komunikasi efektif dengan setiap jajaran Pejabat Negara yang memiliki wewenang pada bidang operasi Perusahaan dalam batas toleransi yang diperbolehkan oleh hukum.

Data Perusahaan dan Kerahasiaan Informasi

Catatan yang akurat dan terandalkan mengenai aktivitas usaha dan operasional Perusahaan telah dipelihara setiap waktu. Setiap pembayaran uang, pengalihan kepemilikan, penyelesaian pemberian layanan, dan transaksi lainnya harus terefleksikan secara penuh dan detail pada sistem akuntansi dan catatan bisnis Perusahaan. Semua pihak harus mengungkapkan semua informasi yang relevan dan bekerja sama sepenuhnya dengan auditor internal dan eksternal dalam proses audit kepatuhan atau penyidikan lainnya.

Kebijakan Perusahaan telah melarang Komisaris, Direksi dan karyawan untuk mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia mengenai Perusahaan atau pelanggan kepada pihak ketiga, baik didalam maupun diluar Perusahaan. Mengingat bahwa pengungkapan informasi rahasia tersebut dapat merugikan Perusahaan atau pelanggan dan memberikan keuntungan kepada pihak lain, maka pemberian informasi rahasia menurut keperluannya harus melalui persetujuan Direksi.

Risk Management

Company is fully aware that the company is not free from risk, whether risk is under control and the risks that are beyond the company's control. The Company has controlled and minimized the risk of internal activities by applying prudential management and risk management principles. Whereas external risks, the Company is carefully trying to identify and evaluate opportunities and their impact for the Company. Based on the basis of this identification, the Company made necessary efforts to minimize such risks, by designing contracts so that company is legally protected from unnecessary risks or to perform certain financial analysis techniques in such a way that risks that may arise does not reduce Company's value drastically. However, the Company is also aware of risks beyond the control of which can not be minimized its impact by the effort internally.

Relationship with State Officials

It is company policy to develop and maintain good relationships and effective communication with all levels of state officials who have authority in the field of company's operation within tolerance limits allowed by law.

Company Data and Information Confidentiality

Accurate and reliable records about company's business and operational activities has been maintained all times. Any payment of money, transfer of ownership, the completion of delivery services and other transactions should be reflected in full and in detail on accounting system and business records of the Company. All parties must disclose all relevant information and fully cooperate with internal and external auditors in compliance audit process or other investigation.

Company policy also prohibits Board of Commissioners, Directors and employees to disclose confidential information concerning the Company or its customers to third parties, both inside and outside the company. Considering that the disclosure of such confidential information could harm the Company or its customers and provide benefits to other parties, then the provision of confidential information should get the approval from Board of Directors.

Perusahaan juga bekerja dengan data khusus milik pelanggan, rekanan, dan mitra usaha. Hal ini merupakan kepercayaan yang sangat penting dan harus mendapatkan perhatian utama dari Perusahaan untuk menghargai kerjasama yang berkelanjutan dari pelanggan, rekanan, dan mitra usaha lainnya. Oleh karena itu tidak seorangpun boleh mengungkapkan informasi rahasia tersebut kepada pihak luar tanpa persetujuan Direksi atau pejabat yang ditunjuk oleh Direksi, atau tidak seorangpun boleh mengungkapkan informasi rahasia tersebut kepada yang lain kecuali berdasarkan kebutuhan kedinasan seperlunya.

Keterbukaan Informasi

Perusahaan telah mengungkapkan informasi penting dalam laporan tahunan dan laporan keuangannya kepada Pemegang Saham dan instansi Pemerintah yang terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara tepat waktu, akurat, jelas dan objektif.

Perusahaan menyampaikan informasi kepada khalayak umum, antara lain, melalui Website, Customer Meeting, Pertemuan Komite Konsultasi Klasifikasi Indonesia (K3I), Presentasi, BUMN online, Brosur, Company Profile, Annual Report dan Promosi di sejumlah media massa.

Karyawan dan Hubungan Industrial

Perusahaan telah mengembangkan kualitas sumber daya manusianya, sesuai dengan kebutuhan, visi dan misi, serta program jangka panjang Perusahaan.

Perusahaan mempunyai unit bisnis yang beroperasi di berbagai daerah dengan agama, budaya, tradisi, adat istiadat, kondisi karyawan serta peraturan setempat yang berbeda-beda. Meskipun peka terhadap perbedaan tersebut, Perusahaan tetap menerapkan prinsip-prinsip yang didasarkan pada ketentuan GCG. Direksi memperlakukan pegawai secara adil dan bebas dari bias karena perbedaan suku, asal-usul, kelompok, jenis kelamin, agama dan asal kelahiran serta hal-hal yang tidak terkait dengan kinerja dan indikator lain yang bersifat objektif. Perusahaan telah menetapkan beberapa kebijakan mengenai pegawai dan hubungan industrial, antara lain:

- Memberikan kondisi kerja yang baik dan aman bagi pegawai.
- Melindungi pegawai dari segala bentuk kemungkinan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan di tempat kerja.
- Memberikan hak kepada pegawai untuk berkumpul dan berserikat sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- Memberikan kesempatan kepada pegawai untuk

The company also works with special data of customers, suppliers and business partners. This is a very important trust and must receive primary attention from the company to appreciate the continuing cooperation of customers, suppliers and other business partners. Therefore, no person may disclose confidential information to outside parties without approval of Directors or officers appointed by Board of Directors, or no person may disclose confidential information to others except as necessary based on service needs.

Information Disclosure

The Company has revealed important information in annual report and financial report to shareholders and relevant government agencies in accordance with applicable laws and regulations in timely, accurate, clear and objective.

Company submitted information to public, among others, through the website (www.klasifikasiindonesia.com), customer meetings, meetings Classification Consultancy Committee of Indonesia (K3I), presentation, online State Owned Companies, brochures, company profile, annual report, exhibition and promotion in a number of mass media.

Personnel and Industrial Relation

The company has developed its human resources in accordance with needs, vision and mission, and company's long-term program.

The Company has business units that operate in various regions with different religion, culture, traditions, customs, employees' condition and local regulations. Although sensitive to these differences, the Company has adopted the principles based on GCG provision. Directors treat employees fairly and free from bias due to differences in ethnicity, origin, group, sex, religion and origin of birth and matters unrelated to performance and objective other indicators. The Company has established several policies related to personnel and industrial relations, among others:

- *Provided good and safety working conditions for employees.*
- *Protected employees from all forms of possibility that endanger the safety and health in workplace.*
- *Gave employees a right to assemble and association in accordance with applicable legislation.*

mengikuti pendidikan, pelatihan, dan pengembangan diri lebih lanjut yang sejalan dengan kompetensi yang bersangkutan serta sesuai dengan kebutuhan Perusahaan baik saat ini maupun pada masa yang akan datang.

- Mengusahakan agar skema remunerasi yang diterima pegawai, secara umum mengikuti peraturan/ketentuan yang berlaku dan sesuai kemampuan Perusahaan.
- Memberikan bonus dan insentif prestasi kepada pegawai sesuai kinerjanya.
- Direksi memiliki kewenangan penuh untuk bertindak tegas berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku dengan menjunjung prinsip-prinsip GCG terhadap pegawai yang terbukti menimbulkan keresahan, melanggar norma disiplin pegawai, dan merusak suasana kerja yang kondusif.

Pegawai juga memiliki berbagai kewajiban yang harus dipenuhi terhadap Perusahaan. Kewajiban Pegawai terhadap Perusahaan antara lain:

- *Setiap pegawai wajib mentaati Peraturan Pokok Kepegawaian (Perpok), Nilai-nilai Perusahaan dan semua peraturan yang dikeluarkan Perusahaan.*
- *Setiap pegawai wajib mendahulukan kepentingan Perusahaan yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan tanggung jawabnya.*
- *Setiap pegawai wajib mengerahkan segala daya dan upaya dalam melaksanakan tugas pekerjaan yang diserahkan kepadanya.*
- *Setiap pegawai wajib menjaga harta milik dan nama baik Perusahaan.*
- *Setiap pegawai yang menjadi atasan wajib membina dan memberikan teladan pada pegawai di lingkungan kerjanya.*

Pernyataan Palsu, Klaim Palsu, dan Konspirasi

Seluruh jajaran BKI yang berkaitan dengan tugas pemasaran, drawing approval, pelaksanaan survey dan inspeksi, proses sertifikasi, pembuatan kontrak / perjanjian dan administrasi keuangan termasuk akuntansi, telah menyadari pentingnya membuat pernyataan yang akurat dan klaim yang benar kepada Pimpinan, Pemerintah maupun kepada pihak lain. Hal ini mencakup setiap pernyataan lisan dan tertulis yang disampaikan kepada pimpinan pihak lain atau yang digunakan oleh Perusahaan. Kesengajaan menyampaikan pernyataan atau klaim yang tidak benar atau yang menyesatkan atau yang melibatkan adanya konspirasi dengan orang lain untuk merugikan pihak lain dapat mengakibatkan dikenakannya hukuman administratif, pidana, perdata bagi personil yang bersangkutan dan pihak lain yang terlibat, termasuk mitra kerja Perusahaan dan pegawainya.

- *Provide opportunities for employees to participate in education, training and further development in line with relevant competence and in accordance with the Company's needs both present and future.*
- *Ensured that employees received remuneration schemes, generally follow the applicable rules / regulations and in accordance with company's ability.*
- *Provide incentives and performance bonuses to employees based on performance.*
- *Board of Directors has full authority to act in strict accordance with applicable provisions and regulations to uphold GCG principles to employees who are proven to cause restlessness, violating the norms of discipline of employees, and damaging conducive working atmosphere.*

Employees also have various obligations that must be fulfilled to the Company, among others:

- *Every personnel shall obey the Principal Civil Service Regulation, Company values and all regulations issued by the Company.*
- *Every personnel shall prioritize company interest which relates directly or indirectly with their responsibilities.*
- *Every personnel shall mobilize all resources and efforts in implementing the job tasks entrusted to them.*
- *Every personnel shall maintain the property and good name of the Company.*
- *Every personnel who became a supervisor shall develop and provide an example of employees in work environment.*

False Statement, False Claims, and Conspiracy

Whole range of BKI related to marketing tasks, drawing approval, execution of survey and inspection, certification process, the making of contracts / agreements and financial administration including accounting, have realized the importance of making an accurate statement, and right claim to the Chairman, Government or to any other party. This includes any verbal or written statement submitted to the other party or used by the Company. Intentionality in submitting a statement or claim that is untrue or misleading or which involve any conspiracy with others to harm the other party could result in administrative punishment, criminal, civil liability for the relevant personnel and other parties involved, including partners of the Company and its employees.

Benturan Kepentingan

BKI mendefinisikan benturan kepentingan sebagai situasi terjadinya pertentangan kepentingan pribadi Dewan Komisaris, Direksi, atau karyawan dengan kepentingan Perusahaan. Benturan ini dapat melibatkan kepentingan pemakai jasa, instansi lain yang berkepentingan dengan jasa BKI, rekanan, karyawan (pensiunan, aktif, atau calon karyawan) atau bahkan anggota masyarakat di tempat Perusahaan beroperasi.

Terdapat dua prinsip utama yang telah diikuti untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan dan implikasi lanjutan yang sering ditimbulkannya:

1. Tidak memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi dan atau untuk kepentingan orang dan atau pihak lain yang terkait.
2. Menghindari setiap aktivitas di luar dinas yang dapat berpengaruh secara negatif terhadap independensi dan objektivitas pertimbangan dalam pengambilan keputusan; aktivitas dimaksud tentunya merupakan aktivitas yang dapat bertentangan dengan kinerja jabatan atau yang dapat merugikan citra dan reputasi Perusahaan.

Benturan Kepentingan dalam Keputusan Hasil Survey/Inspeksi

BKI sebagai Perusahaan yang memprioritaskan aspek keselamatan telah menyadari bahwa hasil survey, laporan, dan sertifikat yang diterbitkan mempunyai implikasi terhadap aspek keselamatan yang diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain pemilik kapal, pemilik cargo, asuransi, galangan, penumpang, awak kapal, Pemerintah, dan masyarakat umum secara luas. Untuk itu seluruh jajaran Direksi, para Kepala Divisi, Kepala Satuan, Kepala Unit Produksi dan Wakilnya, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Surveyor, Inspektur dan staf teknik Kantor Pusat selalu menjaga independensinya dalam pengambilan keputusan, memberikan rekomendasi, keputusan hasil survey, dan pembuatan laporan. Apabila terjadi benturan kepentingan, maka pertimbangan aspek keselamatan adalah mutlak menjadi prioritas utama dengan mengacu peraturan dan regulasi yang berlaku.

Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Dewan Komisaris, Direksi, Manajemen, dan Karyawan tidak boleh berpartisipasi dalam setiap kegiatan pengadaan yang melibatkan suatu Perusahaan dimana yang bersangkutan atau keluarga yang bersangkutan mem-

Conflict of Interest

BKI defines a conflict of interest as a situation of conflict of personal interest for commissioners, directors, or employees with company interest. This conflict can involve interest of service users, other agencies concerned with BKI services, partners, employees (retired, active or prospective employees), or even members of community in which it operates.

There are 2 (two) main principles that have been followed to prevent conflict of interests and are often caused further implications:

1. *Not utilize the function in office for personal benefit or for benefit of people and or other related party.*
2. *Avoid any activity outside agencies that can influence negatively on the independence and objectivity in decision-making consideration. Activity is certainly an activity that may conflict with job performance or that could harm the image and reputation of the Company.*

Conflict of Interest in Survey / Inspection Decision

BKI as a company that prioritizes the safety aspect has realized that the survey results, reports and certificates issued have implications for safety aspects required by parties concerned, including ship owners, cargo owners, insurance, shipbuilding, passengers, crew, Government, and public. For that all Directors, Heads of Division, Head of Unit, Head of Production Unit and Deputy, Head of Department, Head of Division, Surveyors, Inspectors and Headquarters technical staff always maintain their independence in decision making, decision recommending the survey results and preparing reports. In the event of a conflict of interest, then consideration of safety absolutely becomes priority in accordance with applicable rules and regulations.

Conflict of Interest in Goods Procurement

Board of Commissioners, Directors, Management and Employees must not participate in any procurement activity involving the company where the individual or family concerned have an interest or significant share

punya andil atau kepemilikan saham yang signifikan, atau mempunyai kepentingan finansial tertentu. Adapun yang dimaksud dengan berpartisipasi dalam proses pengadaan adalah:

- Mengundang, memberikan persetujuan, atau membahas pekerjaan di masa mendatang dengan kontraktor dan pemasok yang berkompetisi, yaitu setiap entitas usaha yang kemungkinan di masa mendatang dapat menjadi pesaing atau pemenang kontrak dari Perusahaan.
- Meminta atau menerima uang, pemberian/hadiah, atau hal-hal lain yang bernilai, baik secara langsung maupun tidak langsung dari kontraktor dan pemasok yang berkompetisi.
- Berusaha untuk memperoleh atau mengungkapkan informasi yang terkait dengan proses pengadaan, dan sebaliknya. Pemasok barang dan jasa/kontraktor yang diundang untuk berpartisipasi dalam proses pengadaan harus memenuhi persyaratan menghindari benturan kepentingan yang sama sebagaimana yang diberlakukan pada Komisaris, Direksi, Manajemen dan karyawan Perusahaan.

Benturan Kepentingan dengan Aktivitas Sampingan

Dewan Komisaris, Direksi, Manajemen, dan karyawan dapat diizinkan melakukan aktivitas lain di luar jam kerja yang telah ditetapkan, dengan syarat bahwa aktivitas tersebut tidak menimbulkan benturan kepentingan dengan kepentingan Perusahaan dan atau aktivitas tersebut tidak menurunkan kemampuan untuk memenuhi tugas yang telah diamanatkan. Keterlibatan dalam aktivitas lain di luar Perusahaan tidak boleh mengurangi independensi dan objektivitas dalam mengambil keputusan atau mempengaruhi efektivitas dan ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan karyawan yang bersangkutan.

Setiap karyawan harus menjunjung tinggi standar kinerja tanpa terkecuali dan sedapat mungkin bertindak objektif dan independen dalam setiap kegiatan sehari-hari. Apabila kemudian Direksi dan atau karyawan Perusahaan merasakan kemungkinan timbulnya benturan kepentingan dalam kegiatan yang dilaksanakan, maka yang bersangkutan wajib memberitahukan hal tersebut secara tertulis kepada Direksi. Permohonan izin untuk melakukan aktivitas sampingan harus disampaikan dan mendapatkan persetujuan dari Pejabat yang berwenang yang ditunjuk sebelum karyawan yang bersangkutan menjalankan pekerjaan sampingan tersebut atau melakukan kegiatan konsultasi selepas kerja apabila terjadi salah satu atau lebih dari beberapa hal-hal berikut:

ownership or has certain financial interest. As it meant by participating in procurement process are:

- Invite, give approval or discuss future employment with contractors and suppliers who compete, which is any business entity which that in the future can be a competitor or winning a contract from the company.
- Solicit or accept money, gift or other things of value, either directly or indirectly from competing contractors and suppliers.
- Try to obtain or disclose information related to the procurement process and vice versa. Suppliers of goods and services (contractors) who are invited to participate in the procurement process must meet the requirements to avoid conflicts of similar interest as that imposed on Board of Commissioners, Directors, management and employees.

Conflict of Interest by Side Activity

Board of Commissioners, Directors, management and employees may be allowed to do other activities outside working hours determined by the requirement that such activities do not cause conflict of interests with company interest and / or the activity does not reduce the ability to fulfill the tasks that have been mandated. Involvement in other activities outside the Company may not reduce the independence and objectivity in making decision or influence the effectiveness and timeliness of work completion of those employees.

Each personnel must uphold the standards of performance, without exception, and wherever possible to act objectively and independently in each of their daily activities. If then the Directors and / or employees of the company felt the possibility of conflict of interest in activities conducted, then the concerned shall notify it in writing to Board of Directors. The allowance to perform sideline activities must be submitted and approved by appointed authorized officer before the relevant employees run jobs or consultancy activities after work in the event of one or more of the following:

1. Terdapat kemungkinan benturan kepentingan.
2. Aktivitas luar dinas tersebut merupakan hasil pengetahuan yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung dengan pekerjaan di Perusahaan.
3. Aktivitas luar dinas tersebut merupakan aktivitas yang tumpang tindih dengan hari dan jam kerja Perusahaan.
4. Aktivitas tersebut melebihi enam jam kerja pada suatu hari kerja tertentu atau lebih dari 20 jam kerja pada minggu kerja tertentu.
5. Dapat mengganggu kepentingan Perusahaan dan atau tugas dan tanggung jawab pokok karyawan yang bersangkutan.

Penyelewengan, Penyimpangan dan Sejenisnya

Perusahaan telah menetapkan kebijakan untuk melarang setiap bentuk penyelewengan dan penyimpangan serta senantiasa menerapkan prosedur yang wajib ditaati dan diikuti berkaitan dengan temuan, pengakuan, pelaporan, penyelidikan dan penyidikan terhadap kecurigaan adanya penyelewengan dan penyimpangan.

Penyelewengan dan penyimpangan yang dimaksud adalah:

- Pelanggaran terhadap peraturan perusahaan.
- Melakukan ketidakjujuran atau kebohongan berkaitan dengan pelaksanaan tugas pekerjaan.
- Melakukan penggelapan, penghilangan, atau pemindahtanganan segala sesuatu yang dapat merugikan perusahaan secara langsung maupun tidak langsung.
- Melakukan pemalsuan atau manipulasi surat berharga perusahaan seperti cek, giro, sertifikat dan lain-lain.
- Menyalahgunakan aset perusahaan.
- Melakukan pengalihan kas, surat berharga atau aset perusahaan untuk penggunaan atau kepentingan pribadi.
- Melakukan penanganan dan pelaporan transaksi bisnis dan keuangan perusahaan yang tidak sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku.
- Melakukan pemalsuan atas catatan akuntansi perusahaan atau laporan keuangan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lain yang merugikan perusahaan baik langsung maupun tidak langsung.

1. *There is a possibility of conflict of interest.*
2. *The activities outside the company come from the knowledge gained both directly and indirectly with the work within the company.*
3. *Outside activities are activities that overlap with company working hours.*
4. *Such activities exceed 6 (six) hours of work on a particular workday or more than 20 (twenty) hours of work on a particular work week.*
5. *May interfere the company interest and / or duties and responsibilities of those employees.*

Fraud, irregularities and kinds

The Company has established a policy to prohibit any form of fraud and irregularities and continue to implement procedures that must be obeyed and followed related to finding, recognition, reporting, inquiry and investigation on suspicion of fraud and irregularities.

Fraud and irregularities referred are:

- *The violation of company rules.*
- *Conduct of dishonesty or deceit related to job duties.*
- *Conduct fraud, omission, or alienation of everything that could hurt the company directly or indirectly.*
- *Conduct fraud or manipulation of company's securities such as checks, demand deposits, certificates and others.*
- *Abuse of company assets.*
- *Transfer cash, securities or assets of the company for personal use or interest.*
- *Conduct the handling and reporting of business and financial transaction of the company that do not comply with the procedures and regulations.*
- *Perform falsification of accounting records or Company's financial statement for personal interests or other interests that can harm the company either directly or indirectly.*

Kinerja Keuangan Financial Performance



Laporan keuangan konsolidasi BKI yang telah diaudit dalam Laporan Tahunan ini disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

BKI consolidated financial statement already audited in this Annual Report shall be prepared based on the generally applicable accountancy standards in Indonesia.

1. Laba Rugi

a. Pendapatan

Pendapatan Usaha perusahaan pada tahun 2010 mengalami pertumbuhan sebesar 19,27% dibandingkan dengan tahun 2009. Kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan usaha berasal dari pertumbuhan pendapatan segmen Klasifikasi & Statutoria sebesar 20,00% dan pendapatan segmen Konsultasi & Supervisi sebesar 18,01%.

Pendapatan netto tahun 2010 sebesar Rp 282,2 milyar atau 6,72% dihadapkan dengan anggarannya Rp 264,5 milyar. Terlampauinya realisasi pendapatan tahun 2009 dihadapkan dengan anggarannya disebabkan antara lain:

- Beberapa perusahaan/pemilik kapal sudah muBeberapa perusahaan/pemilik kapal sudah mulai mengindahkan Inpres no. 5/2005 dan keputusan Menteri Perhubungan no. KM.20/2006 dengan mengklaskan kapalnya kepada BKI.
- BKI semakin dipercaya sebagai badan klasifikasi nasional dan pelayanan BKI dirasakan semakin membaik.
- Tarif jasa BKI dirasakan oleh pemilik kapal / Perusahaan yang relatif kompetitif.
- Meningkatnya survey kapal di luar negeri dimana terjadi kelebihan ruang muat kapal dan kesulitan likuiditas perusahaan pelayaran asing sehingga mereka menjual kapal dengan murah

1. Profit-Loss

a. Revenue

The company's operating revenue in 2010 increases by 19,27% compared to 2009. Contribution to revenue growth comes from Classification & Statutory segment by 20,00% and Consultation & Supervision segment by 18,01%.

Net income in 2010 amounted to Rp 282.2 billion or 6.72% are faced with a budget of Rp 264.5 billion. Exceeding revenues in 2009 are faced with its budget due to, among other things:

- *Some companies / ship owners have started to heed the Presidential Instruction no. 5 / 2005 and the decision of the Minister of Transport no. Mengklaskan KM.20/2006 with his ship to the BKI.*
- *BKI increasingly believed to be the national classification bodies and service BKI felt much improved.*
- *BKI service tariff is perceived by the shipowner / company that is relatively competitive.*
- *Increasing survey ship overseas where there is excess cargo ships and foreign shipping companies liquidity problem so that they sell the ship with that used by pengusahaan cheap shipping to buy*

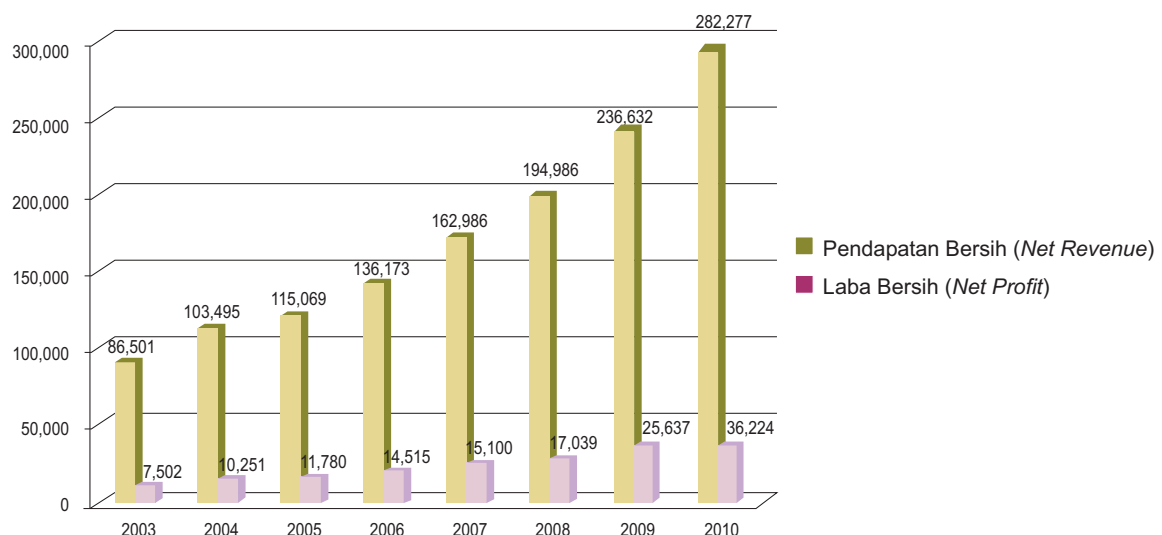
yang dimanfaatkan oleh perusahaan pelayaran untuk membeli kapal bekas sebagai antisipasi diterapkan azas cabotage.

- kesulitan likuiditas perusahaan pelayaran asing sehingga mereka menjual kapal dengan murah yang dimanfaatkan oleh pengusaha pelayaran untuk membeli kapal bekas sebagai antisipasi diterapkan azas cabotage.
- b. **Beban Usaha**
Realisasi beban usaha tahun 2010 sebesar Rp 234,5 milyar atau 7,44% dihadapkan dengan anggaran sebesar Rp 218,3 milyar dan mengalami pertumbuhan sebesar 17,83% dibandingkan tahun 2009.
- c. **Laba Usaha**
Realisasi laba usaha mencapai Rp 47,7 milyar (3,34%) dihadapkan dengan anggarannya sebesar Rp 46,2 milyar. Pertumbuhan laba usaha perusahaan pada tahun 2010 mencapai 17,83% dibandingkan laba usaha pada tahun 2009. Sehingga laba bersih setelah pajak mencapai Rp 36,2 milyar atau tumbuh 41,23% dari laba bersih tahun 2009.
- d. **Operating Ratio** sebesar 83,10% atau 0,56% di atas anggaran sebesar 82,54%.

a secondhand boat in anticipation of the principle applied to cabotage.

- liquidity of foreign shipping companies so that they sell cheap ship to be used by employers to buy used ships sailing in anticipation of the principle applied to cabotage.
- b. **Operating Expenses**
Realization of operating expenses in 2010 is Rp 234.5 billion or 7.44% compared to budget of Rp 218.3 billion and increases by 17.83% compared to 2009.
- c. **Operating Income**
Realization of operating income is Rp 47.7 billion (3.34%) compared to budget of Rp 46.2 billion. The increase in company's operating income in 2010 reaches 17.83% compared to 2009. Therefore, earning after tax reaches Rp 36.2 billion or grows 41.23% compared to 2009.
- d. **Operating Ratio** is 83.10% or 0.56% above budget of 82.54%.

NET REVENUE & NET PROFIT (2003-2010) in million rupiah



2. Rasio Keuangan

- a. **Rasio Likuiditas**
- Rasio lancar tahun 2009 sebesar 270,56% lebih tinggi dari rasio lancar tahun 2008 sebesar 219,50%.

2. Financial Ratio

- a. **Liquidity Ratio**
- The current ratio of 270,56% in 2009 is higher than the current ratio of 219,50% in 2008.

- Rasio kas tahun 2009 sebesar 59,41% dan tahun 2008 sebesar 43,00%. Ini menunjukkan ada peningkatan dalam penyediaan kas untuk pembiayaan operasional dan atau pembayaran kewajiban jangka pendeknya.
- b. Solvabilitas
- Total Debt to Equity Ratio tahun 2009 sebesar 29,02% dan tahun 2008 sebesar 38,89%. Mengingat hutang yang ada tidak menimbulkan beban bunga (hanya hutang transaksi operasi/dagang), maka adanya hutang tersebut sangat mendukung dalam penyediaan modal kerja serta berpeluang meningkatkan laba perusahaan.
- c. Return on Investment Ratio (ROI)
- Return on Investment Ratio tahun 2010 sebesar 34,94% dan tahun 2009 34,27%.
- d. Aktivitas
- Total Asset Turn Over
Perputaran asset pada tahun 2010 untuk meraih pendapatan adalah sebesar 1,72 kali atau turun 0,16 kali dari TATO tahun 2009 sebesar 1,88 kali.
 - Collecting Period
Rata-rata hari pencairan piutang tahun 2010 selama 77 hari atau 5 hari lebih lambat dari pencairan tahun 2009 sebesar 72 hari.

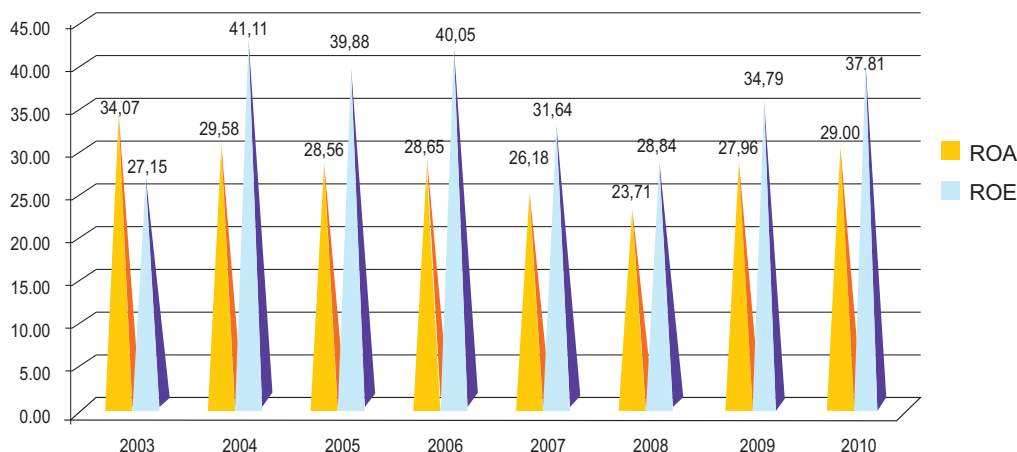
- *Cash ratio is 59,41% in 2009 and 43,00% in 2008. This shows that there is increase in available cash for operational financing and or payment of short term liabilities.*

- b. Solvability Ratio
- Total Debt to Equity Ratio in 2009 is 29,02% and in 2008 is 38,89%. Considering that the existing loans do not accrue interest expense (only operating/commercial transaction loans), they will really support in making working capital available and providing opportunity to increase company's income.*
- c. Return on Investment Ratio (ROI)
- Return on Investment Ratio in 2010 is 34,94% and in 2009 is 34,27%*
- d. Activities
- Total Asset Turn Over
Total Asset Turn Over in 2010 is 1.72, decreasing from 2009 which was 1.88.
 - Collecting Period
Collecting period in 2010 is 77 days or 5 days slower than in 2009 which was 72 days.

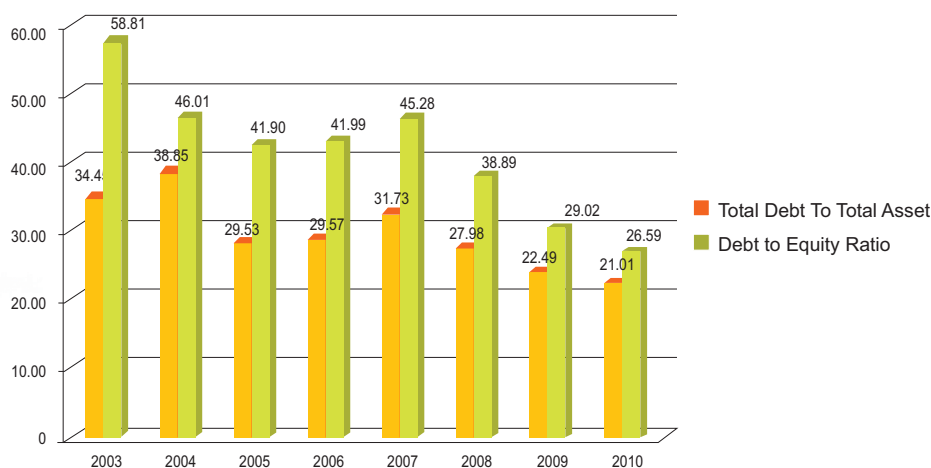
Dari rasio-rasio di atas terlihat bahwa likuiditas Perusahaan tahun 2010 meningkat dibandingkan dengan tahun 2009. Hal ini disebabkan upaya melakukan efisiensi dalam menggunakan dana untuk membiayai operasional dan investasi. Ditinjau dari solvabilitas menunjukkan kondisi financial Perusahaan cukup aman dengan hutang-hutangnya dijamin modal sendiri serta Perusahaan mampu meningkatkan laba

From the above ratios, it seems that company's liquidity in 2010 increases compared to 2009. This result from the efforts to utilize fund in more efficient way for operational and investment. Viewed from solvability aspect, it is considered that the financial condition of the company is sufficiently safe because the company's loans are equity secured and company can increase its income.

ROA/ROE (2003-2010)



Total Debt to Total Asset (2003-2010) Debt to Equity Ratio (2003-2010)



3. Tingkat Kesehatan Perusahaan

Kriteria penilaian Perusahaan didasarkan pada SK Menteri Negara BUMN RI no. Kep-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002. Materi yang dinilai mencakup:

- Aspek keuangan
- Aspek operasional
- Aspek administrasi

3. Company's Health Level

Criteria used to evaluate Company's health level is in accordance with Decree of State Minister for State-Owned Enterprise (BUMN) of ROI no. Kep-100/MBU/2002 dated 4 June 2002. The materials to be evaluated include:

- Financial aspect
- Operational aspect
- Administrative aspect.

Summary of Balance Sheet in million rupiah

No	Description	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
I	ASSETS								
1	Current Assets								
	- Cash & Bank	4.639	7.565	9.268	9.924	6.798	11.379	14.787	35.331
	- Accounts Receivable	19.689	19.363	22.884	26.137	37.673	43.630	50.003	59.648
	- Other Current Assets	744	1.823	2.581	4.396	9.294	3.085	2.548	3.451
2	Fixed Assets	16.948	18.740	22.055	29.738	35.923	45.812	59.299	66.687
3	Other Assets	2.721	1.893	1.841	1.864	1.640	1.821	1.594	2.011
	TOTAL ASSETS	44.741	49.384	58.629	72.059	91.330	105.727	128.231	167.127
II	LIABILITIES								
1	Short Term Liability	16.371	14.686	15.618	19.527	26.743	26.466	24.888	30.195
2	Long Term Liability	532	1.356	1.694	1.783	2.232	3.139	3.957	4.913
3	Equity	28.838	33.342	41.317	50.749	62.354	76.122	99.386	132.019
	TOTAL LIABILITIES	44.741	49.384	58.629	72.059	91.330	105.727	128.231	167.127

**Summary of Income
in million rupiah**

No	Description	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
I	Net Income								
A	Classification	59.422	69.364	72.197	84.251	101.801	119.389	150.035	180.036
B	Consultancy & Supervision	27.079	34.131	42.872	51.922	61.185	75.597	86.597	102.191
	Total (I)	86.501	103.495	115.069	136.173	162.986	194.986	236.632	282.227
II	Operation Expenses								
A	Service Expense	45.741	59.913	68.826	80.998	99.131	122.951	136.369	162.608
B	Marketing Expense	1.572	2.223	2.501	2.826	2.896	3.408	3.934	4.969
C	Administration & Overhead	28.266	16.873	27.299	31.399	36.840	43.972	58.730	66.940
	Total (II)	75.579	89.009	98.626	115.203	138.867	170.331	199.033	234.518
III	Net Operation Income (I-II)	10.922	14.486	16.443	20.970	24.118	24.655	37.599	47.709
IV	Other Incomes (Expenses)	(71)	(1.083)	303	(325)	(1.766)	414	(1.746)	752
V	Profit Before Tax	10.851	13.403	16.746	20.645	22.352	25.069	35.853	48.461
VI	Tax	(3.349)	(3.152)	(4.966)	(6.130)	(7.252)	(8.031)	(10.203)	(12.237)
VII	Profit After Tax	7.502	10.251	11.780	14.515	15.100	17.039	25.650	36.224

Financial Ratio

No	Description	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	
I	PROFITABILITY								
	ROA	34.07	29.58	28.56	28.65	26.18	23.71	27.96	29,00
	ROE	27.15	41.11	39.88	40.05	31.64	28.84	34.79	37,81
	Operating Ratio (%)	90.44	86.00	85.71	84.60	85.23	87.36	84.11	83,10
	Net Profit Margin (%)	8.67	9.64	10.24	10.65	10.23	8.74	10.84	12,84
II	ACTIVITY								
	Collecting Period (days)	80	68	72	65	71	75	72	77
	Fixed Assets Turnover (x)	5.29	5.52	5.22	5.07	5.11	2.62	4.08	4,34
III	LIQUIDITY								
	Current Ratio	153.15	195.77	222.39	207.18	204.50	219.50	270.56	325,98
	Cash Ratio	28.34	51.51	59.34	50.82	25.87	43.00	59.41	117,01
IV	CAPITALIZATION								
	Total debt/Total Asset (%)	35.45	38.85	29.53	29.57	31.73	27.98	22.49	21,01
	Debt/Equity (%)	58.81	46.01	41.90	41.99	45.28	38.89	29.02	26,59

Key Performance Indicator (KPI) year 2010

No.	Indikator	Bobot	Satuan	Target	Real.	R/T	Skor	Skor KPI
A.	KPI Operasional							
	1. Kecepatan rata-rata penyelesaian laporan survey	10	Hari	25	17	147	197	19,7
	2. Kecepatan rata-rata penyelesaian drawing approval	10	Hari	45	26	173	200	20
	3. Kecepatan rata-rata penyelesaian laporan K&S	5	Hari	20	10	200	200	10
	4. Jumlah proyek yang dimenangkan dari total tender yang diikuti	10	%	50	35	70	45	4,5
	5. Pelanggan baru segmen K&S dengan nilai pekerjaan > Rp 100 juta	10	Kontrak	30	26	87	74	7,4
	6. Realisasi investasi	5	%	100	44,11	44,11	22	1,1
		50						62,70
B.	KPI Financial							
	1. Profit Margin Klas	5	%	20,36	23,38	115	137,5	6,88
	2. Profit Margin K&S	5	%	13,36	5,32	40	13	0,65
	3. Collecting Period	7,5	Hari	67	77	87	74	5,55
	4. Return On Assets	7,5	%	28,82	29	100	100	7,5
	5. Operating Ratio	5	%	83	83,10	100	100	5
		30						25,58
C.	KPI Dynamics							
	1. Jumlah program diklat	2,5	Program	27	27	100	100	2,5
	2. Jumlah personel yang mengikuti diklat	2,5	Orang	434	581	134	178	4,45
	3. Nilai GCG (*)	5	-	75	73	97	94	4,7
	4. Mendapatkan sertifikat ISO 9001: 2008	5	-	100	100	100	100	5,0
	5. Diversifikasi usaha	5	-	100	100	100	100	5,0
		20						21,65
		100						109,93

Dewan Komisaris, Direksi dan Staf Board of Commissioners, Director & Staff

Board of Commissioner	Chairman	:	Abdul Gani
	Commissioner	:	Riyadi Widiasmoro Liliek Mayasari
Board of Director	President Director	:	Purnama SM
	Technical & Development Director	:	Ajatiman
	Operating & Marketing Director	:	S. Dangkung
Staff	Finance & Personnel Director	:	Edy Cahyono
	Head of Planning Unit	:	Saifuddin Wijaya
	Head of Internal Control Unit	:	Herman Yuska
	Head of Quality Assurance Unit	:	Zilzal HM
Technical Staff	Head of R&D Unit	:	Hadi Sutrisno
	Head of Survey Division	:	Muardy Kobandaha
	Head of Statutory Division	:	Joelianoro
	Head of Machinery & Electrical Division	:	Agus Widjaja
	Head of Hull & Material Division	:	Bambang Tri Suharto
	Head of C&S Division	:	Arsalnan Latief
	Head of Class Admission Dept.	:	Heintje Angganois
	Head of Class Maintenance Dept.	:	Totok Achmad
	Head of Monitoring & Register Dept.	:	Agung Wicaksono
	Head of Solas & Marpol Dept.	:	Heru Widodo
	Head of Load Line & Cargo Gear Dept.	:	Wasito Abdul Mukit
	Head of Machinery Dept.	:	Sugeng Yulianto
	Head of Electrical Dept.	:	Agus Salim
	Head of Industrial Service	:	Salvinus Patangke
	Head of Hull Dept.	:	Soedjarwoko
	Head of Welding & Material Dept.	:	Romy Lesmana
	Head of C&S Marketing Dept.	:	Heri Sudrajat
	Head of Control of C&S Prod. Dept	:	Agung Prihanto
Administration Staff	Head of Finance Division	:	Taufik Hidayat
	Head of Personnel & GA Division	:	Asep Sutrisna S.
	Head of Accounting Dept.	:	R. Sudaryo
	Head of Financial Adm. Dept.	:	Risa Afriana R.
	Head of Personnel & Training Dept.	:	Nasaruddin
	Head of General Affair Dept	:	Koko Kusnadi
	Head of Legal & Public Relations Dept.	:	Yuniati
	Head of Information System Dept.	:	Diding Suwandi
Branch Manager	Head of Program & Budgeting Dept.	:	Sudirman
	Head of C&S Unit	:	Yansen Miri
	Head of Ambon Branch Office	:	Sigit Prastowo
	Head of Balikpapan Branch Office	:	Nurdin Gading
	Head of Banjarmasin Branch Office	:	Yunasri Zainal
	Head of Belawan Branch Office	:	Alfonsus Susilarso
	Head of Batam Branch Office	:	Pardy Abbas
	Head of Bitung Branch Office	:	Doni Tri Susilo
	Head of Cigading Branch Office	:	Edy Sutrisno
	Head of Cirebon Branch Office	:	Farid Rahman Rahim
	Head of Dumai Branch Office	:	Suwandi
	Head of Jambi Branch Office	:	Endro Djoko Saputro
	Head of Makassar Branch Office	:	Syahrudin Nur
	Head of Palembang Branch Office	:	Nurdin Gading
	Head of Pontianak Branch Office	:	Syamsul Bachri
	Head of Pekanbaru Branch Office	:	Rusdin Halludin
	Head of Semarang Branch Office	:	Bambang Noeljanto
	Head of Singapore Branch Office	:	Arief Nurtjahyo
	Head of Sorong Branch Office	:	Pieter Petrus Paulus
	Head of Surabaya Branch Office	:	Priyo Santosa
	Head of Tanjung Priok Branch Office	:	Mohammad Cholil

Komite Konsultansi Klasifikasi Indonesia (K3I)

The Consultative Committee Of Indonesian Classification

Chairman: Harijogi

Deputy: Iskendar, MS

Secretary: Hadi Sutrisno

Technical Committee

Head: Eko Panunggal

Members:

Tjuk Sukardiman	Iskendar, MS
Teguh Sastrodiwongso	Santoso
Samudro	Andy A. Malian
Petrus Paranoan	Naufal Bahreisy
Johnson W. Sutjipto	Imam K. Reksowardojo
Wing Wirjawan	Soegiono
Ferry Andrianz	Amir Gunawan
Amrullah Pase	Firmansyah
Dharma Manullang	Rochim Irawadhy
Muhammad Affandi	M. Moenir

Operational Committee

Head: Harijogi

Member:

Joeswanto Karijodimejo	Tjahyo Widono
ING Putu Suryawirawan	Yamin Jinca
Sayogyo Kartoleksono	Bambang Ediyanto
Syahroel Ong	Djoko Tahono
Djoko Mulyanto	Oentoro Surya
Heriyanto	Charles Menaro

Statutoria

Government	Type of Cooperation
Government of Republic of Indonesia (Sea Communication)	Authorization
Government of Mongolia (Mongolia Maritime Administration/MMA)	Authorization

Classification

Classification Bureau	Type of Cooperation
American Bureau of Shipping (ABS-USA)	Dual Class
Bureau Veritas (BV-France)	Dual Class
China Classification Society (CCS-China)	Mutual Representative
Det Norske Veritas Classification AS (DnV-Norway)	Dual Class
Germanischer Lloyd (GL-Germany)	Mutual Representative
Hellenic Register of Shipping (HRS-Greece)	Mutual Representative
Indian Register of Shipping (IRS-Indian)	Mutual Representative
International Register of Shipping (IRS)	Mutual Representative
Korean Register of Shipping (KRS)	Mutual Representative
Korean Classification Society DPR of Korea (KCS-DPR of Korea)	Mutual Representative
Lloyd's Register of Shipping (LR-UK)	Dual Class
Nippon Kaiji Kyokai (NK-Japan)	Mutual Representative
Rinave Portuguesa (Portugal)	Mutual Representative
Ships Classification Malaysia (SCM-Malaysia)	Mutual Representative
China Cooperation of Shipping (CCS)	Mutual Representative
Vietnam Register (VR-Vietnam)	Mutual Representative
Italian Register of Shipping (RINA)	Dual Class

Consultancy & Supervision

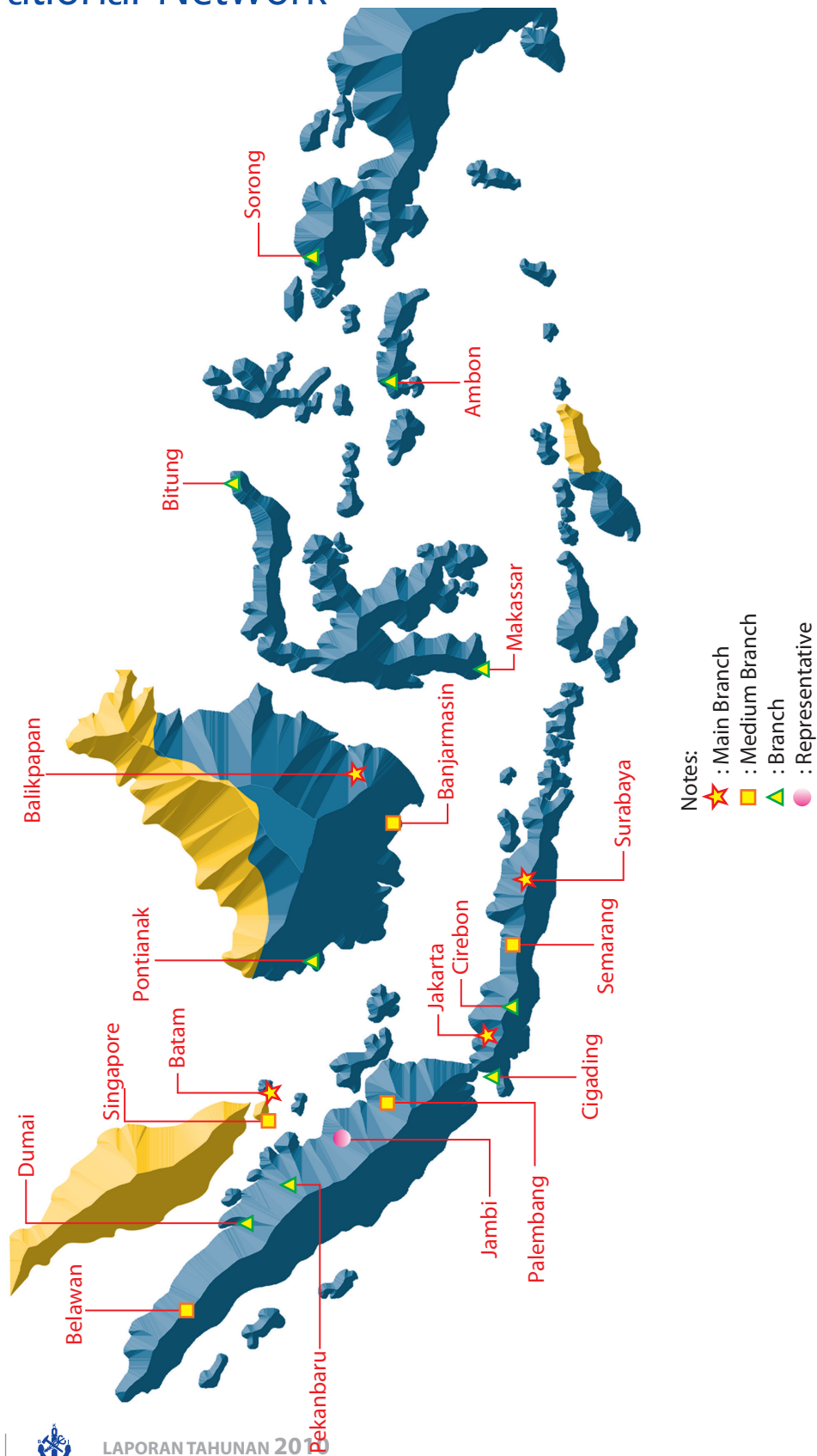
Organization	Type of Cooperation
Det Norske Veritas (DnV-Norway)	Offshore Services
Korean Register of Shipping (KRS-ROK)	Industrial Inspection
TUV Rheinland (Germany)	Industrial Inspection
TUV Nord (Germany)	Industrial Inspection
Germanischer Lloyd (GL Germany)	Industrial Inspection
PT. ASDP	-Ship Maintenance Supervision -Employee Education & Training
PT. PELINDO I	
Metal Performance Assessment Group (MPAG)	Engineering Consulting
PT. Dirgantara Indonesia	HRD and Testing Laboratory
Insurance Consortium	Assets Protection Insurance Program
PT. Enggong Sayap Perkasa (ESP)	Inspection & NDT In Oil and Gas Sector

Research & Development

Institution
Technological Development & Application Agency (BPPT)
Centre of Oil and Natural Gas Energy Development (PPT MIGAS)
Office of Technical Materials and Objects Research and Development (B4T)
National Atomic Energy Body (BATAN)
Research Laboratory of ITB (LAPI ITB)
Institute of Technology Sepuluh Nopember Surabaya (ITS)
University of Hasanuddin (UNHAS)
University of Indonesia (UI)
Indonesian Corrosion Association

Jaringan Operasional

Operational Network



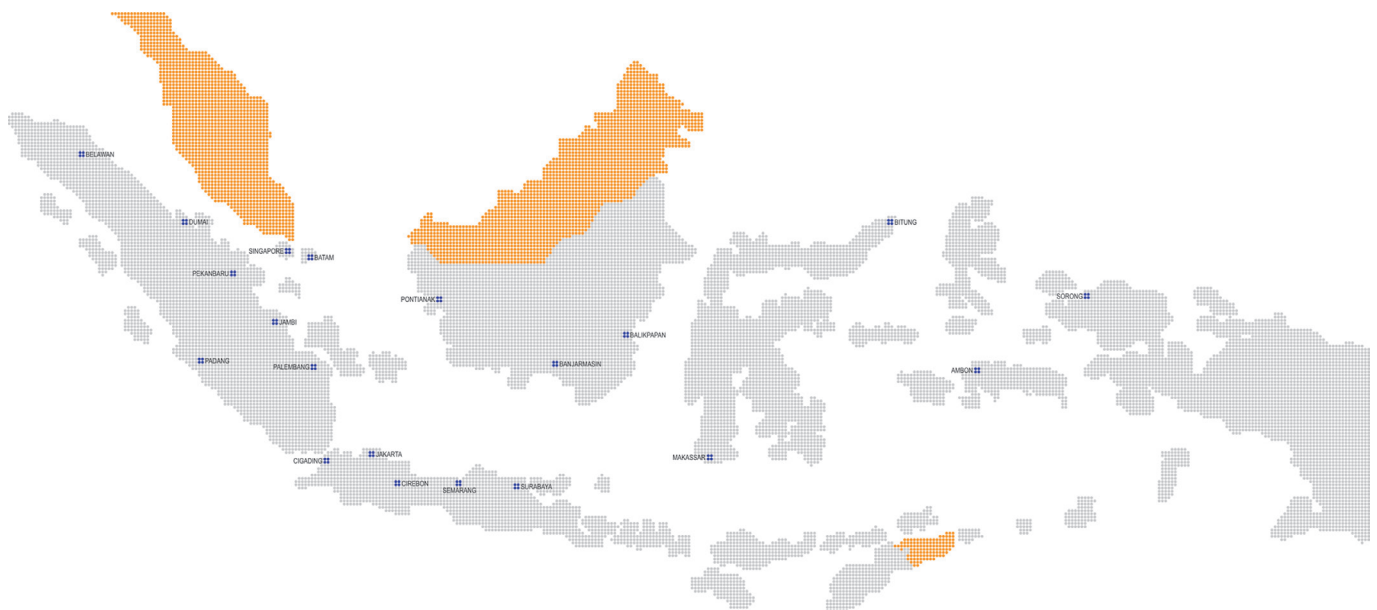
Notes:

- ★ : Main Branch
- : Medium Branch
- ▲ : Branch
- : Representative



Daftar Kontak

List of Contact



AMBON

Jl. Raya Pelabuhan, Kompleks Pelabuhan
Ambon 97126
Telp. (0911) 349607
Fax. (0911) 352745
e-mail : bkiab@klasifikasiindonesia.com

BALIKPAPAN

Jl. MT. Haryono No. 8 Ring Road
Balikpapan 76111
Telp. (0542) 876637, 876641-2-3
Fax. (0542) 876645, 876639
e-mail : bkibp@klasifikasiindonesia.com

BANJARMASIN

Jl. Skip Lama No. 19, Banjarmasin 70117
Telp. (0511) 3350175, 3358311, 3350983
Fax. (0511) 3350175
e-mail : bkibj@klasifikasiindonesia.com

BATAM

Graha BKI, Jl. Yos Sudarso Kav. 5
Batam 29421
Telp. (0778) 433388, 429023, 429024,
451288
Fax. (0778) 429020, 429021
e-mail : bkibm@klasifikasiindonesia.com

BELAWAN

Jl. Veteran No. 218, Belawan
Medan 20411
Telp. (061) 6941276, 6941025, 6941157
Fax. (061) 6941276
e-mail : bkibn@klasifikasiindonesia.com

BITUNG

Jl. Babe Palar No. 53, Madidir Unet
Bitung 95516
Telp. (0438) 38720 - 21
Fax. (0438) 21282
e-mail : bkibt@klasifikasiindonesia.com

CIGADING

Jl. Gerem Raya No. 1 KM. 5, Pulo Merak
Cilegon 42438
Telp. (0254) 573417, 573955
Fax. (0254) 571007
e-mail : bkicg@klasifikasiindonesia.com

CIREBON

Jl. Tuparev KM. 3, Cirebon 45153
Telp. (0231) 205266 Fax. (0231) 205266
e-mail : bkicn@klasifikasiindonesia.com

DUMAI

Jl. Jend. Sudirman, Komplek Perkantoran
Sudirman Raya Blok D-4
Pekanbaru 28281
Telp. (0761) 23088
Fax. (0761) 23088
e-mail : bkidm@klasifikasiindonesia.com

JAMBI

Jl. Raden Bahrin No. 11, RT.11, RW.04
Kelurahan Sungai Putri
Kecamatan Telanai Pura, Jambi
Telp. (0741) 671107 Fax. (0741) 671108
e-mail : bkijb@klasifikasiindonesia.com

MAKASSAR

Jl. Sungai Cerekang No. 28
Makassar 90115
Telp. (0411) 311993, 315460
Fax. (0411) 315460
e-mail : bkims@klasifikasiindonesia.com

PALEMBANG

Jl. Perintis Kemerdekaan 5 Ilir
Palembang 30115
Telp. (0711) 713171, 717151,
713172, 713680
Fax. (0711) 713173
e-mail : bkipb@klasifikasiindonesia.com

PEKANBARU

Jl. Jend. Sudirman, Komplek Perkantoran
Sudirman Raya Blok D-4
Pekanbaru 28281
Telp. (0761) 23088
Fax. (0761) 23088
e-mail : bkipn@klasifikasiindonesia.com

PONTIANAK

Jl. Gusti Hamzah No. 211
Pontianak 78116
Telp. (0561) 739579, 743107
Fax. (0561) 739579, 743107
e-mail : bkikp@klasifikasiindonesia.com

SEMARANG

Jl. Pamularsi No.12, Semarang 50148
Telp. (024) 7610399, 7610744
Fax. (024) 7610422
e-mail : bkism@klasifikasiindonesia.com

SINGAPORE

150 Changi Road #02-01A
Guthrie Building Singapore 419973
Telp. (65) 68830651, 68830643,
68830634
Fax. (65) 63393631
e-mail : bki_sb@pacific.net.sg

SORONG

Jl. Jend. Sudirman No.140, Sorong 98414
Telp. (0951) 322600 Fax. (0951) 323870
e-mail : bkisr@klasifikasiindonesia.com

SURABAYA

Jl. Klianget No.14, Surabaya 60165
Telp. (031) 3295448, 3295449-51,
3295465
Fax. (031) 3294520, 3295451
e-mail : bkisb@klasifikasiindonesia.com

TANJUNG PRIOK

Jl. Yos Sudarso 38-39-40 Tg. Priok
Jakarta Utara 14320
Telp. (021) 4301017-18-19, 4301703,
4300993, 4353291-92, 43933021 (Hunting)
Fax. (021) 4301702, 497020
e-mail : bkity@klasifikasiindonesia.com

UNIT KONSULTANSI & SUPERVISI

Jl. Yos Sudarso 38-39-40 Tg. Priok
Jakarta Utara 14320
Telp. (021) 4301017-18-19, 4301703,
4300993, 4353291
Fax. (021) 43900972, 4300139
e-mail : bkits@klasifikasiindonesia.com



LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Independent Auditor's Report

Laporan Keuangan 31 Desember 2010 dan 2009
Financial Statements Report December 31, 2010 and 2009

Laporan Evaluasi Kinerja untuk tahun yang berakhir pada
31 Desember 2010
Performance Evaluation Report for year ended Desember 31, 2010
